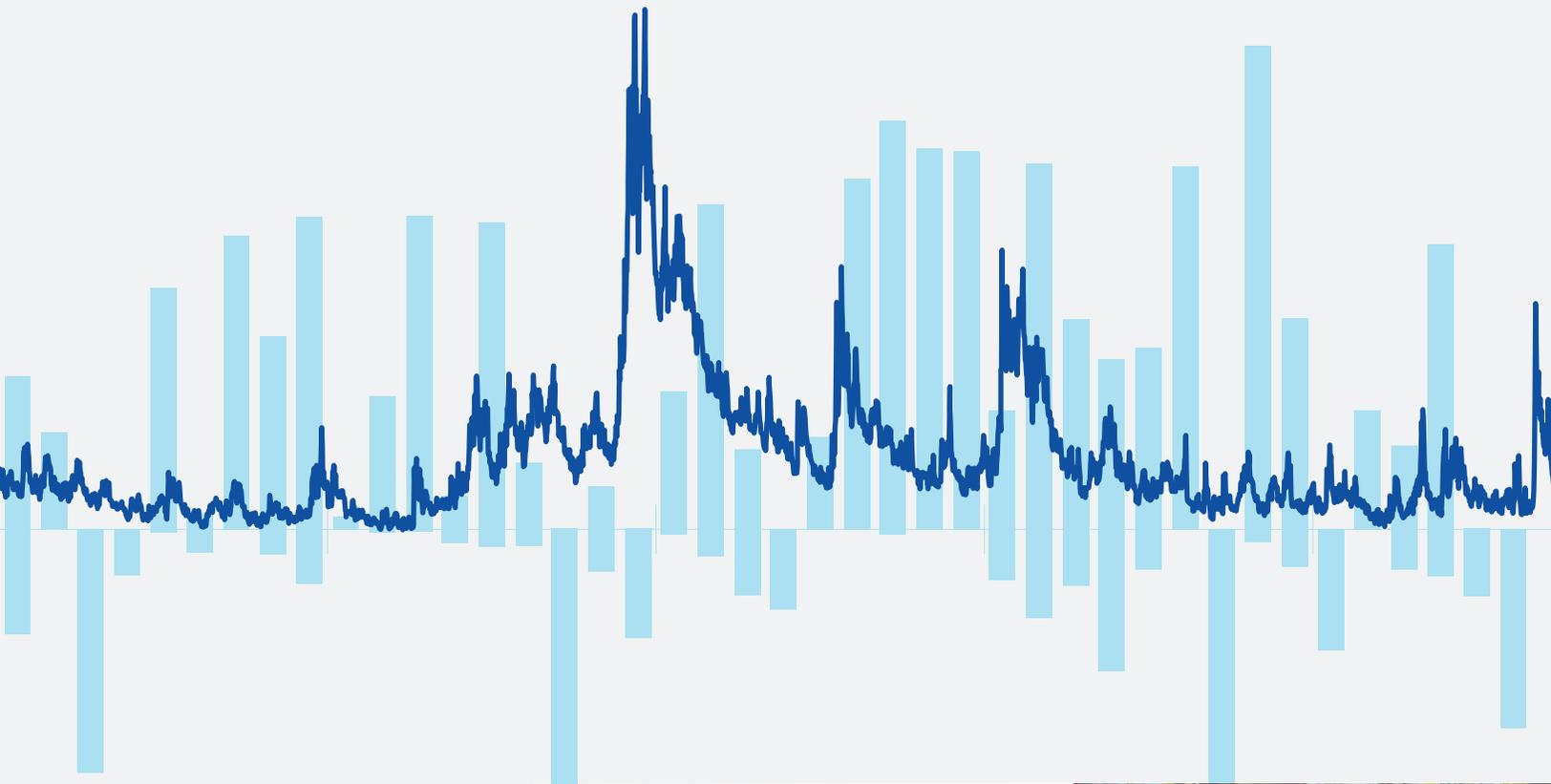


INDONESIA  
ECONOMIC  
QUARTERLY

Oktober 2015

# Di tengah volatilitas dunia



**PERKEMBANGAN TRIWULANAN  
PEREKONOMIAN INDONESIA**  
*Di tengah volatilitas dunia*

Oktober 2015





## Kata Pengantar

Perkembangan Triwulanan Perekonomian Indonesia (*Indonesia Economic Quarterly/IEQ*) mempunyai dua tujuan. Pertama, untuk menyajikan perkembangan utama perekonomian Indonesia dalam tiga bulan terakhir, dan menempatkan dalam konteks jangka panjang dan global. Berdasarkan perkembangan ini, serta perubahan kebijakan dalam periode tersebut, laporan ini menyediakan perkembangan terkini secara rutin tentang prospek perekonomian dan kesejahteraan sosial Indonesia. Kedua, laporan *IEQ* ini memberikan penilaian mendalam terhadap isu-isu ekonomi dan kebijakan tertentu, dan analisis terhadap tantangan pembangunan jangka menengah Indonesia. Laporan ini ditujukan untuk khalayak luas termasuk pembuat kebijakan, pemimpin bisnis, pelaku pasar keuangan, serta komunitas analis dan profesional yang terlibat dan mengikuti perkembangan ekonomi Indonesia.

*IEQ* merupakan laporan Bank Dunia di Jakarta dan mendapatkan bimbingan editorial dan strategis oleh dewan editorial yang dipimpin oleh Rodrigo Chaves, *Country Director* untuk Indonesia. Laporan ini disusun oleh tim *Macroeconomic and Fiscal Management Global Practice*, dibawah bimbingan Shubham Chaudhuri, *Practice Manager*, Ndiame Diop, *Lead Economist*, dan Hans Anand Beck, *Senior Economist*. Tim utama penyusun laporan ini dipimpin oleh Elitza Mileva, *Country Economist* dan bertanggung jawab di bagian A, pengeditan dan produksi, tim inti terdiri dari Arsianti, Magda Adriani, Masyita Crystallin, Fitria Fitriani, Ahya Ihsan, Yue Man Lee, dan Violeta Vulovic. Dukungan administrasi diberikan oleh Titi Ananto. Diseminasi dilakukan oleh Indra Irnawan, Jerry Kurniawan, Desy Mutialim dan Nugroho Sunjoyo dibawah bimbingan Dini Sari Djalal.

Edisi ini juga mencakup kontribusi dari Taufik Indra Kusuma, Matthew Grant Wai-Poi dan Maria Monica Wihardja (Bagian A.7, Kemiskinan), Magda Adriani, Elitza Mileva dan Maria Monica Wihardja (Bagian B.1, El Niño), Iene Muliati, Sapto Rahardjo, Budi Sumantoro dan Mitchell Wiener (Bagian B.2, SJSN), Raven Anderson, Taimur Samad dan Tuo Shi (Bagian C.2, Perumahan). Data dan masukan utama juga diterima dari Frida Yanti Putri Nababan (Bagian A). Laporan ini juga mendapat tambahan masukan yang penting dari Vivi Alatas, Jamie Carter, Edgar Janz, Arvind Nair, Sudhir Shetty, Alex Sienaert, Nikola L. Spatafora, David Nellor (*Australia Indonesia Partnership for Economic Governance*), David Gottlieb (*Australia Department of Foreign Affairs and Trade*), Natalie Horvat dan John Burch (*Australian Treasury, Australia-Indonesia Government Partnership Fund*).

Laporan ini disusun oleh para staf *International Bank for Reconstruction and Development* Bank Dunia, dengan dukungan pendanaan dari Pemerintah Australia (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan atau *Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT*) melalui program *Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis* (SEMEFPA).

Temuan-temuan, interpretasi dan kesimpulan-kesimpulan yang dinyatakan di dalam laporan ini tidak mencerminkan pandangan AusAID dan Pemerintah Australia, para Direktur Pelaksana Bank Dunia atau pemerintah yang diwakilinya. Bank Dunia tidak menjamin ketepatan data-data yang termuat dalam laporan ini. Batas-batas, warna, denominasi dan informasi-informasi lain yang digambarkan pada setiap peta di dalam laporan ini tidak mencerminkan pendapat Bank Dunia mengenai status hukum dari wilayah atau dukungan atau penerimaan dari batas-batas tersebut.

Foto-foto diambil oleh Arsianti, Jerry Kurniawan, Juferdy dan Ed Wrey dan merupakan Hak Cipta Bank Dunia. Semua Hak Cipta dilindungi.

### Untuk mendapatkan lebih banyak analisis Bank Dunia tentang ekonomi Indonesia:

Untuk informasi mengenai Bank Dunia serta kegiatannya di Indonesia, silakan berkunjung ke website ini [www.worldbank.org/id](http://www.worldbank.org/id)

Untuk mendapatkan publikasi ini melalui e-mail, silakan hubungi [madrani@worldbank.org](mailto:madrani@worldbank.org). Untuk pertanyaan dan saran berkaitan dengan publikasi ini, silakan hubungi [emileva@worldbank.org](mailto:emileva@worldbank.org).

## Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF: DI TENGAH VOLATILITAS DUNIA.....</b>	<b>I</b>
<b>A. PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL TERKINI.....</b>	<b>1</b>
1. Perkembangan terbaru di Tiongkok memicu gejolak di pasar keuangan dunia .....	1
2. Konsumsi yang moderat dan investasi yang lemah menghambat pertumbuhan.....	3
3. Ketidakpastian inflasi jangka pendek meningkat akibat kondisi El Niño yang moderat saat ini	5
4. Aliran masuk modal terus berlanjut, walau terdapat tanda-tanda tekanan akhir-akhir ini .....	7
5. Kenaikan penghindaran risiko global mendorong penurunan harga aset Indonesia .....	12
6. Tantangan pengelolaan fiskal pada tahun 2015 .....	14
7. Laju pengentasan kemiskinan turut melambat sejalan dengan moderasi pertumbuhan .....	20
8. Risiko-risiko terhadap prospek cenderung ke arah penurunan, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian akhir-akhir ini .....	22
<b>B. BEBERAPA PERKEMBANGAN TERKINI PEREKONOMIAN INDONESIA.....</b>	<b>24</b>
1. El Niño diperkirakan akan menaikkan harga beras domestik dan inflasi secara moderat.....	24
2. Pelaksanaan sistem asuransi kesehatan nasional Indonesia .....	28
a. Di mana kita sekarang dengan pelaksanaan program asuransi kesehatan nasional? .....	28
b. Ke depan: Mengupayakan agar sistem bekerja lebih baik.....	31
<b>C. INDONESIA 2016 DAN SELANJUTNYA: TINJAUAN PILIHAN .....</b>	<b>33</b>
1. Meningkatkan capaian sektor perumahan Indonesia.....	33
a. Ketersediaan perumahan terjangkau dibatasi oleh tingginya biaya, rendahnya pendapatan, dan hambatan struktural .....	33
b. Belanja pemerintah yang lebih baik dapat membantu menjawab kebutuhan perumahan terjangkau.....	36
<b>LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA .....</b>	<b>40</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Aset pasar negara berkembang turun tajam menyusul peningkatan ketidakpastian prospek Tiongkok .....	2
Gambar 2: Prospek negara berkembang melemah, walau Indonesia sedikit lebih baik.....	2
Gambar 3: Lemahnya permintaan impor juga masih menjadi tantangan .....	2
Gambar 4: Moderasi pertumbuhan berlanjut ke kuartal dua 2015, dengan investasi yang semakin melemah... ..	3
Gambar 5: ...akibat penurunan belanja riil untuk permesinan, peralatan dan kendaraan .....	3
Gambar 6: Pertambangan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan .....	4
Gambar 7: Indikator kegiatan ekonomi bulanan pulih dari tingkatnya yang rendah pada bulan Juli .....	4
Gambar 8: Inflasi IHK tetap tinggi akibat tetap tingginya harga pangan dalam negeri.....	6
Gambar 9: ...meskipun harga pangan internasional telah menurun .....	6
Gambar 10: Defisit neraca transaksi berjalan sedikit melebar, namun aliran portofolio dan investasi lain melemah.....	8
Gambar 11: Data perdagangan bulanan menunjukkan terjadinya surplus kuartalan pada kuartal ketiga.....	8
Gambar 12: Dorongan ekspor dari sektor pertambangan tampaknya bersifat sementara .....	9
Gambar 13: Kepemilikan asing atas aset Indonesia menurun, yang meningkatkan biaya pendanaan .....	9
Gambar 14: Perlambatan di Tiongkok telah menurunkan ekspor Indonesia secara signifikan... ..	11
Gambar 15: ...karena konsumen Tiongkok telah menjadi sumber permintaan akhir yang semakin penting... ..	11
Gambar 16: ...sementara pengaruh pada FDI tidak terlalu nyata .....	11
Gambar 17: Depresiasi Rupiah belakangan ini lebih terbatas dibanding dengan negara sejawat dan dengan <i>taper tantrum</i> tahun 2013.....	13
Gambar 18: Pelonggaran makro-prudensial belum membawa dampak yang nyata pada kredit konsumen .....	13
Gambar 19: Pendapatan migas mendorong penurunan pendapatan pada sembilan bulan pertama 2015.....	15
Gambar 20: ...juga dengan perlemahan sebagian besar kelompok pajak pendapatan dan PPN .....	15
Gambar 21: Belanja modal meningkat secara signifikan pada beberapa bulan terakhir.....	17
Gambar 22: Peningkatan lanjutan dalam komposisi belanja diusulkan untuk tahun 2016 .....	19
Gambar 23: Laju penurunan kemiskinan melambat dalam beberapa tahun terakhir.....	21
Gambar 24: Kebutuhan pendanaan luar negeri bruto untuk sektor swasta telah meningkat	23
Gambar 25: Dampak El Niño terhadap produksi dan harga beras serta indeks harga konsumen terus berubah secara signifikan dari tahun ke tahun.....	25
Gambar 26: Volume pendanaan pinjaman beragunan untuk perumahan sebagai persentase PDB, 2012 .....	34
Gambar 27: Rata-rata alokasi anggaran tahunan untuk program perumahan, 2011 - 2014.....	37

## DAFTAR GAMBAR LAMPIRAN

Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB.....	40
Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran .....	40
Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi.....	40
Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor .....	40
Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen .....	40
Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri .....	40
Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran.....	41

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan.....	41
Lampiran Gambar 9: Ekspor barang .....	41
Lampiran Gambar 10: Impor barang .....	41
Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal.....	41
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter .....	41
Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK.....	42
Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara.....	42
Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional .....	42
Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran.....	42
Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional .....	42
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS.....	42
Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal ..	43
Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI .....	43
Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito .....	43
Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan .....	43
Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah .....	43
Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri .....	43

## DAFTAR TABEL

Table 1: Pada skenario dasar ( <i>base case</i> ), pertumbuhan PDB tahun 2015 diproyeksikan mencapai 4,7 persen .....	iv
Tabel 2: Pada skenario dasar ( <i>base case</i> ), pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 4,7 persen pada tahun 2015, dan meningkat ke 5,3 persen pada tahun 2016 .....	7
Tabel 3: Pada keadaan dasar ( <i>base case</i> ), defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan sebesar 2,7 persen dari PDB untuk tahun 2015 .....	10
Tabel 4: Kementerian Keuangan telah merevisi proyeksi defisit fiskal ke 2,2 persen dari PDB untuk tahun 2015 .....	20
Tabel 5: Pengaruh El Niño pada tahun 2015 terhadap inflasi secara keseluruhan diperkirakan akan moderat; lebih dirasakan oleh penduduk miskin .....	25
Tabel 6: Per Desember 2014, sebagian besar peserta JKN diasuransikan oleh pemerintah... ..	29
Tabel 7: Pemerintah juga membayar sebagian besar iuran JKN.....	29
Tabel 8: Biaya perawatan kesehatan pekerja bukan penerima upah melebihi iuran JKN .....	29
Tabel 9: Dana JKN berakhir di tahun 2014 dengan posisi aktiva bersih (aset neto) negatif..	30
Tabel 10: BPJS Kesehatan – Laporan Kinerja Keuangan .....	31
Tabel 11: Perkiraan keterjangkauan perumahan di Indonesia menurut kondisi pasar .....	34

## DAFTAR TABEL LAMPIRAN

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah .....	44
Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran .....	44
Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi .....	45
Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia.....	46

## DAFTAR KOTAK

Kotak 1: Seberapa penting hubungan perdagangan dan investasi langsung dengan Tiongkok? .....	11
Kotak 2: RAPBN 2016 menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam komposisi belanja, namun akan membutuhkan upaya pengumpulan pendapatan yang signifikan .....	19
Kotak 3: Perubahan metodologi pada SUSENAS bulan Maret 2015 mempersulit perbandingan historis .....	22
Kotak 4: Ringkasan program-program perumahan pemerintah.....	36

## Ringkasan Eksekutif: Di tengah volatilitas dunia



**Perlambatan pertumbuhan Indonesia berlanjut, sementara ketidakpastian lingkungan eksternal semakin membatasi ruang bagi stimulus fiskal dan moneter...**

Kondisi finansial dan ekonomi internasional mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, sehingga meningkatkan tantangan pengelolaan ekonomi makro di Indonesia dan risiko-risiko penurunan terhadap prospek jangka pendek. Penghindaran risiko global meningkat karena kekhawatiran perlemahan pertumbuhan Tiongkok dan volatilitas pasar keuangan, serta prospek jangka pendek kebijakan moneter AS. Selain itu, prospek bagi pasar berkembang (*emerging market*) dan perdagangan dunia semakin melemah, dengan kelebihan pasokan mendorong penurunan harga-harga komoditas. Di Indonesia, perlambatan pertumbuhan dan peningkatan harga bahan pangan telah menghambat laju penurunan kemiskinan. Tekanan kurs tukar yang berlanjut membatasi pilihan-pilihan kebijakan moneter. Bersamaan dengan itu, rendahnya harga komoditas global dan perlambatan pertumbuhan mempengaruhi pengumpulan penerimaan, sehingga memperkecil ruang bagi stimulus fiskal karena batas defisit fiskal sebesar 3 persen dari PDB. Oleh karena itu, pemerintah sedang melaksanakan prakarsa-prakarsa kebijakan untuk memperkuat investasi dan pertumbuhan dan mendorong kemajuan dalam prioritas pembangunan.

**...dan mengalihkan fokus pemerintah ke reformasi struktural dan fiskal untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia**

Pemerintah memahami kebutuhan untuk memperkuat kepercayaan dunia usaha dan iklim investasi untuk meningkatkan potensi laju pertumbuhan Indonesia dan telah mengambil sejumlah langkah-langkah yang penting ke arah tersebut. Dengan percepatan pada kuartal ketiga, belanja modal pemerintah diperkirakan meningkat sebesar 21,4 persen secara riil dalam sembilan bulan pertama tahun 2015 dibanding periode yang sama pada tahun 2014, yang memberi dukungan kepada pertumbuhan. Selain itu, pada bulan September dan Oktober, pemerintah mengumumkan serangkaian paket reformasi yang memfokuskan untuk mengurangi beban dari peraturan dan memperkecil biaya melakukan usaha, misalnya melalui percepatan izin investasi dan penggunaan lahan, lebih cepatnya pendaftaran perusahaan, dan lebih rendahnya harga energi untuk konsumen industri. Selain paket kebijakan tersebut,

RAPBN 2016 memberi isyarat akan semakin membaiknya komposisi belanja pemerintah dengan penguatan program-program sosial dan dengan mengarahkan kembali belanja dari subsidi energi ke pembangunan infrastruktur. Implementasi yang efektif dan tepat waktu dari reformasi-reformasi tersebut akan berkontribusi terhadap upaya kembali kepada laju pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan.

**Tantangan global  
menimbulkan risiko-  
risiko yang  
signifikan terhadap  
prospek Indonesia**

Keperihatinan tentang prospek pertumbuhan Tiongkok dan berlanjutnya ketidakpastian tentang normalisasi kebijakan moneter AS berkontribusi kepada gelombang baru volatilitas pasar keuangan dunia sejak bulan Agustus. Perkembangan ini telah mendorong turunnya mata uang pasar berkembang dan naiknya biaya pendanaan: JP Morgan Emerging Markets Currency Index (EMCI) turun sebesar 5,8 persen antara 30 Juni dan 15 Oktober, sementara selisih (*spread*) Emerging Markets Bond Global Index (EMBIG) naik sebesar 44 basis poin. Antara 10 Agustus dan 30 September 2015, Rupiah mengalami depresiasi sebesar 8,3 persen terhadap dolar AS, namun telah pulih ke tingkat yang setara dengan tanggal 30 Juni. Biaya pinjaman luar negeri negara Indonesia (yang diukur oleh *spread* JPMorgan EMBIG) meningkat sebesar 69 basis poin sejak 30 Juni. Pada saat yang bersamaan, perlambatan pertumbuhan di negara-negara berkembang dan perdagangan dunia, serta rendahnya harga komoditas, membebani pendapatan fiskal dan ekspor Indonesia.

**Pertumbuhan PDB  
di Indonesia menjadi  
4,7 persen yoy pada  
kuartal kedua tahun  
2015, sementara  
kemajuan penurunan  
kemiskinan  
terhambat**

Dengan lemahnya lingkungan luar negeri, PDB riil tumbuh dengan laju yang moderat sebesar 4,7 persen tahun-ke-tahun (*year on year, yoy*) pada kuartal kedua, laju yang sama dengan kuartal pertama tahun 2015. Investasi tetap masih menjadi pendorong utama perlambatan ekonomi, namun belanja konsumsi swasta tumbuh dengan laju yang moderat sebesar 4,7 persen yoy pada kuartal kedua. Ekspor bersih memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan, namun hanya karena kontraksi yang signifikan dalam impor yang sedikit melebihi penurunan dalam ekspor secara tahun-ke-tahun. Sejak pertumbuhan PDB melambat ke 5.0 persen dan terus melemah pada tahun 2014 dan paruh pertama tahun 2015, tingkat kemiskinan di Indonesia secara efektif tidak berubah.

**Perlemahan  
permintaan dalam  
negeri dan  
rendahnya harga  
minyak dunia terus  
meringankan defisit  
neraca berjalan...**

Perlambatan permintaan dalam negeri dan lemahnya impor telah menurunkan defisit neraca berjalan hingga setengah dari tingkatannya pada tahun lalu. Defisit perdagangan sebesar 0,4 miliar dolar AS pada kuartal kedua tahun 2014 telah berubah menjadi surplus. Impor turun dengan tajam pada kuartal kedua, dengan sekitar 40 persen dari penurunan yoy didorong oleh penurunan harga minyak. Pendapatan ekspor barang juga menurun secara tahun-ke-tahun – selama enam kuartal berturut-turut – walau dengan kenaikan temporer ekspor tembaga dari izin ekspor selama enam bulan yang diberikan untuk PT Freeport Indonesia dari pemerintah. Secara kuartal-ke-kuartal, defisit neraca berjalan sedikit melebar menjadi 2,1 persen dari PDB pada kuartal kedua tahun 2015, dari 1,9 persen pada kuartal yang lalu, akibat perlemahan dalam jasa dan pendapatan, yang memang umum terjadi pada kuartal kedua setiap tahun.

**...sementara  
kembali  
pengaruh gejolak  
keuangan telah  
menurunkan aliran  
masuk modal jangka**

Pada saat yang sama, neraca pembayaran secara keseluruhan mencatat defisit sebesar 2,9 miliar dolar AS (1,3 persen dari PDB) pada kuartal kedua tahun 2015. Saldo neraca keuangan, pada 2,5 miliar dolar AS, turun ke tingkat terendahnya sejak kuartal pertama tahun 2013 karena peningkatan investasi langsung tidak sepenuhnya mengimbangi penurunan dalam aliran masuk modal yang lebih volatil. Kuatnya penerbitan obligasi pemerintah mendukung aliran portofolio pada paruh pertama tahun 2015, namun aliran modal itu berubah arah pada bulan Agustus akibat

pendek secara signifikan...

pengetatan kondisi pendanaan untuk semua pasar berkembang. Investor asing menjadi penjual bersih utang pemerintah dengan denominasi Rupiah dari bulan Juli hingga September, yang mengakibatkan aliran keluar modal sebesar 1 miliar dolar AS. Hingga tanggal 30 September, pasar saham mencatat jumlah aliran keluar modal asing bersih selama tahun berjalan 2015 sebesar 983 juta dolar AS, dengan tren yang memburuk pada bulan Agustus dan September.

...dan membatasi ruang gerak stimulus moneter

Menanggapi pengetatan yang signifikan dalam kondisi keuangan internasional dan berlanjutnya tekanan depresiasi kurs tukar, Bank Indonesia (BI) mempertahankan sikap moneter yang relatif ketat dan melakukan intervensi pasar valuta untuk meredam volatilitas kurs tukar nominal, yang membantu mencegah depresiasi yang tidak beraturan. Di lain pihak, pengetatan kebijakan moneter, seiring dengan lebih rendahnya pendanaan luar negeri dan lemahnya permintaan kredit dalam negeri, berkontribusi terhadap terus melemahnya pertumbuhan kredit. Dengan pembatasan yang berlaku pada kebijakan moneter untuk menanggapi perlemahan permintaan dalam negeri, BI telah melonggarkan peraturan makro-prudensial untuk mendukung kredit properti dan kendaraan bermotor, yang sejauh ini hanya memberikan dampak terbatas.

Inflasi tetap bertahan tinggi, dengan El Niño mempengaruhi inflasi IHK secara moderat dan mempengaruhi inflasi bagi kaum miskin secara lebih kuat

Walau dengan lemahnya tekanan sisi permintaan dalam negeri dan lebih ketatnya kondisi kredit, inflasi harga konsumen tetap bertahan di atas 7 persen yoy antara bulan Mei dan Agustus, dan turun menjadi 6,8 persen yoy pada bulan September. Alasan utama dari inflasi yang tinggi itu adalah kenaikan harga BBM pada bulan November 2014 (sebagai kejutan satu kali terhadap inflasi) dan terus bertahannya kenaikan harga pangan yang tinggi, terutama harga beras. Harga beras produsen dalam negeri mencatat peningkatan sebesar rata-rata 16,6 persen yoy dari bulan Juni hingga September, periode waktu dimana harga beras internasional mengalami penurunan. Selain tantangan struktural yang terus bertahan pada sektor pertanian (seperti turunnya produktivitas dan tingginya intensitas tenaga kerja, buruknya infrastruktur dan konektivitas, terpecah-pecahnya pasar dan biaya transaksi yang terkait untuk memperoleh izin impor),<sup>1</sup> tekanan harga bahan pangan (terutama beras) telah meningkat pada beberapa bulan terakhir sebagian akibat kekeringan yang terkait dengan El Niño di sejumlah daerah di Indonesia. Perkiraan Bank Dunia menunjukkan bahwa kondisi El Niño yang moderat hingga kuat dapat meningkatkan harga beras hingga 10 persen per tahun, inflasi IHK setidaknya sebesar 0,3 hingga 0,6 poin persentase, dan laju inflasi yang dialami oleh rumah tangga miskin pada kisaran 1-2 poin persentase. Rumah tangga pertanian juga tampaknya harus menghadapi pendapatan yang secara signifikan lebih rendah.

Pertumbuhan PDB diperkirakan tidak akan turun lebih lanjut dari 4,7 persen pada tahun 2015, dan akan sedikit meningkat ke 5,3 persen pada tahun 2016...

Proyeksi dasar (*baseline*) Bank Dunia untuk pertumbuhan PDB tahun 2015 masih tetap pada 4,7 persen, seperti pada Triwulanan edisi bulan Juli 2015. Untuk tahun 2016, pertumbuhan diperkirakan akan sedikit meningkat menjadi 5,3 persen, sejalan dengan asumsi pertumbuhan pemerintah pada RAPBN 2016. Kenaikan yang signifikan dalam belanja infrastruktur bulanan sejak bulan Juli dan langkah-langkah untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan proyek pemerintah tampaknya akan memberikan sedikit dorongan pada investasi tetap menjelang akhir tahun 2015, dengan sebagian besar dampak terhadap pertumbuhan PDB diperkirakan akan dirasakan pada tahun depan. Peningkatan pertumbuhan yang tipis pada tahun 2016 juga berdasarkan penguatan kegiatan ekonomi di daerah Euro dan Jepang dan

<sup>1</sup> Untuk pembahasan lebih lanjut tentang karakteristik produksi beras di Indonesia, lihat Bagian B.1 dari Triwulanan edisi bulan Maret 2015.

kenaikan perdagangan dunia, walau pada laju yang masih secara signifikan di bawah rata-rata sebelum tahun 2008. Sebagai akibatnya, permintaan komoditas diperkirakan akan sedikit meningkat dan mendorong kenaikan ekspor dan investasi, walau masih cukup jauh di bawah rata-rata sebelum penurunan komoditas.

**...dengan risiko terhadap prospek mengarah ke penurunan**

Penurunan yang lebih cepat dari perkiraan di Tiongkok dan harga komoditas global yang lebih rendah dari proyeksi merupakan risiko penurunan utama terhadap prospek. Risiko-risiko yang timbul dari volatilitas pasar keuangan yang terkait dengan ketidakpastian dari laju dan besarnya normalisasi kebijakan moneter AS dan prospek Tiongkok telah meningkat sejak bulan Agustus. Depresiasi Rupiah yang signifikan, kenaikan biaya pendanaan kembali, tidak cukupnya perlindungan nilai (*hedging*) dari utang dalam valuta asing, dan penurunan margin keuntungan telah melemahkan neraca dunia usaha, terutama dalam sektor sumber daya alam. Dengan besarnya hambatan dan terbatasnya ruang kebijakan, peningkatan dalam prospek pertumbuhan dasar (*baseline*) akan sangat bergantung kepada implementasi yang efektif dari paket-paket reformasi yang baru diumumkan.

**Table 1: Pada skenario dasar (*base case*), pertumbuhan PDB tahun 2015 diproyeksikan mencapai 4,7 persen**

		2014	2015p	2016p
<b>PDB riil</b>	(Persen perubahan tahunan)	5,0	4,7	5,3
<b>Indeks harga konsumen</b>	(Persen perubahan tahunan)	6,4	6,8	5,5
<b>Saldo neraca berjalan</b>	(Persen dari PDB)	-3,1	-2,0	-2,6
<b>Saldo anggaran*</b>	(Persen dari PDB)	-2,2	-2,2	n.a.

Catatan: \* Perkiraan 2015 oleh Kementerian Keuangan.

Sumber: BI; BPS; Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

**Pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional Indonesia sedang berjalan, tetapi masih dibutuhkan upaya lebih untuk mewujudkan akses universal serta mendukung sasaran sosial dan ekonomi yang lebih luas**

Program jaminan kesehatan nasional Indonesia, yang diluncurkan pada tanggal 1 Januari 2014, menjamin portabilitas cakupan tanpa menghiraukan tempat kerja dan memberikan perlindungan kepada rumah tangga terhadap guncangan keuangan, seperti jatuh sakitnya anggota keluarga penghasil pendapatan. Dengan sasaran memberikan akses ke layanan kesehatan secara universal, program itu akan membantu menurunkan kemiskinan dan kerentanan, meningkatkan pertumbuhan pendapatan di kalangan 40 persen penduduk yang paling bawah, membebaskan modal mikro bagi investasi, serta meningkatkan modal dan produktivitas manusia. Namun hingga akhir tahun 2014, 82 persen dari seluruh anggota dilindungi oleh anggaran pusat atau daerah ketimbang dari iuran anggota. Selain itu, biaya jasa kesehatan dari pekerja tidak tetap melampaui iuran mereka dalam bentuk uang tunai hingga enam kali lipat, yang berkontribusi terhadap posisi aktiva bersih yang negatif untuk dana Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2015. Untuk memenuhi tujuan pembangunan yang lebih luas, sasaran-sasaran peralihan berupa cakupan universal dan keberlanjutan finansial juga harus dapat dicapai.

**Saat ini terdapat momentum politik yang kuat untuk meningkatkan penyediaan perumahan yang terjangkau, namun belanja pada sektor tersebut harus lebih efektif dan merata**

Penyediaan perumahan yang terjangkau merupakan salah satu prioritas kebijakan pembangunan. Walau terdapat berbagai perkiraan yang bervariasi, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan jumlah kekurangan perumahan Indonesia berada pada kisaran 17,2 juta unit. Tantangan utama untuk meningkatkan penyediaan perumahan secara signifikan adalah keterjangkauan. Mahalnya pembebasan tanah dan prosedur-prosedur untuk memperoleh izin, meningkatnya biaya pembangunan, dan terbatasnya pendanaan jangka panjang dari perbankan secara bersama-sama membuat pembangunan perumahan yang terjangkau menjadi penuh risiko dan tidak menarik. Pada sisi permintaan, terbatasnya inklusi keuangan, rendahnya pendapatan, dan tidak adanya tabungan rumah tangga membatasi akses ke perumahan yang resmi. Rencana pemerintah mencakup tabungan wajib untuk perumahan dan prakarsa yang ambisius dengan nama Satu Juta Rumah. Prakarsa ini bertujuan untuk membangun satu juta rumah setiap tahun selama lima tahun ke depan. Namun penting untuk mengarahkan kembali kebijakan perumahan kepada rumah tangga berpenghasilan rendah, karena belanja pemerintah untuk perumahan tidak selalu merata.

## A. Perkembangan ekonomi dan fiskal terkini



### 1. Perkembangan terbaru di Tiongkok memicu gejolak di pasar keuangan dunia

**Risiko-risiko eksternal baik keuangan maupun perdagangan, meningkat dalam beberapa bulan terakhir**

Persepsi kemungkinan adanya perlambatan ekonomi yang lebih signifikan dari ekspektasi dan gejolak pasar saham yang lebih tinggi di Tiongkok berkontribusi terhadap meningkatnya aksi menghindari risiko yang dilakukan para investor global dalam beberapa bulan terakhir. Perkembangan pasar keuangan ini terjadi di tengah melemahnya prospek pertumbuhan dan perdagangan dunia yang lebih luas, menurunnya harga komoditas, dan berlanjutnya ketidakpastian tentang laju serta besaran normalisasi kebijakan moneter AS. Secara keseluruhan, tantangan yang bersifat eksternal terus meningkat selama beberapa bulan terakhir. Hal ini memperkuat risiko penurunan prospek perekonomian jangka pendek dari negara-negara pengeksport komoditas, termasuk Indonesia.

**Meningkatnya aksi menghindari risiko yang dilakukan para investor global telah mendorong penurunan harga aset di pasar negara berkembang**

Setelah penguatan tajam yang dimulai pada bulan November 2014, harga ekuitas Tiongkok mencatat penurunan tajam sejak bulan Juni tahun ini, dengan penyusutan sekitar 30 persen antara bulan Juni dan Agustus (Gambar 1). Selain itu, keputusan Bank Rakyat Tiongkok untuk menggunakan pengaturan kurs tukar yang lebih fleksibel mendorong depresiasi Renminbi sebesar 1,9 persen terhadap dolar AS pada tanggal 11 Agustus 2015. Namun banyak analis pasar yang pada awalnya menafsirkan langkah ini sebagai kebijakan untuk menanggapi prospek ekonomi yang lebih rendah dari perkiraan. Hal-hal tersebut memicu gejolak baru di pasar keuangan dunia, dengan indeks pasar negara berkembang MSCI turun sebesar 11,1 persen dan mata uang pasar berkembang, yang diukur oleh indeks JP Morgan EMCI, turun sebesar 5,8 persen antara tanggal 30 Juni dan 15 Oktober. Pasar keuangan Indonesia juga terpengaruh secara signifikan, walau kinerjanya tidaklah terlalu buruk (lihat Bagian 5). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun sebesar 8,2 persen antara 30 Juni dan 15 Oktober, sehingga selama tahun berjalan 2015, penurunannya telah mencapai 13,7 persen. Rupiah melemah 9,9 persen antara akhir bulan Juni dan 30

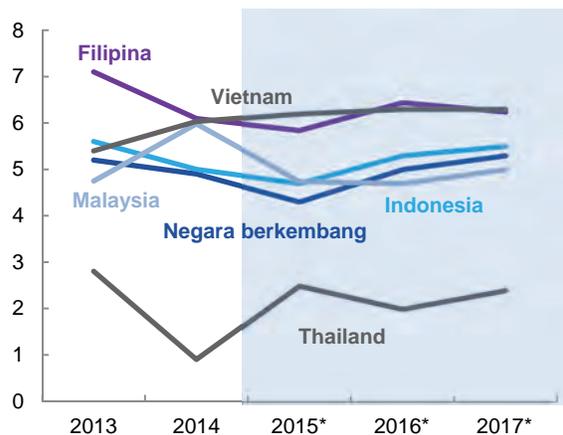
September, namun pulih setelahnya, sehingga depresiasi tahun berjalan berada pada kisaran 6,5 persen.

**Gambar 1: Aset pasar negara berkembang turun tajam menyusul peningkatan ketidakpastian prospek Tiongkok**  
(indeks pasar saham, 3 Juni 2015=100)



Catatan: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 2: Prospek negara berkembang melemah, walau Indonesia sedikit lebih baik**  
(rata-rata pertumbuhan PDB tahunan, persen)



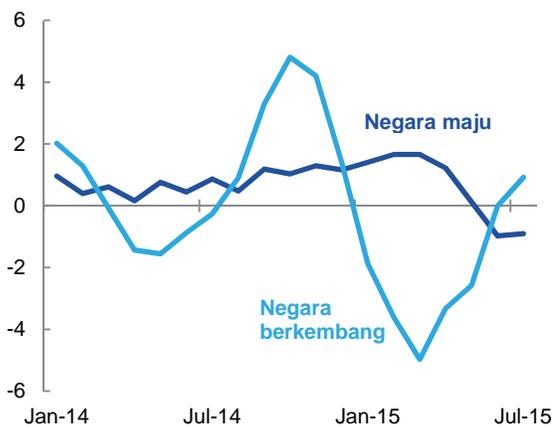
Catatan: \* Proyeksi Bank Dunia  
Sumber: Proyeksi staf Bank Dunia

**Lemahnya pertumbuhan perdagangan dan kegiatan ekonomi dunia makin menekan turunnya harga komoditas**

Kenaikan pertumbuhan dunia seperti yang sebelumnya diproyeksikan oleh Bank Dunia masih belum terjadi. Pemulihan perekonomian negara-negara berpendapatan tinggi, kecuali AS, masih tertunda di kuartal kedua tahun 2015. Sementara, perlambatan di negara-negara berkembang semakin meningkat, namun pertumbuhan Indonesia diperkirakan lebih baik dari rata-rata (Gambar 2). Selain itu, momentum perdagangan internasional berada pada titik terlemah pasca berakhirnya krisis keuangan dunia (Gambar 2). Volume perdagangan dunia menurun sebesar 1,4 persen dalam kurun tiga bulan dibanding tiga bulan (3m/3m) di kuartal pertama tahun ini, dan -0,3 persen 3m/3m di kuartal kedua.<sup>2</sup> Bersandar pada pertumbuhan permintaan global yang lambat dan diperlemah oleh kekhawatiran terkini tentang prospek pertumbuhan Tiongkok, harga minyak internasional mengalami penurunan sebesar

**Gambar 3: Lemahnya permintaan impor juga masih menjadi tantangan**

(tiga bulanan pada tiga bulanan pertumbuhan volume impor, persen)



Sumber: Analisis CPB Netherlands Bureau for Economic Policy; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>2</sup> Berdasarkan data hingga bulan Juli 2015 dari CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

rata-rata 45,9 persen per-tahun dalam sembilan bulan pertama hingga September, sementara harga non-energi mengalami penurunan sebesar 14,6 persen yoy.<sup>3</sup>

## 2. Konsumsi yang moderat dan investasi yang lemah menghambat pertumbuhan

**Perlambatan pertumbuhan yang luas tercatat pada kuartal kedua 2015, sebagian diimbangi oleh penurunan impor, dengan tren yang diperkirakan akan berlanjut untuk jangka pendek**

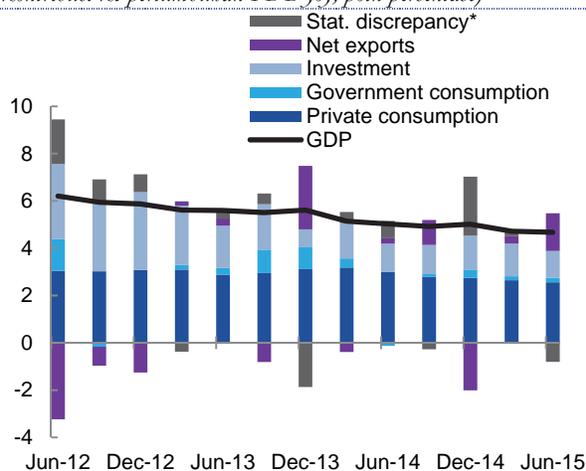
Perlemahan pertumbuhan Indonesia terus berlanjut ke kuartal kedua, mengikuti tren perekonomian di negara-negara berkembang lainnya. Belanja konsumsi swasta dan investasi konstruksi, yang mana keduanya merupakan kunci pendorong pertumbuhan, tumbuh dengan laju yang lambat. Sejalan dengan melemahnya permintaan di dalam negeri, impor mencatat kontraksi yang signifikan, sehingga mendorong pertumbuhan. Ekspor terus menurun dalam konteks pertumbuhan tahun-ke-tahun, walau jumlahnya tidak sebesar kuartal-kuartal sebelumnya. Stimulus ekonomi dari kenaikan belanja infrastruktur publik diperkirakan akan terjadi menjelang akhir tahun dengan dampak yang terbatas terhadap pertumbuhan tahun 2015. Prospek pertumbuhan untuk tahun 2015 masih tetap pada 4,7 persen per-tahun, dan meningkat menjadi 5,3 persen di tahun 2016, seiring dengan kondisi luar negeri yang perlahan membaik, yang disertai dengan sedikit dorongan dari belanja modal pemerintah.

**PDB riil tumbuh 4,7 persen per-tahun pada kuartal kedua yang diakibatkan oleh semakin melambatnya investasi modal tetap**

PDB riil tumbuh sebesar 4,7 persen per-tahun pada kuartal kedua 2015, setara dengan kuartal sebelumnya (Gambar 4). Investasi modal tetap menjadi faktor utama dari perlemahan kegiatan ekonomi di kuartal kedua yang meningkat sebesar 3,2 persen yoy, turun dari 4,3 persen yoy pada kuartal sebelumnya. Belanja untuk permesinan dan peralatan dan kendaraan masing-masing berkontraksi sebesar 5,6 dan 7,5 persen yoy, dan berkontribusi negatif kepada pertumbuhan dari kategori investasi tersebut pada sebagian besar kuartal sejak tahun 2013. Pertumbuhan konstruksi, yang masih menjadi pendorong utama investasi modal tetap, turun menjadi 4,8 persen, dari 5,5 persen per-tahun di kuartal pertama tahun 2015.

**Gambar 4: Moderasi pertumbuhan berlanjut ke kuartal dua 2015, dengan investasi yang semakin melemah...**

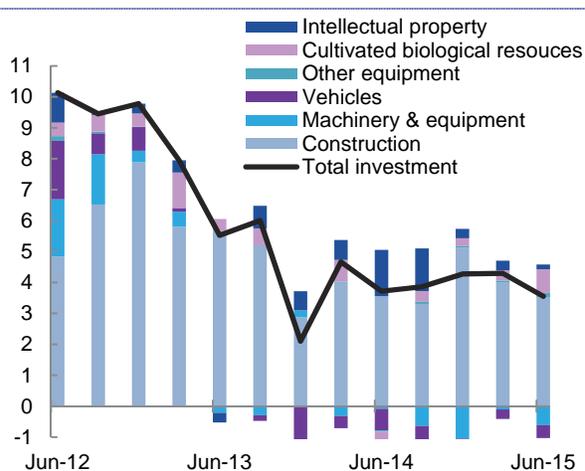
(kontribusi ke pertumbuhan PDB yoy, poin persentase)



Catatan: \* Perbedaan statistik termasuk perubahan persediaan.  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 5: ...akibat penurunan belanja riil untuk permesinan, peralatan dan kendaraan**

(kontribusi ke pertumbuhan investasi tetap yoy, poin persentase)



Catatan: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>3</sup> Dihitung dengan Indeks Harga Komoditas untuk Negara Berkembang Bank Dunia untuk komoditas minyak dan non-energi.

... serta pertumbuhan belanja konsumsi yang relatif lemah...

Belanja konsumsi swasta tumbuh dengan laju moderat yang setara dengan kuartal sebelumnya di 4,7 persen yoy. Bila ditilik dari pertumbuhan rata-rata sebesar 5,4 persen per-tahun pada kurun 2012-2014, laju belanja ini menguatkan pernyataan bahwa moderasi pertumbuhan PDB dan perlambatan penciptaan lapangan kerja sejak tahun 2012 telah mengakibatkan perlemahan sentimen konsumen dan penurunan belanja rumah tangga tahun ini. Belanja konsumsi pemerintah tumbuh 2,3 persen yoy, turun dari 2,7 persen yoy di kuartal pertama.

...sementara pertumbuhan didorong oleh volume impor yang sangat lemah

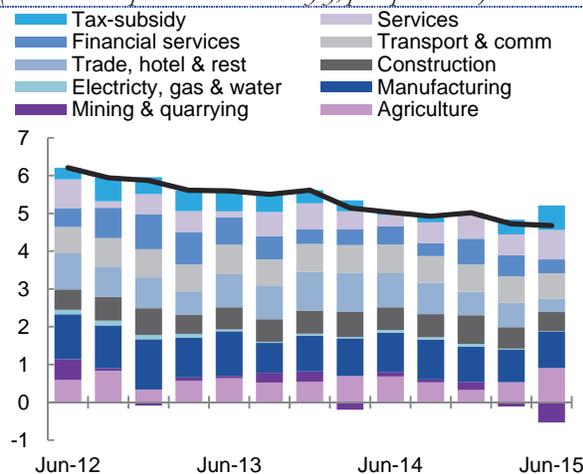
Ekspor bersih berkontribusi sebesar 1,6 poin persentase terhadap pertumbuhan pada kuartal pertama tahun 2015, namun hal ini sepenuhnya disebabkan oleh penurunan dalam impor, sebesar 6,8 persen yoy, yang merupakan catatan data impor yang paling rendah sejak tahun 2009. Penurunan volume impor dikarenakan menurunnya barang dan jasa non-migas, sementara volume impor migas mengalami peningkatan. Menurut data perdagangan bulanan, tercatat penurunan impor (dalam nilai nominal) pada ketiga kelompok – barang konsumsi, barang modal, dan bahan baku. Di lain pihak, perkembangan ekspor hampir mendatar secara tahun-ke-tahun, dengan penurunan sebesar 0,1 persen. Pada kuartal kedua, ekspor hanya didukung oleh pembukaan kembali pengiriman tembaga oleh Freeport pada bulan Mei, setelah perusahaan itu memperoleh izin ekspor sementara dari pemerintah.

Dari sisi produksi, sektor pertambangan terus membebani pertumbuhan

Dari sudut pandang produksi, pertambangan dan penggalian berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan PDB pada kuartal kedua, sementara kontribusi konstruksi dan jasa-jasa mengalami penurunan. Hasil produksi pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 5,9 persen yoy, dengan kontribusi terhadap pertumbuhan PDB sebesar -0,5 poin persentase. Pertumbuhan sektor pertanian dan manufaktur mencatat sedikit peningkatan dibanding kuartal pertama tahun 2015, dengan kontribusi masing-masing sebesar 0,9 dan 1,0 poin persentase terhadap pertumbuhan PDB.

**Gambar 6: Pertambangan berkontribusi negatif terhadap pertumbuhan**

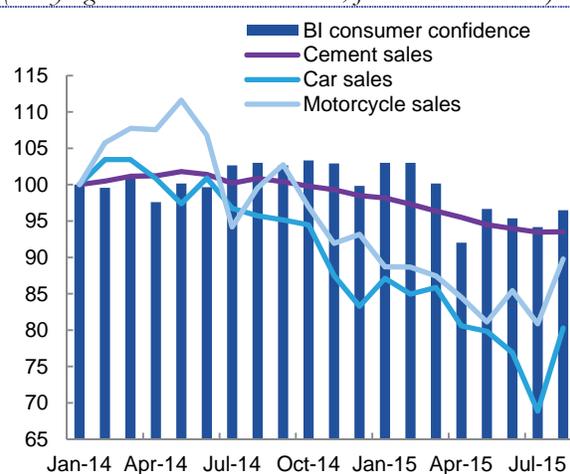
(kontribusi ke pertumbuhan PDB yoy, poin persentase)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 7: Indikator kegiatan ekonomi bulanan pulih dari tingkatnya yang rendah pada bulan Juli**

(data yang disesuaikan secara bulanan, Januari 2014 = 100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Kenaikan data bulanan Agustus belum mengisyaratkan pemulihan dalam pertumbuhan tahunan-tahun**

Tercatat kenaikan sementara pada indikator kegiatan ekonomi bulanan pada bulan Agustus, setelah penurunan tajam pada bulan Juli (secara penyesuaian musiman) (Gambar 7). Khususnya untuk penjualan motor dan mobil mulai memperlihatkan peningkatan sebesar 20 persen yoy atau lebih, yang membalikkan tren kontraksi di kuartal kedua. Namun indeks daya beli manajer (*purchasing managers index*, PMI) Nikkei/Markit untuk manufaktur, tercatat pada angka 47,4 yang masih menunjukkan perlemahan kegiatan perekonomian. Walau mulai terdapat sejumlah tanda-tanda peningkatan momentum produksi di dua bulan pertama di kuartal ketiga tahun 2015, kegiatan ekonomi yang diwakili oleh indikator-indikator bulanan masih secara rata-rata berada di bawah tingkatan yang tercatat setahun yang lalu.

**Pada kasus dasar (*base case*), pertumbuhan PDB, pada 4,7 persen, masih sama dengan proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Juli 2015**

Ke depannya, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan PDB sebesar 4,7 persen untuk tahun 2015 dan membaik menjadi 5,3 persen di tahun 2016. Hampir seluruh indikator berfrekuensi tinggi terus menunjukkan perlemahan ekonomi pada kuartal ketiga dibanding tahun 2014 dan kondisi kredit masih relatif ketat. Selain itu, Bank Indonesia memiliki ruang gerak yang terbatas untuk melonggarkan kebijakan moneter, dengan tetap bertahannya inflasi (lihat Bagian 3), masih adanya kerentanan eksternal, dan sangat volatilnya pasar keuangan dunia, terutama sejak bulan Agustus (lihat Bagian 5). Peningkatan yang belakangan terjadi pada belanja infrastruktur publik, serta langkah-langkah untuk meningkatkan perencanaan proyek dan implementasinya (lihat Bagian 6), mengindikasikan peningkatan tipis dalam investasi tetap menjelang akhir tahun, dengan sebagian besar dampak terhadap pertumbuhan PDB diperkirakan pada tahun 2016. Selain proyeksi peningkatan tipis dalam belanja infrastruktur, perkiraan pertumbuhan tahun 2016 didasarkan pada peningkatan kegiatan ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang serta kenaikan perdagangan dunia, walau dengan laju jauh di bawah rata-rata sebelum terjadinya krisis keuangan dunia, dan peningkatan harga komoditas pada jangka pendek.<sup>4</sup>

### 3. Ketidakpastian inflasi jangka pendek meningkat akibat kondisi El Niño yang moderat saat ini

**Inflasi IHK masih tinggi akibat berlanjutnya kenaikan harga bahan pangan dalam negeri**

Inflasi IHK masih bertahan di atas 7 persen yoy sejak bulan Mei akibat semakin meningkatnya harga bahan pangan sebesar rata-rata 8,5 persen yoy pada bulan Mei-Agustus, yang juga diperkuat oleh pengaruh dasar dari kenaikan harga BBM yang tinggi pada bulan November 2014 (Gambar 8). Terjadi sedikit penurunan dalam inflasi IHK menjadi 6,8 persen yoy pada bulan September. Pada saat yang bersamaan, inflasi inti (tidak menyertakan harga energi dan pangan yang fluktuatif) berangsur stabil pada sekitar 5,0 persen yoy. Inflasi IHK masih bertahan tinggi walau harga eceran bensin dan solar tidak berubah sejak bulan Maret dan melemahnya pertumbuhan permintaan dalam negeri. Selain itu, selama periode yang sama, harga bahan pangan internasional, yang diukur oleh indeks harga bahan pangan Bank Dunia untuk pasar berkembang, mencatat penurunan berkelanjutan sejak bulan Mei tahun lalu dengan tetap lemahnya kegiatan ekonomi lintas negara (Gambar 9). Perbedaan lintasan inflasi bahan pangan dalam negeri tampaknya disebabkan oleh faktor-faktor struktural pada sektor pertanian, seperti penurunan produktivitas dan tingginya intensitas tenaga kerja, buruknya infrastruktur dan konektivitas, terpecahnya pasar dan biaya transaksi yang terkait dengan perolehan izin impor.

<sup>4</sup> Lihat proyeksi terakhir Bank Dunia pada East Asia Pacific Economic Update, October 2015: Staying the Course.

**Gambar 8: Inflasi IHK tetap tinggi akibat tetap tingginya harga pangan dalam negeri...**  
(perubahan yoy, persen; pengamatan terakhir pada September 2015)



Catatan: Harga pangan adalah rata-rata tertimbang dari komponen IHK harga bahan pangan mentah dan terproses.  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 9: ...meskipun harga pangan internasional telah menurun**  
(indeks, Januari 2014 = 100; pengamatan terakhir pada September 2015)



Catatan: Indeks harga pangan Bank Dunia untuk pasar berkembang; komponen IHK bahan pangan mentah untuk Indonesia.  
Sumber: BPS; World Bank; perhitungan staf Bank Dunia

**Pada skenario dasar (base case), pengaruh harga terkait El Niño diproyeksikan terbatas, dengan risiko-risiko kenaikan terhadap inflasi**

Bank Dunia memperkirakan tingkat inflasi rata-rata tahunan IHK sebesar 6,5 persen pada tahun 2015, dan menurun ke rata-rata sebesar 5,2 persen pada tahun 2016, hanya sedikit di atas batas atas sasaran BI. Selain karena pengaruh dasar akibat kenaikan harga BBM yang tinggi pada bulan November 2014, perkiraan inflasi IHK tahun 2015 disusun berdasarkan berlanjutnya perlemahan Rupiah dan bertahannya harga bahan pangan dalam negeri, sementara tekanan sisi permintaan masih terbatas. Proyeksi inflasi dasar (*baseline*) juga mempertimbangkan relatif terbatasnya pengaruh El Niño yang moderat terhadap harga-harga (lihat Bagian B.1). Menurut berita dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kondisi El Niño yang moderat dan curah hujan tahun ini berada di bawah rata-rata dan pengaruh El Niño diperkirakan akan menguat pada bulan Agustus hingga Desember 2015.<sup>5</sup> Jika kekeringan ternyata lebih buruk dari yang diperkirakan, terdapat risiko kenaikan harga bahan pangan pada awal tahun 2016. Selain itu, penerapan langkah-langkah yang baru saja diumumkan untuk menghapus persyaratan yang tidak diperlukan untuk izin ekspor dan impor tertentu dapat menghilangkan sebagian tekanan pada harga bahan pangan (lihat Bagian 8).

<sup>5</sup> BMKG, 30 Juli 2015, "The impact of El Niño: Indonesia will experience prolonged drought," [http://www.bmkg.go.id/BMKG\\_Pusat/Sestama/Humas/IMBAS\\_EL-NINO,\\_INDONESIA\\_MENGALAMI\\_KEMARAU\\_PANJANG.bmkg](http://www.bmkg.go.id/BMKG_Pusat/Sestama/Humas/IMBAS_EL-NINO,_INDONESIA_MENGALAMI_KEMARAU_PANJANG.bmkg)

Tabel 2: Pada skenario dasar (*base case*), pertumbuhan PDB diperkirakan mencapai 4,7 persen pada tahun 2015, dan meningkat ke 5,3 persen pada tahun 2016 (*persentase perubahan, kecuali dinyatakan lain*)

	Tahunan			Tahun-ke-tahun pada kuartal keempat			Revisi tahunan	
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2015	2016
<b>1. Indikator ekonomi utama</b>								
Jumlah pengeluaran konsumsi	4,8	4,4	4,9	4,5	4,4	5,3	-0,2	0,0
Pengeluaran konsumsi swasta	5,3	4,7	5,2	4,7	4,5	5,7	0,0	0,0
Konsumsi pemerintah	2,0	2,1	3,2	2,7	3,1	3,2	-1,6	-0,1
Pembentukan modal tetap bruto	4,1	3,7	5,0	4,3	3,6	5,8	-1,2	-1,1
Ekspor barang dan jasa	1,0	-0,2	4,7	-0,9	2,3	6,0	-2,4	-0,9
Impor barang dan jasa	2,2	-3,2	3,6	-2,3	-0,2	5,9	-4,2	-2,5
<b>Produk Domestik Bruto</b>	5,0	4,7	5,3	4,7	5,2	5,4	0,0	-0,2
<b>2. Indikator luar negeri</b>								
Neraca pembayaran (miliar AS\$)	17,2	5,0	17,3	-	-	-	-5,9	0,2
Saldo neraca transaksi berjalan (miliar AS\$)	-27,5	-17,8	-24,9	-	-	-	7,1	4,1
<i>Sebagai bagian dari PDB (persen)</i>	-3,1	-2,0	-2,6	-	-	-	0,7	0,3
Neraca perdagangan (Miliar AS\$)	-3,0	5,9	1,2	-	-	-	5,5	1,4
Saldo neraca keuangan & modal (miliar AS\$)	44,6	22,8	42,2	-	-	-	-13,0	-3,9
<b>3. Pengukuran ekonomi lainnya</b>								
Indeks harga konsumen	6,4	6,5	5,2	6,5	5,5	5,1	-0,3	-0,1
Deflator PDB	5,4	4,9	5,3	4,2	5,2	5,3	0,6	0,0
PDB nominal	10,7	9,7	10,9	9,2	10,9	11,0	0,6	-0,1
<b>4. Asumsi ekonomi</b>								
Kurs tukar (Rp/AS\$)	11800	13400	14000	-	-	-	200	800
Harga minyak mentah Indonesia (AS\$/barel)	98	58	61	-	-	-	-1	-3

Catatan: Angka ekspor dan impor merujuk kepada volume dari neraca nasional. Semua angka-angka berdasarkan PDB yang direvisi dan diubah dasarnya. Asumsi kurs tukar dan harga minyak mentah adalah berdasar rata-rata terbaru. Revisi-revisi adalah relatif dibanding proyeksi pada Triwulanan edisi bulan Juli 2015.

Sumber: BPS; BI; CEIC; Proyeksi staf Bank Dunia

#### 4. Aliran masuk modal terus berlanjut, walau terdapat tanda-tanda tekanan akhir-akhir ini

**Defisit neraca transaksi berjalan berkurang setengahnya dibanding defisit pada kuartal kedua tahun 2014...**

Defisit neraca transaksi berjalan menyusut secara signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. Ekspor dan impor tetap lemah dibanding tahun yang lalu. Walau demikian aliran masuk modal asing masih terus berlangsung di paruh pertama tahun berjalan, sementara aliran portofolio berbalik arah di bulan Agustus di tengah-tengah pengetatan kondisi pendanaan pada seluruh pasar negara – negara berkembang. Ke depannya, defisit neraca transaksi berjalan diperkirakan akan melebar yang dikarenakan oleh kenaikan impor, dimana sebagiannya disebabkan oleh kenaikan belanja infrastruktur publik. Sementara itu, pelemahan harga komoditas dunia yang terus berlangsung dan tantangan struktural dalam negeri yang membebani daya saing internasional Indonesia membatasi perluasan ekspor. Risiko-risiko pendanaan defisit neraca transaksi berjalan menjadi lebih jelas dengan meningkatnya penghindaran risiko investor dunia pada beberapa bulan terakhir.

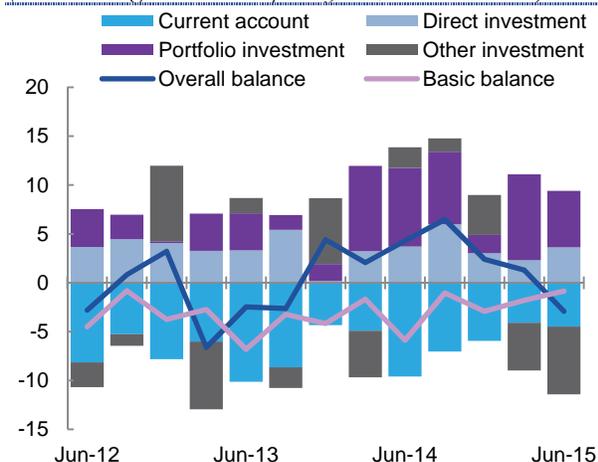
**...seiring penyusutan signifikan pada defisit migas**

Neraca transaksi berjalan menyusut hingga setengah dari tahun lalu, menjadi -2,1 persen dari PDB (-4,5 miliar dolar AS), dan defisit perdagangan sebesar 0,4 miliar dolar AS pada kuartal kedua tahun 2014 telah menciptakan surplus sebesar 4,1 miliar dolar AS, terutama karena penurunan impor. Defisit perdagangan migas turun sebesar 33 persen yoy, menjadi 2,1 miliar dolar AS pada kuartal kedua tahun 2015, yang didukung oleh adanya penurunan harga minyak sementara volume tetap stabil.

Tren ini diperkirakan akan berlanjut ke kuartal ketiga karena data perdagangan bulan Juli dan Agustus menunjukkan saldo positif sebesar 1,8 miliar dolar AS, terutama karena makin menyempitnya defisit migas (Gambar 11). Defisit neraca transaksi berjalan melebar sebesar 0,2 persen dari PDB di kuartal kedua tahun 2015, dari -1,9 persen dari PDB (-4,1 miliar dolar AS) pada kuartal pertama tahun 2015, karena perlemahan musiman dari rekening pendapatan dan jasa yang lebih besar dari peningkatan surplus perdagangan barang. Saldo neraca pendapatan umumnya menyusut di kuartal kedua karena aliran keluar modal yang terkait dengan jasa pinjaman dan pengembangan laba korporat.

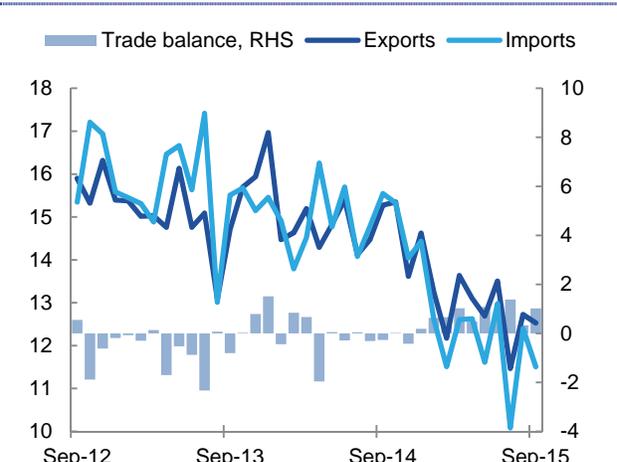
**Gambar 10: Defisit neraca transaksi berjalan sedikit melebar, namun aliran portofolio dan investasi lain melemah**

(saldo rekening utama neraca pembayaran, miliar dolar AS)



**Gambar 11: Data perdagangan bulanan menunjukkan terjadinya surplus kuartalan pada kuartal ketiga**

(miliar dolar AS)



Catatan: Neraca dasar = investasi langsung + saldo neraca transaksi berjalan. Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

**Impor berkontraksi secara tahun-ke-tahun dalam tujuh kuartal berturut-turut**

Impor mengalami penurunan tajam, sebesar 20,8 persen yoy di kuartal kedua tahun 2015 dan berdasarkan data perdagangan bulanan, dan terus menurun pada bulan Juli hingga September sebesar 23,5 persen yoy (Gambar 11). Walau perlemahan impor pada kuartal kedua tahun 2015 bersifat luas (termasuk dalam barang konsumsi dan modal), BBM dan bahan baku lainnya berkontribusi lebih dari tiga perempat keseluruhan peningkatan impor selama lebih dari tiga kuartal, atau masing-masing sebesar 8,6 persen dan 8,2 persen yoy. Penurunan harga minyak terus mendorong penurunan impor. Harga minyak mentah Indonesia<sup>6</sup> turun dari rata-rata sebesar 107,1 dolar AS pada kuartal kedua tahun 2014 ke 59,6 dolar AS pada kuartal kedua tahun ini, dan semakin turun menjadi 43,1 dolar AS pada bulan September 2015.

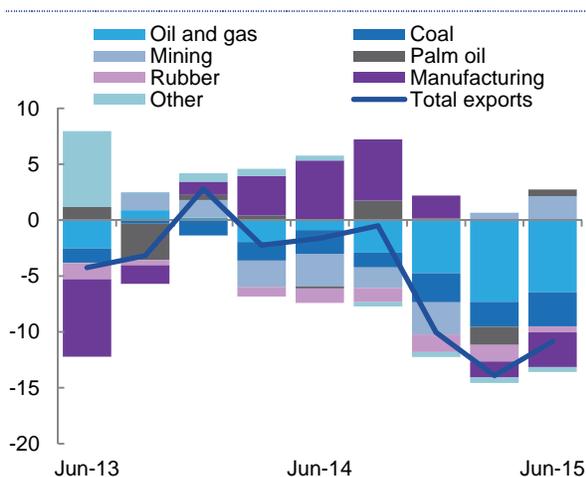
**Ekspor barang kembali mencatat penurunan yang besar dan luas**

Penurunan ekspor yang signifikan, sebesar 10,9 persen yoy, juga tercatat pada kuartal kedua. Pendapatan dari hampir seluruh kelompok ekspor menurun secara tahun-ke-tahun, termasuk manufaktur bukan komoditas yang berkontribusi sebesar -3,3 poin persentase yoy terhadap penurunan jumlah keseluruhan ekspor. Hanya ekspor tembaga dan minyak sawit yang berkontribusi positif terhadap jumlah pertumbuhan pada kuartal kedua tahun 2015, masing-masing sebesar 2,0 dan 0,6

<sup>6</sup> Harga minyak mentah Indonesia ditentukan oleh Pertamina, berdasarkan harga *spot* rata-rata bergerak dari lima minyak mentah yang diperdagangkan secara internasional: Minas (Indonesia), Tapis (Malaysia), Gippsland (Australia), Dubai (UAE), dan Oman.

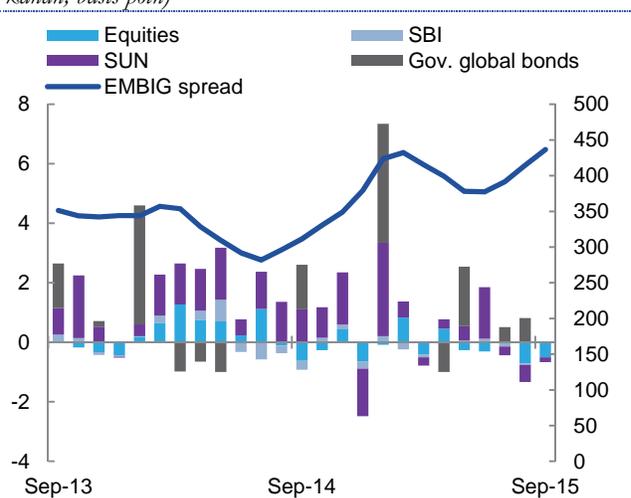
poin persentase yoy (Gambar 13). Penimbunan dan pemberian izin sementara untuk enam bulan dari pemerintah kepada Freeport mendorong ekspor tembaga pada bulan Mei dan Juni ke tingkat yang tercatat sebelum larangan sebagian ekspor mineral berlaku pada bulan Januari 2014. Namun kenaikan itu hanya bersifat sementara dimana ekspor tembaga kembali menurun pada bulan Juli dan Agustus (dari 508 juta dolar AS pada bulan Mei ke kurang dari 383 juta dolar AS pada bulan Agustus). Walau harga minyak sawit terus menurun, ekspor meningkat karena adanya kenaikan permintaan dari India dan Pakistan. Secara volume, ekspor minyak sawit, tembaga, dan karet mengalami peningkatan di kuartal kedua.

**Gambar 12: Dorongan ekspor dari sektor pertambangan tampaknya bersifat sementara**  
(kontribusi terhadap pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 13: Kepemilikan asing atas aset Indonesia menurun, yang meningkatkan biaya pendanaan**  
(pembelian bersih asing, miliar dolar AS; penerbitan bersih obligasi global pemerintah, miliar dolar AS; spread EMBIG Indonesia, kanan, basis poin)



Catatan: SUN – surat utang negara dalam Rupiah; SBI – sertifikat BI. Sumber: BI, JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

**Aliran masuk modal ke Indonesia tetap bertahan pada kuartal kedua...**

Dengan pengetatan kondisi pasar keuangan global pada tahun 2015, aliran masuk modal bersih masih bertahan pada paruh pertama tahun 2015. Investasi langsung mencapai 5,9 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2015, turun dari 6,9 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2014, dan masih jauh di bawah kebutuhan pendanaan bersih luar negeri sebesar 8,5 miliar dolar AS yang berasal dari defisit neraca transaksi berjalan paruh pertama tahun 2015. Investasi portofolio tetap kukuh, walau lebih rendah dari jumlah tertinggi yang pernah tercatat untuk tahun 2015, yaitu 8,8 miliar dolar AS pada kuartal pertama dan 5,8 miliar dolar AS pada kuartal kedua, atau berjumlah 14,6 miliar dolar AS untuk paruh pertama tahun 2015, lebih rendah dari 16,8 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2014. Aliran masuk modal untuk obligasi, terutama untuk obligasi pemerintah penerbitan dalam dan luar negeri, sangat kukuh, dengan aliran keluar portofolio ekuitas yang kecil.

**...namun telah berubah arah mengalir ke luar, terutama sejak aksi jual oleh pasar aset dunia pada awal bulan...**

Namun peningkatan volatilitas pasar keuangan global karena depresiasi Renminbi dan penjualan ekuitas Tiongkok pada bulan Agustus membawa dampak yang besar terhadap aset-aset Indonesia (walau secara proporsional tidak lebih buruk dibanding negara-negara berkembang lainnya, juga lihat Bagian 4). Investor asing menjadi sumber utama aksi penjualan surat utang negara (SUN) dalam Rupiah pada bulan Juli hingga September, yang menyebabkan aliran keluar modal sebesar 1 miliar dolar AS (Gambar 6). Aliran masuk modal portofolio bulan Juli ditopang oleh penerbitan

obligasi global pemerintah (500 juta dolar AS dan 1,25 miliar euro), namun demikian tercatat aliran keluar modal bersih pada bulan Agustus walau dengan penerbitan obligasi pemerintah sebesar 100 miliar yen pada tanggal 4 Agustus. Pasar saham mencatat aliran masuk modal bersih sebesar 9,9 juta dolar AS di bulan Juli dan aliran keluar modal bersih di bulan Agustus dan September, sehingga aliran keluar modal bersih tahun berjalan sampai dengan 30 September berjumlah 983 juta dolar AS.

### ...sehingga meningkatkan biaya pinjaman negara

Walau dengan rasio *bid-to-cover* yang memadai (rata-rata 2,0 pada bulan Juli dan Agustus dan juga paruh pertama tahun 2015) dalam lelang obligasi negara, biaya pinjaman Indonesia meningkat sejalan dengan tren umum di pasar negara berkembang. Selisih imbal hasil (*spread*) JP Morgan EMBIG untuk Indonesia turun sebesar 29 basis poin pada paruh pertama tahun 2015, namun meningkat sebesar 41 basis poin antara 30 Juni dan 15 Oktober. Sebagai pembandingan, *spread* EMBIG pasar berkembang rata-rata turun sebesar 13 basis poin pada kuartal pertama tahun 2015 dan meningkat sebesar 44 basis poin antara 30 Juni dan 15 Oktober. Imbal hasil (*yield*) obligasi pemerintah sepuluh tahun meningkat sebesar 47 basis poin pada paruh pertama tahun 2015 dan setelah itu telah kembali naik sebesar 40 basis poin.

### Proyeksi posisi neraca transaksi berjalan direvisi naik karena lemahnya impor pada paruh pertama 2015 dan revisi semakin menurun untuk harga-harga komoditas

Proyeksi posisi neraca transaksi berjalan direvisi naik sebesar 0,7 poin persentase, menjadi -2,0 persen dari PDB untuk 2015 (Tabel 3). Alasan utama dari revisi ini adalah data perdagangan pada paruh pertama tahun 2015, karena perkiraan kenaikan impor tidak terjadi. Selain itu, penurunan harga minyak mendorong perbaikan tipis dalam kondisi perdagangan Indonesia (yang sebagai importir minyak bersih) meskipun harga komoditas-komoditas ekspor utama Indonesia lainnya tetap rendah. Kondisi perdagangan bersih Indonesia meningkat 3,2 persen antara bulan Juni dan Agustus karena penurunan harga minyak mentah Indonesia sebesar 25,5 persen dibanding rata-rata penurunan sebesar 10,1 persen dalam harga karet, logam, batubara, gas alam, dan minyak sawit. Perkiraan akan adanya kenaikan investasi infrastruktur pemerintah belum mempengaruhi impor. Hal itu diproyeksikan akan sedikit meningkatkan impor modal pada paruh kedua tahun 2015 dan pada tahun 2016.

**Tabel 3: Pada keadaan dasar (*base case*), defisit neraca transaksi berjalan diproyeksikan sebesar 2,7 persen dari PDB untuk tahun 2015**  
(miliar dolar AS kecuali dinyatakan lain)

	2014	2015	2016
Keseluruhan neraca pembayaran	15,3	5,0	17,3
<i>Sebagai % dari PDB</i>	1,7	0,6	1,8
Neraca transaksi berjalan	-27,5	-17,8	-24,9
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-3,1	-2,0	-2,6
Neraca perdagangan barang	7,0	16,0	12,6
Neraca perdagangan jasa	-10	-10,1	-11,4
Penerimaan	-29,7	-29,5	-32,1
Transfer	5,2	5,8	6,0
Neraca keuangan dan modal	44,6	22,8	42,2
<i>Sebagai persen dari PDB</i>	5,0	2,6	4,4
Investasi langsung	16,0	11,9	13,8
Investasi portofolio	26,1	20,8	24,9
Derivatif keuangan	-0,2	0,0	-0,1
Investasi lain	7,1	-0,6	3,4
<i>Catatan:</i>			
Neraca dasar	-11,5	-5,9	-11,1
<i>Sebagai % dari PDB</i>	-1,3	-0,7	-1,1

Catatan: Neraca dasar = saldo neraca transaksi berjalan + FDI bersih

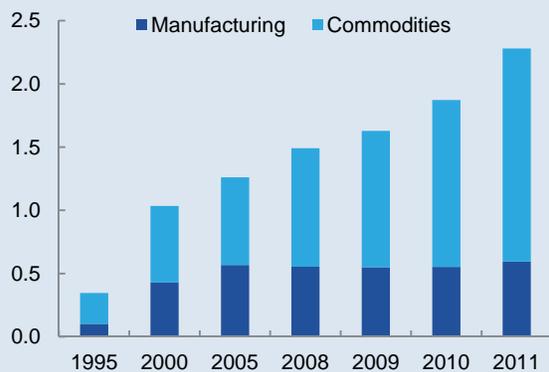
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

**Kotak 1: Seberapa penting hubungan perdagangan dan investasi langsung dengan Tiongkok?**

Perlambatan ekonomi Tiongkok dan pergeseran dari model pertumbuhan yang didorong oleh investasi ke model yang lebih dimotori oleh sektor jasa dan belanja konsumen mempengaruhi para mitra perdagangannya. Tiongkok menjadi salah satu mitra ekspor utama untuk Indonesia selama lebih dari dua dekade. Pada tahun 2009-2014, Tiongkok melampaui AS sebagai tujuan ekspor nomor dua Indonesia setelah Jepang, dengan proporsi rata-rata sebesar 11 persen terhadap total ekspor keseluruhan. Penyeimbangan (*rebalancing*) ekonomi Tiongkok telah berdampak signifikan terhadap ekspor Indonesia. Ekspor ke Tiongkok berkontribusi sebesar -2,0 poin persentase yoy terhadap penurunan jumlah ekspor pada paruh pertama tahun 2015, walau ASEAN dan Jepang memberikan dampak negatif yang lebih signifikan (Gambar 14). Tahun lalu, lemahnya permintaan Tiongkok berkontribusi sebesar -2,7 poin persentase terhadap penurunan tahunan ekspor Indonesia.

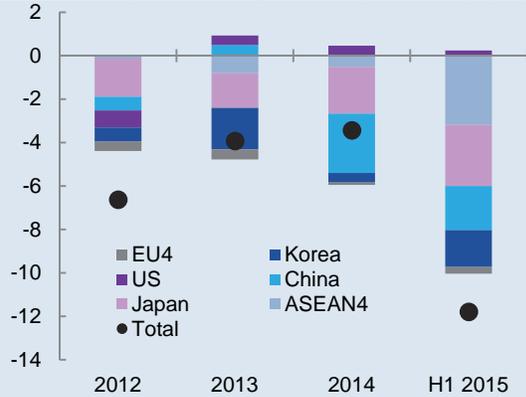
Kebergantungan Indonesia secara moderat pada perdagangan dengan Tiongkok juga dipertegas dalam perhitungan statistik perdagangan berdasarkan nilai tambah. Dengan kemunculan jaringan-jaringan produksi global, penggunaan data aliran perdagangan bruto (yang dibahas pada paragraf sebelum ini) menjadi kurang akurat dalam menggambarkan keterkaitan-keterkaitan perdagangan, karena suatu produk tunggal dapat melintasi sejumlah perbatasan negara sebelum mencapai konsumen sebagai sebuah produk akhir. Dengan alasan yang sama, data perdagangan dapat mengalami penghitungan ganda untuk barang-barang ekspor dan, dengan demikian, memperbesar jumlah volume perdagangan terhitung. Set data OECD/WTO TiVA mengatasi kelemahan data perdagangan bruto dengan memberikan perkiraan ekspor berdasarkan nilai tambah setelah memperhitungkan penggunaan barang impor untuk produksi.<sup>1</sup> Selain itu, data TiVA juga mempertimbangkan bahwa nilai tambah dalam negeri memiliki dua jalur untuk mencapai konsumen akhir luar negeri – secara langsung melalui ekspor barang atau jasa akhir, dan secara tidak langsung melalui ekspor perantara yang mencapai konsumen akhir asing melalui negara-negara lain.

**Gambar 15: ...karena konsumen Tiongkok telah menjadi sumber permintaan akhir yang semakin penting...**  
(nilai tambah dalam negeri untuk ekspor terkait permintaan akhir dari Tiongkok, persen dari PDB)



Sumber: OECD/WTO TiVA; perhitungan staf Bank Dunia

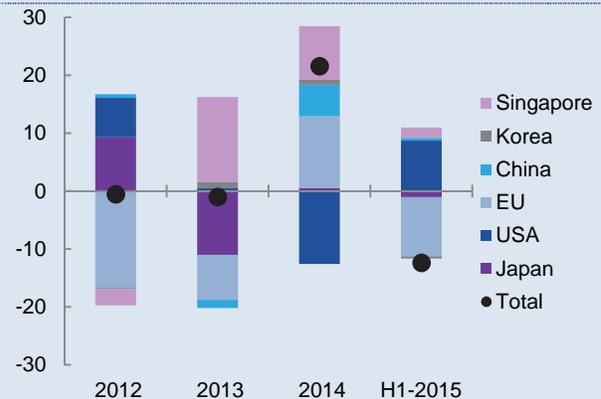
**Gambar 14: Perlambatan di Tiongkok telah menurunkan ekspor Indonesia secara signifikan...**  
(kontribusi ke pertumbuhan nilai ekspor keseluruhan yoy dari ekspor ke mitra perdagangan utama, poin persentase)



Catatan: ASEAN4 terdiri dari Malaysia, Filipina, Thailand dan Singapura

Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 16: ...sementara pengaruh pada FDI tidak terlalu nyata**  
(kontribusi ke jumlah pertumbuhan FDI yoy, poin persentase)



Sumber: OECD/WTO TiVA; perhitungan staf Bank Dunia

Berdasarkan statistik nilai tambah perdagangan, ekspor membentuk 24 persen dari nominal PDB pada tahun 2011, tahun terakhir data TiVA tersedia, turun dari 33 persen pada tahun 2000. Selama periode tersebut, nilai tambah rata-rata yang didapat dari ekspor negara-negara anggota ASEAN juga menurun dari 36 persen pada tahun 2000 ke 31 persen pada tahun 2011, walau penurunannya lebih signifikan bagi Indonesia. Pada saat yang sama, Tiongkok menjadi semakin penting sebagai sumber permintaan akhir untuk negara-negara lain di wilayah tersebut.<sup>2</sup> Dalam hal Indonesia, konsumen Tiongkok merupakan 2,3 persen dari nominal PDB pada tahun 2011, dibandingkan dengan 2,7 persen untuk Jepang dan 1,8 persen untuk AS. Nilai tambah Indonesia yang terkandung dalam permintaan akhir Tiongkok terus meningkat dari 0,3 persen dari PDB pada tahun 1995 ke 1,3 persen pada tahun 2005 dan 2,3 persen pada tahun 2011 (Gambar 15). Namun ekspor komoditas sepenuhnya berada di belakang kenaikan dalam nilai tambah antara tahun 2005 dan 2011. Ke depannya, pertumbuhan sektor jasa diperkirakan akan melampaui pertumbuhan industri seiring dengan reformasi Tiongkok terhadap model pertumbuhannya. Untuk menjadikan upaya penyeimbangan Tiongkok sebagai peluang, Indonesia perlu melakukan diversifikasi eksportnya dari komoditas ke manufaktur dan jasa.

Dalam kaitannya dengan aliran FDI, perkembangan ekonomi terbaru di Tiongkok tampaknya tidak akan membawa dampak langsung yang signifikan ke Indonesia (Gambar 16). Kontribusi Tiongkok terhadap pertumbuhan FDI selama ini hanya relatif kecil, kecuali pada tahun 2014. Jumlah aliran FDI ke Indonesia berkontraksi sebesar 12,4 persen pada paruh pertama tahun ini dibanding paruh pertama tahun 2014, dan sebagian besar penurunan itu karena Uni Eropa. AS merupakan pengurang utama FDI pada tahun 2014. Walau bagian Tiongkok dalam FDI Indonesia berukuran relatif kecil, sebesar 2 persen selama lima tahun terakhir, namun angka itu terpusat pada sektor pertambangan: antara 50 dan 99 persen dari FDI tahunan Tiongkok pada tahun 2010-2014. Penurunan tingkat laba di sektor ini pada beberapa tahun terakhir tampaknya merupakan alasan dari penurunan investasi langsung dari Tiongkok.

Catatan: 1. Lihat Bagian B.2 dari Triwulanan edisi bulan Maret 2013 untuk rincian penggunaan set data OECD-WTO TiVA untuk menganalisis aliran perdagangan Indonesia. Untuk perincian lebih lanjut tentang basis data TiVA, lihat <http://www.oecd.org/sti/ind/measuringtradeinvalue-addedanoecd-wtojointinitiative.htm>.

2. Untuk perincian lebih lanjut tentang pentingnya Tiongkok bagi kinerja perdagangan Asia Timur, lihat Kotak I.B.3. pada *East Asia Pacific Economic Update, October 2015: Staying the Course*.

## 5. Kenaikan penghindaran risiko global mendorong penurunan harga aset Indonesia

**Kembalinya tekanan finansial menyoroti hambatan kebijakan moneter dan terbatasnya pertumbuhan kredit**

Pergeseran selera investor dalam beberapa bulan terakhir telah mendorong alokasi ulang portofolio untuk menjauh dari pasar-pasar berkembang, sehingga menurunkan harga aset-aset keuangan di Indonesia. Volatilitas Rupiah yang signifikan merupakan tanda dari perubahan tren ini dan menjadi kendala bagi kebijakan moneter. Selain mempertahankan sikap moneter yang relatif membatasi, BI melakukan intervensi pada pasar valuta untuk menenangkan gejolak kurs tukar, membantu mencegah depresiasi yang tidak beraturan. Dengan terbatasnya ruang kebijakan, BI mencoba mendukung konsumsi swasta dengan langkah-langkah makro-prudensial yang lebih longgar. Namun hingga kini pengaruh nyatanya tidaklah besar terhadap pertumbuhan kredit dalam negeri, yang masih tetap lemah.

**Harga saham Indonesia menurun sejalan dengan pasar-pasar berkembang lainnya**

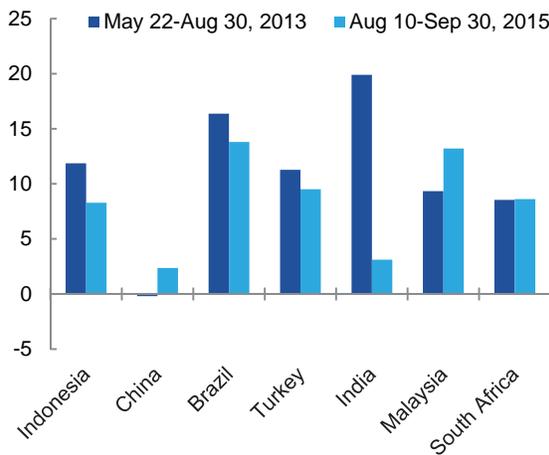
Ekuitas Indonesia seperti diukur oleh IHSG telah menurun sejak bulan April 2015, merosot sebesar 11,0 persen antara akhir bulan Maret dan 30 Juni dan kemudian sebesar 8,2 persen pada kuartal ketiga. Dengan demikian, penurunan indeks selama tahun berjalan hingga tanggal 15 Oktober mencapai 14,0 persen. Secara sektoral, penurunan tersebut didorong oleh industri dasar, pertambangan, keuangan, dan barang konsumsi. Penjualan besar yang tercatat di pasar ekuitas Tiongkok belakangan ini juga mempengaruhi Indonesia, dengan penurunan IHSG sebesar 5,4 persen pada minggu hingga tanggal 21 Agustus. Penurunan ekuitas selama minggu 'Senin hitam' Tiongkok dapat dibandingkan dengan kinerja pasar-pasar ekuitas utama lain di wilayahnya, seperti Tiongkok (-21,0 persen), Jepang (-12,5 persen), Korea (-5,6 persen), dan pasar EME utama seperti Brasil (-6,6 persen). Seluruh indeks ekuitas pasar berkembang utama mencatat tren penurunan yang signifikan sejak bulan Juni tahun ini, dan kinerja Indonesia tidak tercatat sebagai yang sangat

lemah selama periode tersebut. Dalam kebijakan untuk menanggapi tekanan pasar ekuitas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melonggarkan aturan pembelian kembali (*buy-back*) saham pada tanggal 21 Agustus, dan memperkenankan perusahaan-perusahaan untuk membeli kembali saham mereka tanpa melalui rapat umum pemegang saham.

**Tekanan depresiasi Rupiah belakangan ini, walaupun signifikan, telah diredam dengan kebijakan moneter dan kurs tukar valuta yang sesuai**

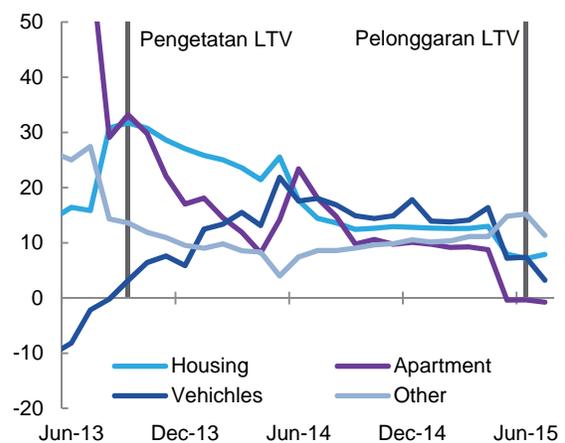
Rupiah terus mengalami depresiasi sejak pertengahan 2014, seiring dengan penguatan dolar AS di seluruh dunia dan diperburuk pada bulan Agustus dengan pengaruh depresiasi Renminbi. Depresiasi Rupiah belakangan ini bukan merupakan hal yang luar biasa dibandingkan dengan negara-negara sejawat dan dengan rencana penghentian stimulus AS (*taper tantrum*) pada pertengahan 2013 (Gambar 17). Rupiah kehilangan 8,3 persen dari nilainya terhadap dolar AS antara tanggal 10 Agustus dan 30 September 2015, dibanding 11,9 persen selama *taper tantrum*, sementara bila dibandingkan dengan depresiasi pada Real Brasil, misalnya, masing-masing mencapai 10,3 persen dan 16,4 persen. Pada tanggal 15 Oktober, Rupiah kembali ke levelnya yang tercatat pada 30 Juni. Sejak pertengahan 2013, pengelolaan kurs tukar valuta yang fleksibel dan kebijakan moneter yang ketat dari BI untuk menanggapi ketidakseimbangan luar negeri telah berkontribusi terhadap perbaikan kinerja mata uang Indonesia dalam beberapa minggu terakhir. Tambahan faktor-faktor yang mendukung pada tahun 2015, termasuk lebih kecilnya defisit neraca berjalan (2,0 persen dari PDB pada paruh pertama 2015 dibanding 3,4 persen pada paruh pertama 2013) dan alokasi anggaran yang lebih baik terhindar dari keterkaitan dengan subsidi BBM yang bergantung pada kurs tukar (dan harga minyak).

**Gambar 17: Depresiasi Rupiah belakangan ini lebih terbatas dibanding dengan negara sejawat dan dengan *taper tantrum* tahun 2013**  
(depresiasi valuta terhadap dolar AS, += depresiasi, persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 18: Pelonggaran makro-prudensial belum membawa dampak yang nyata pada kredit konsumen (persen)**



Catatan: LTV adalah rasio *loan-to-value*.  
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Belum ada tanda-tanda perbaikan pertumbuhan kredit dalam negeri...**

Beralih ke sektor perbankan dalam negeri, pertumbuhan kredit masih tetap terbatas karena lemahnya permintaan maupun penawaran. Pertumbuhan kredit turun dari 10,4 persen yoy pada bulan April ke 9,3 persen yoy pada bulan Juli, laju terendah sejak bulan Januari 2010, namun meningkat ke 10,9 persen yoy pada bulan Agustus. Kenaikan pertumbuhan kredit pada bulan Agustus disebabkan oleh kenaikan pertumbuhan pinjaman investasi ke 12,9 persen yoy, dari 11,2 persen pada bulan April, sementara pertumbuhan pinjaman lain terus menurun. Likuiditas bank melimpah, dengan rasio pinjaman terhadap simpanan (*loan-to-deposit ratio*) bank umum dan bank BUMN masing-masing pada 88,8 dan 86,3 persen, dibandingkan dengan batas atas sesuai aturan sebesar 92 persen. Pada sisi penawaran, pertumbuhan simpanan turun menjadi 12,6 persen pada bulan Agustus, dari 14,5 persen pada bulan April. Kredit macet (*Non-performing loan*, NPL) mencapai 2,8 persen pada bulan Agustus, naik dari 2,4 persen pada bulan Maret. Namun, kenaikan NPL telah terimbangi oleh kemampuan bank dalam merestrukturisasi pinjaman. Dengan menurunnya kualitas aset, pasokan kredit dapat menjadi semakin terbatas karena bank-bank semakin memperketat standar pemberian pinjaman mereka.

**...dengan masih terbatasnya dampak pelonggaran makroprudensial sejauh ini, terutama akibat lemahnya permintaan dalam negeri**

Dengan terbatasnya ruang bagi kebijakan moneter untuk menjawab lemahnya permintaan dalam negeri, pada tanggal 18 Juni BI melonggarkan aturan makroprudensialnya guna mendukung kredit properti dan kendaraan bermotor.<sup>7</sup> Meskipun terdapat sedikit kenaikan pada laju pertumbuhan kredit perumahan pada bulan Juli, jenis kredit konsumen yang lain belum menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Pertumbuhan kredit kendaraan bermotor mencatat tren penurunan berkelanjutan sejak bulan Mei 2014, mencapai 3,2 persen yoy pada bulan Juli, turun dari 16,4 persen pada bulan April. Sebagai perbandingan, ketika BI memperketat kebijakan makroprudensial pada bulan September 2013,<sup>8</sup> pertumbuhan kredit properti melambat, sementara kredit kendaraan bermotor tidak memberi tanggapan sesuai harapan. Dengan lemahnya permintaan dalam negeri dan peningkatan ketidakpastian kurs tukar valuta, pengaruh pelonggaran rasio *loan-to-value* tersebut mungkin terbatas.

## 6. Tantangan pengelolaan fiskal pada tahun 2015

**Sembilan bulan tahun berjalan, pelaksanaan APBN-P 2015 terus menghadapi berbagai tantangan**

Angka-angka yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pendapatan untuk sembilan bulan pertama tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8,5 persen yoy secara nominal, sebagian karena berlanjutnya rintangan dalam lingkungan ekonomi makro domestik dan luar negeri. Pemerintah telah menurunkan sasaran pendapatannya sebesar Rp 112 triliun untuk tahun 2015.<sup>9</sup> Pada sisi pengeluaran, pencairan mulai meningkat pada beberapa bulan terakhir dari tingkatan yang tercatat pada awal tahun, dengan belanja modal meningkat 4,6 kali antara bulan Mei dan September. Pada sembilan bulan pertama tahun ini, belanja modal diperkirakan meningkat sebesar 21,4 persen secara riil dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2014. Menurut *outlook* fiskal yang direvisi, Kementerian Keuangan memperkirakan defisit akan mencapai 2,2 persen dari PDB, dengan ruang penurunan lanjutan ke batas legal sebesar 3 persen. Pemerintah mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengelola risiko-risiko fiskal, termasuk strategi pembiayaan pasar yang lebih besar di awal tahun dan meningkatkan pinjaman resmi asing. Namun, jika penekanan lebih dititikberatkan pada pelaksanaan belanja yang lebih tinggi untuk mendukung pertumbuhan, maka defisit fiskal yang lebih besar dari

<sup>7</sup> [http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/pbi\\_171015.aspx](http://www.bi.go.id/id/peraturan/ssk/Pages/pbi_171015.aspx)

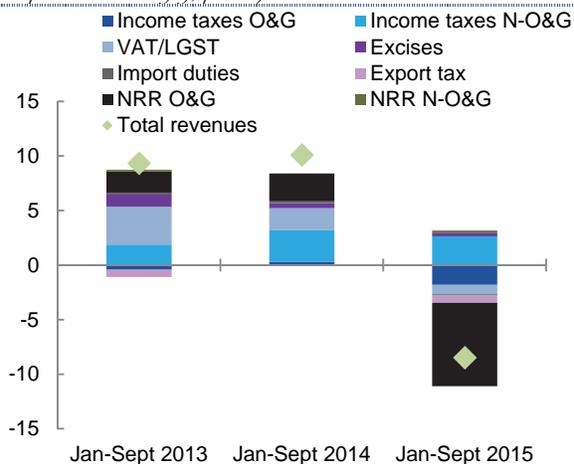
<sup>8</sup> Lihat Bagian A.4 pada Triwulanan edisi bulan Oktober 2013.

<sup>9</sup> Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Semester Pertama Tahun Anggaran 2015.

perkiraan dapat dikaitkan dengan kenaikan biaya pendanaan, terutama di tengah-tengah kondisi pasar finansial yang sedang bergejolak.

**Gambar 19: Pendapatan migas mendorong penurunan pendapatan pada sembilan bulan pertama 2015...**

(kontribusi kelompok pendapatan terpilih terhadap pertumbuhan pendapatan nominal yoy, persen)

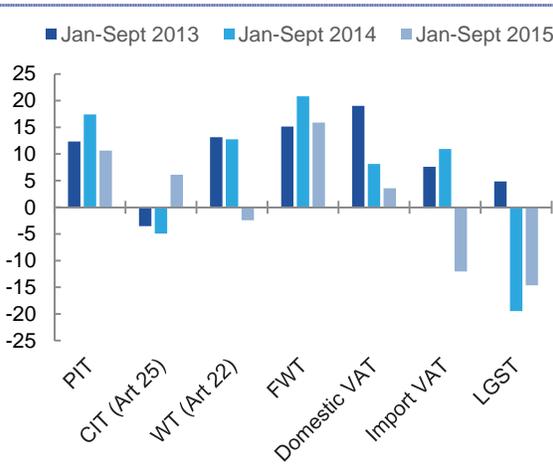


Catatan: O&G adalah migas, N-O&G adalah non-migas; PPnBM adalah PPnBM; NRR adalah "penerimaan sumber daya alam bukan pajak".

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

**Gambar 20: ...juga dengan perlemahan sebagian besar kelompok pajak pendapatan dan PPN**

(pertumbuhan pendapatan nominal yoy, persen)



Catatan: PIT adalah PPh pribadi; CIT – PPh badan sesuai Pasal 25 UU PPh; WT – pemotongan pajak sesuai Pasal 22 UU PPh; FWT – pemotongan pajak final dari UU PPh; PPnBM – PPnBM.

Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

**Rintangan eksternal dan perlambatan pertumbuhan memperlemah pungutan pendapatan...**

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa keseluruhan pungutan pendapatan pada sembilan bulan pertama tahun 2015 mencapai Rp 989,7 triliun, turun sebesar 8,5 persen yoy secara nominal (Gambar 19). Jumlah penerimaan pajak turun sebesar 0,8 persen yoy, yang hanya didukung oleh pajak penghasilan dan cukai non-migas, sementara kelompok pajak lainnya mengalami kontraksi. Namun alasan utama di belakang kinerja pendapatan ini adalah rendahnya pendapatan migas, yang berkontribusi sebesar -7,6 poin persentase yoy terhadap keseluruhan penurunan pendapatan. Harga rata-rata minyak mentah Indonesia pada periode Januari-September 2015 berada 50 persen di bawah periode yang sama tahun lalu; rata-rata depresiasi Rupiah yang terkait mencapai 12,9 persen, yang hanya dapat mengimbangi sebagian dari penurunan harga minyak (dan gas).

**...dengan turunnya penerimaan PPN dan moderasi pajak penghasilan secara tahun-ke-tahun**

Pada tahun berjalan hingga tanggal 30 September, pajak pertambahan nilai (PPN) mencatat penurunan sebesar 3,3 persen yoy, yang berkontribusi sebesar -0,9 poin persentase yoy terhadap keseluruhan penurunan pendapatan. PPN dalam negeri, yang merupakan 60 persen dari keseluruhan PPN, meningkat sebesar 3,6 persen yoy, cukup signifikan di bawah rata-rata tahun-ke-tahun selama lima tahun sebesar 17,6 persen (Gambar 20). PPN impor mengalami penurunan sebesar 12,0 persen yoy, akibat penurunan signifikan dalam nilai nominal impor (dalam Rupiah) sebesar 6,2 persen (yoy) pada paruh pertama tahun ini. Pungutan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami penurunan, sebesar 14,6 persen yoy. Terkait pajak-pajak pendapatan, semua komponen kecuali pajak pendapatan badan Pasal 25 PPh mengalami moderasi. Penerimaan PPh perseorangan dan pungutan pajak final<sup>10</sup> mencatat pertumbuhan positif masing-masing sebesar 10,6 dan 15,9 persen, lebih rendah dari laju pertumbuhan pada periode yang sama tahun lalu dan konsisten

<sup>10</sup> PPh Pasal 21, 25 (pribadi) dan 4(2) dari UU No. 7 Tahun 1983. Pungutan pajak final adalah pembayaran penuh dan akhir dari penerima pendapatan.

dengan moderasi dalam pertumbuhan PDB nominal pada paruh pertama tahun 2015 (9,4 persen yoy, turun dari 11,9 persen yoy pada paruh pertama tahun 2014).

**Kementerian  
Keuangan merevisi  
turun prospek  
pendapatannya  
untuk tahun 2015**

Mengikuti perlambatan pertumbuhan pendapatan dibanding anggarannya pada paruh pertama tahun fiskal, Kementerian Keuangan menurunkan prospek pendapatannya untuk tahun 2015 sebesar Rp 112 triliun, menjadi Rp 1.650 triliun (Tabel 4).<sup>11</sup> PPN mencatat revisi penurunan yang paling besar sebesar Rp 78 triliun, diikuti dengan pajak pendapatan non-migas sebesar Rp 34 triliun. Di sisi lain, pendapatan bukan pajak, terutama yang terkait dengan sektor migas, direvisi naik sebesar Rp 10 triliun sejalan dengan revisi asumsi perlemahan kurs tukar Rupiah terhadap dolar AS. Menurut prospek yang direvisi, Kementerian Keuangan memperkirakan defisit fiskal sebesar 2,2 persen dari PDB pada tahun 2015, yang meningkatkan kebutuhan pendanaan bruto pemerintah sebesar Rp 38 triliun. Risiko-risiko pendanaan dimitigasi dengan strategi pendanaan yang lebih besar pada awal tahun, dengan sekitar 76,7 persen dari kebutuhan tersebut telah dipenuhi melalui penerbitan sekuritas dan sekitar 7 persen diperkirakan akan dipenuhi melalui pinjaman resmi asing. Namun demikian, peningkatan volatilitas pasar, yang mendorong imbal hasil (*yield*) Indonesia naik sebesar 146 basis poin selama tahun berjalan untuk obligasi negara 10 tahun (ke 9,3 persen pada tanggal 18 September), dapat meningkatkan risiko-risiko pendanaan.

**Pemerintah telah  
meluncurkan  
sejumlah aturan  
pajak dengan tujuan  
meningkatkan iklim  
investasi dan  
mendorong  
konsumsi dalam  
negeri**

Dalam langkah untuk meningkatkan iklim investasi dan menarik lebih banyak investasi, pada tanggal 6 April 2015 pemerintah menerbitkan aturan baru yang memperluas insentif pajak ke 144 sektor usaha dan menyederhanakan proses perolehan insentif tersebut.<sup>12</sup> Selain itu, pembebasan pajak hingga 20 tahun ditawarkan kepada para investor di bidang-bidang yang dianggap sebagai “perintis” oleh Kementerian Keuangan.<sup>13</sup> Untuk meningkatkan daya beli konsumen, pemerintah baru-baru ini menghapus sejumlah barang, seperti peralatan rumah tangga, perabotan, dll. dari daftar barang yang dipungut PPnBM,<sup>14</sup> dan memperbesar batas penghasilan tidak kena pajak bagi perseorangan menjadi Rp 36 juta (dari Rp 24,3 juta).<sup>15</sup> Pada saat yang sama, barang-barang yang tidak lagi dipungut PPnBM namun diimpor menjadi kena pajak sebesar sepuluh persen (dibanding 2,5 atau 7,5 persen sebelumnya) menurut Pasal 22 dari UU PPh<sup>16</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Keuangan, Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Semester Pertama Tahun Anggaran 2015.

(<http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/acontent/pelaksanaan%20APBN%20sem.1.pdf>)

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 (PP-18/2015)

<sup>13</sup> Peraturan Kementerian Keuangan No. 159/PMK.010/2015

<sup>14</sup> Peraturan Kementerian Keuangan No. 106/PMK.010/2015

<sup>15</sup> Peraturan Kementerian Keuangan No. 122/PMK.010/2015

<sup>16</sup> Peraturan Kementerian Keuangan No. 107/PMK.010/2015. Sejumlah barang impor dipungut pajak sesuai PPh Pasal 22 karena dianggap sebagai aset yang dibeli untuk mendapatkan keuntungan. Perubahan pajak lainnya yang diterapkan oleh Pemerintah pada bulan Juli adalah meningkatkan bea impor pada sekitar 1.000 barang konsumsi.

**Pencairan anggaran meningkat pada beberapa bulan terakhir, namun masih tetap rendah dibanding alokasi setahun penuh**

Pada tanggal 30 September, sejumlah Rp 1.249 triliun atau 63 persen dari keseluruhan APBN-P 2015 telah dibelanjakan. Belanja untuk pegawai, pembayaran bunga, bantuan sosial dan transfer ke daerah mengikuti alokasi anggarannya dengan saksama. Setelah permulaan yang lambat pada awal tahun, belanja modal meningkat pada beberapa bulan terakhir, mencapai Rp 77 triliun pada akhir bulan September. Pencapaian ini merupakan peningkatan sebesar Rp 17 triliun secara nominal dibanding periode yang sama pada tahun 2014. Menggunakan deflator jumlah investasi tetap implisit dari neraca nasional (yang untuk investasi publik tidak tersedia), belanja modal pemerintah diperkirakan telah meningkatkan sebesar 21,4 persen secara riil dibanding periode yang sama pada tahun 2014. Kenaikan investasi publik yang signifikan ini tampaknya telah memberikan dorongan kepada ekonomi pada kuartal ketiga tahun 2015.

**Kemajuan pola pencairan belanja modal berbeda untuk setiap kementerian**

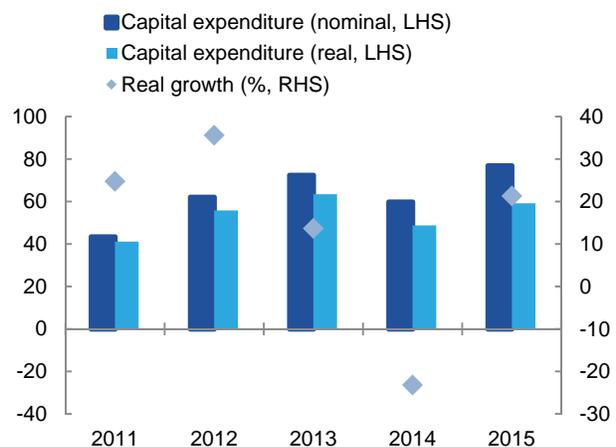
Menurut pemantauan data TEPRA (lihat paragraf berikut)<sup>17</sup>, kementerian-kementerian utama mencatat kemajuan belanja modal dengan laju yang beragam. Pada bulan September, pelaksanaan proyek pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengikuti rencananya dengan baik, dengan 87 persen proyek-proyek strategis (yang merupakan 76 persen dari keseluruhan anggaran kementerian tersebut) telah dilaksanakan. Namun kemajuan pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lebih lambat dibanding perkiraan. 56 persen dari proyek-proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (yang merupakan 70 persen dari jumlah anggaran kementerian tersebut) telah dimulai, sementara hanya 16 persen dari proyek-proyek strategis (53 persen dari keseluruhan anggaran kementerian) dari ESDM masih dalam pelaksanaan.

**Pemerintah meluncurkan sejumlah langkah-langkah baru untuk mempercepat pelaksanaan anggaran**

Pemerintah telah meluncurkan sejumlah langkah untuk mengatasi berbagai tantangan yang selama ini merintang pelaksanaan anggaran. Pada rapat Kabinet tanggal 23 Juli, Presiden memerintahkan para kementerian untuk memulai proses pengadaan secara lebih awal (pada bulan November tahun lalu), untuk menyelesaikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada bulan Desember tahun lalu, dan memulai pencairan pada bulan Januari. Melalui Keputusan Presiden No 20/2015, Pemerintah membentuk Tim Evaluasi dan Pemantauan Realisasi Anggaran (TEPRA), yang dipimpin oleh Menteri Keuangan, untuk secara ketat memantau pelaksanaan anggaran dan memfasilitasi penghapusan rintangan pelaksanaan pada tingkat pusat maupun daerah. Tim itu akan melapor kepada

**Gambar 21: Belanja modal meningkat secara signifikan pada beberapa bulan terakhir**

(Januari-September realisasi kumulatif secara nominal dan riil (Kiri), Rp triliun; pertumbuhan belanja modal riil (Kanan), persen)\*



Catatan: \* Belanja modal riil dihitung dengan implisit deflator investasi tetap dengan dasar tahun 2010 dari neraca nasional. Sumber: Kementerian Keuangan; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>17</sup> <http://monev.lkpp.go.id/monitor/monitorAdjustment>

Presiden setiap minggu kedua setiap bulan. Pada tingkat kementerian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat baru-baru ini menambah sumber daya untuk mempercepat pelaksanaan pada tahun 2015, memulai pengadaan dini untuk tahun 2016 (pada bulan September), dan memulai persiapan awal untuk kontrak-kontrak tahun jamak (*multiyear*) untuk tahun 2016.<sup>18</sup> Selain itu, sebagai bagian dari paket reformasi yang diumumkan pada tanggal 9 September, pemerintah akan mempercepat pencairan dana desa untuk mendukung pembangunan daerah melalui penerbitan keputusan bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan yang akan menyederhanakan dan memperjelas prosedur-prosedur pencairan dana.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Instruksi Menteri, PUPR No.3 Tahun 2015, <http://www.pu.go.id/berita/10481/Ditjen-Bina-Marga-Launching-Lelang-Dini-TA-2016-Senilai-Rp-3,709-Triliun>

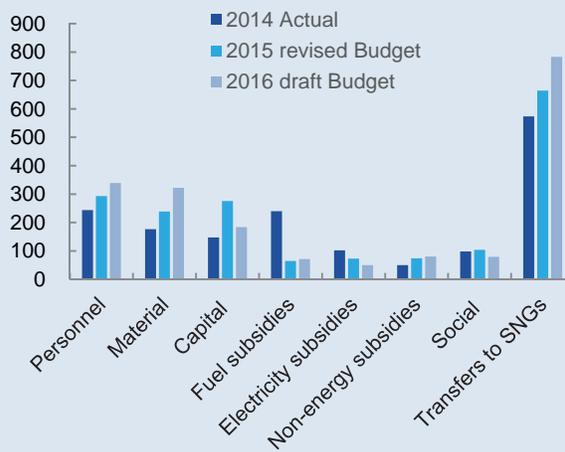
<sup>19</sup> Desa-desa diharuskan untuk menyerahkan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana anggaran sebelum memperoleh dana anggaran dari pemerintah daerah. Sebelum pencairan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, pemerintah daerah harus menerbitkan peraturan untuk mengelola proses tersebut. (<http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/09/06/166442/realisasi-dana-desa-akan-dipercepat>)

**Kotak 2: RAPBN 2016 menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam komposisi belanja, namun akan membutuhkan upaya pengumpulan pendapatan yang signifikan**

Pemerintah menyerahkan RAPBN 2016 kepada DPR pada tanggal 14 Agustus 2015. Rencana anggaran itu kini sedang dalam pembahasan dan diperkirakan akan disetujui pada akhir Oktober 2015. Asumsi-asumsi ekonomi makro RAPBN tersebut, yang disetujui oleh Komisi XI DPR yang membawahi APBN, umumnya sejalan dengan proyeksi Bank Dunia untuk tahun 2016 (pada Bagian 2): pertumbuhan PDB riil diproyeksikan pada 5,3 persen; inflasi pada 4,7 persen; kurs tukar Rupiah terhadap dolar AS pada Rp 13.900; harga minyak mentah Indonesia pada 50 dolar AS per barel; dan produksi minyak pada 830.000 barel per hari. Sasaran pendapatan untuk tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.848 triliun (14,5 persen dari PDB), kenaikan sebesar 12,0 persen dibanding *outlook* pendapatan terakhir dari Kementerian Keuangan untuk tahun 2015. Kenaikan pendapatan ini diproyeksikan akan berasal hampir seluruhnya dari peningkatan penerimaan pajak, sebesar 14,5 persen dibanding perkiraan pendapatan terakhir untuk tahun 2015. Dengan lingkungan makro luar negeri yang cukup menantang dan pertumbuhan moderat yang mempengaruhi proyeksi pendapatan tahun 2015 dan 2016, akan dibutuhkan upaya yang signifikan dalam pungutan pajak untuk mencapai sasaran pendapatan tahun 2016 dan mendukung pelaksanaan anggaran.

Pada sisi pengeluaran, RAPBN itu menunjukkan peningkatan berkelanjutan dalam komposisi belanja, dengan alokasi yang beralih dari subsidi energi ke pembangunan infrastruktur (melalui BUMN dan transfer yang lebih besar ke pemerintah daerah) dan ke peningkatan signifikan belanja kesehatan (untuk pertama kali memenuhi sasaran bagian kesehatan sebesar minimum 5 persen) dan bantuan sosial. Jumlah pengeluaran ditetapkan sebesar Rp 2.121 triliun (16,6 persen dari PDB), 7 persen lebih tinggi dari APBN-P 2015. Peningkatan ini umumnya didorong oleh kenaikan yang signifikan dalam transfer ke pemerintah daerah, sementara belanja pemerintah pusat diperkirakan hanya akan meningkat sebesar 1,5 persen. Jumlah belanja kementerian sesungguhnya diperkirakan akan menyusut sebesar 15 persen dibanding APBN-P 2015. Proyeksi defisit fiskal tahun 2016 adalah 2,1 persen dari PDB (Rp 273,2 triliun), sedikit di bawah perkiraan terkini Kementerian Keuangan untuk tahun 2015 sebesar 2,2 persen dari PDB.

**Gambar 22: Peningkatan lanjutan dalam komposisi belanja diusulkan untuk tahun 2016**  
(belanja, triliun rupiah)



Catatan: SNGs – pemerintah daerah.  
Catatan: Kementerian Keuangan

Tabel 4: Kementerian Keuangan telah merevisi proyeksi defisit fiskal ke 2,2 persen dari PDB untuk tahun 2015  
(triliun rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2015	2015	2015
	Realisasi	APBN-P	Revisi perkiraan Kementerian Keuangan	Realisasi Anggaran Januari – September
<b>A. Penerimaan</b>	<b>1.550</b>	<b>1.762</b>	<b>1.650</b>	<b>990</b>
<b>1. Penerimaan pajak</b>	<b>1.147</b>	<b>1.489</b>	<b>1.367</b>	<b>801</b>
Pajak pendapatan	546	679	678	397
Migas	87	50	52	40
Non-migas	459	630	596	358
PPN/PPNBM	409	577	498	272
Pajak perdagangan internasional	44	49	40	26
Bea impor	32	37	35	23
Pajak ekspor	11	12	5	3
<b>2. Penerimaan bukan pajak*</b>	<b>399</b>	<b>269</b>	<b>279</b>	<b>188</b>
<b>B. Pengeluaran*</b>	<b>1.777</b>	<b>1.984</b>	<b>1.910</b>	<b>1.249</b>
I. Pemerintah pusat	1.204	1.320	1.246	738
Pegawai	244	293	n.a.	213
Barang	177	239	n.a.	108
Modal	147	276	n.a.	77
Pembayaran bunga	133	156	157	123
Subsidi	392	212	214	149
Subsidi energi	342	138	140	105
BBM	240	65	66	59
Listrik	102	73	75	45
Subsidi non-energi	50	74	74	44
Hibah	1	5	n.a.	0
Sosial	98	104	n.a.	66
Pengeluaran lain-lain	12	36	n.a.	2
II. Transfer ke daerah	574	665	664	511
<b>C. Neraca primer</b>	<b>-93</b>	<b>-67</b>	<b>-103</b>	<b>-136</b>
<b>D. Neraca keseluruhan</b>	<b>-227</b>	<b>-223</b>	<b>-260</b>	<b>-259</b>
<i>sebagai persen dari PDB</i>	<i>-2,2</i>	<i>-1,9</i>	<i>-2,2</i>	
<i>Asumsi ekonomi utama</i>				
Pertumbuhan PDB riil (persen)	5.1	5.7	5.2	
IHK (yoy, persen)	8.4	5.0	4.2	
Kurs tukar (Rp/AS\$)	11.878	12.500	13.100	
Harga minyak (AS\$/barel)	97	60	59	
Produksi minyak (ribu barel/hari)	794	825	825	

Catatan: \* data Kementerian Keuangan yang belum diterbitkan.

Sumber: Kementerian Keuangan

## 7. Laju pengentasan kemiskinan turut melambat sejalan dengan moderasi pertumbuhan

### Tingkat kemiskinan bertahan hampir mendatar pada tahun berjalan hingga Maret 2015...

Menurut perkiraan BPS, tingkat kemiskinan resmi tercatat 11,22 persen pada bulan Maret 2015, dibanding 11,25 persen pada bulan Maret 2014. Walau angka itu lebih tinggi dibanding September 2014, sebesar 10,96 persen, pengaruh musiman pendapatan mempersulit perbandingan antara tingkat kemiskinan bulan Maret dan September. Sementara tingkat kemiskinan tetap tidak berubah, jumlah penduduk miskin meningkat dari 28,3 juta orang pada bulan Maret 2014 menjadi 28,6 juta pada bulan Maret 2015 akibat bertambahnya jumlah penduduk.

...melanjutkan tren perlambatan penurunan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir

Tahun 2015 merupakan tahun kedua dimana tingkat kemiskinan tetap datar, meneruskan tren perlambatan pengentasan kemiskinan. Sejak tahun 2010, rata-rata tingkat penurunan kemiskinan adalah 0,5 poin persentase per tahun, dibanding rata-rata penurunan yang cukup besar pada 1,2 poin persentase antara tahun 2007 dan 2009 (Gambar 23). Namun perubahan metodologi yang diterapkan pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret 2015 tidak memungkinkan adanya perbandingan langsung antara data terakhir dengan data dari tahun-tahun sebelumnya (Kotak 3).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga bahan pangan mempersulit pengentasan kemiskinan...

Perlambatan dalam penurunan kemiskinan seperti dicatat pada bulan Maret 2015 terutama didorong oleh moderasi pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga bahan pangan. Rata-rata harga eceran beras bulanan meningkat sebesar 6,0 persen antara bulan Desember 2014 dan Maret 2015,<sup>20</sup> sementara harga bahan pangan meningkat dengan laju 7,0 persen yoy atau lebih sejak bulan November 2014.<sup>21</sup> Karena bahan pangan membentuk dua per tiga dari konsumsi rumah tangga miskin, kenaikan harga bahan pangan mendorong kenaikan rata-rata sebesar 9,6 persen pada garis kemiskinan nasional – dari Rp 302.735 ke Rp 330.776 per orang per bulan.

...sementara fluktuasi harga BBM belakangan ini tampaknya tidak mempengaruhi kemiskinan secara signifikan

Sebaliknya, tingkat kemiskinan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan-perubahan harga BBM yang telah dilakukan. Setelah kenaikan awal harga BBM sebesar Rp 2.000 pada bulan November 2014, harga BBM kembali diturunkan pada bulan Januari 2015 sejalan dengan penurunan harga minyak dunia. Pengalaman yang lalu menunjukkan bahwa putaran terakhir dari Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dapat membantu meredam kejutan akibat kenaikan harga BBM. Namun karena pemilihan waktu pencairan BLSM, dampaknya tidak tercatat pada data Maret 2015. Putaran pertama diedarkan pada bulan Desember 2014 dan yang kedua pada bulan April dan Mei 2015, yang pertama terlalu dini dan yang kedua terlalu terlambat untuk tercatat pada data bulan Maret 2015.

Tantangan jangka panjang untuk membantu penduduk miskin dan rentan yang sulit

Selain itu, pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang telah melambat karena penduduk yang hingga kini masih tergolong miskin semakin sulit dijangkau, dan karena masih banyak penduduk Indonesia yang hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Dengan adanya penurunan tingkat kemiskinan, penduduk yang masih tergolong miskin kini berada semakin jauh di bawah garis kemiskinan, sehingga dibutuhkan pertumbuhan konsumsi yang lebih tinggi untuk menjaga laju

**Gambar 23: Laju penurunan kemiskinan melambat dalam beberapa tahun terakhir**  
(tingkat kemiskinan, persen; perubahan dalam kemiskinan, poin persentase)



Sumber: SUSENAS; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>20</sup> Untuk pembahasan perkembangan harga beras dalam negeri terbaru, lihat Bagian B.1 pada Triwulanan edisi bulan Maret 2015.

<sup>21</sup> Lihat Bagian A.3 pada Triwulanan edisi bulan Juli 2013.

**dijangkau masih cukup besar**

pengentasan kemiskinan. Pada saat yang bersamaan, pada tahun 2014 terdapat tambahan 67,5 juta penduduk Indonesia yang hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan namun masih di bawah 1,5 kali garis kemiskinan. Hal ini berarti bahwa volatilitas ekonomi – seperti kenaikan harga bahan pangan – dapat beresiko menempatkan mereka kembali ke dalam kemiskinan.

### Kotak 3: Perubahan metodologi pada SUSENAS bulan Maret 2015 mempersulit perbandingan historis

Terdapat dua perubahan metodologi dalam SUSENAS tahun 2015, keduanya berpotensi mempengaruhi pengukuran kemiskinan. Pertama, responden diminta untuk mencatat konsumsi rumah tangga untuk 100 kelompok bahan pangan yang lebih luas tahun ini, dibanding 260 kelompok bahan pangan yang lebih sempit yang digunakan pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan pengalaman di negara-negara lain, penggunaan kelompok dengan jumlah lebih sedikit namun lebih luas dalam survei rumah tangga umumnya menghasilkan jumlah konsumsi terukur yang lebih rendah. Sebagai konsekuensinya, untuk garis kemiskinan yang tetap, tingkat kemiskinan akan tampak lebih tinggi dibanding penggunaan jumlah kelompok yang lebih besar namun lebih sempit. Walau hal ini berarti bahwa tingkat kemiskinan tahun 2015 dapat lebih rendah jika menggunakan kuesioner yang lalu, belumlah jelas seberapa lebih rendahnya. BPS dan Bank Dunia akan melakukan uji lapangan menjelang akhir tahun untuk lebih memahami pengaruhnya.

Kedua, metode untuk memilih Blok Sensus untuk survei juga diubah. Sebelumnya BPS menggunakan Blok Sensus berdasarkan tingkat rata-rata pendidikan, yang secara acak memilih Blok yang akan disurvei pada tiap-tiap tingkat pendidikan. Mulai pada tahun 2015, BPS beralih ke penggunaan tingkat kekayaan untuk Blok Sensusnya. Kekayaan rumah tangga dapat diperkirakan secara statistik dari informasi Sensus, seperti kepemilikan aset, tingkat pendidikan, jenis dan bidang pekerjaan, kondisi tempat tinggal, dan karakteristik demografis. Blok Sensus kemudian dipilih secara acak untuk setiap tingkat kekayaan yang berbeda. Pengaruh pemilihan acak seperti ini terhadap pengukuran kemiskinan belum diketahui. Bila lebih banyak rumah tangga tidak miskin dan lebih sedikit rumah tangga miskin yang disurvei dibanding sebelumnya, maka tingkat kemiskinan yang diukur akan lebih rendah dibanding bila menggunakan metodologi lama. Seperti perubahan metodologi yang pertama, perincian tepatnya dari perubahan-perubahan ini, dan potensi dampak bersihnya terhadap pengukuran kemiskinan, masih perlu lebih dipahami.

## 8. Risiko-risiko terhadap prospek cenderung ke arah penurunan, seiring dengan meningkatnya ketidakpastian akhir-akhir ini

**Tetap rendahnya harga komoditas masih menjadi risiko penurunan utama terhadap neraca sektor publik dan swasta...**

Risiko terhadap perkiraan prospek ekonomi oleh Bank Dunia untuk Indonesia masih tetap mengarah ke penurunan, seperti pada Triwulanan edisi bulan Juli 2015. Lemahnya pemulihan ekonomi negara maju dan luasnya perlambatan pada negara-negara berkembang, terutama Tiongkok, bersamaan dengan lambatnya pertumbuhan perdagangan dunia, semakin menekan turunnya harga komoditas. Menurut proyeksi Bank Dunia, harga minyak diperkirakan masih akan bertahan jauh di bawah tingkat harganya pada tahun 2013 dalam dekade ke depan,<sup>22</sup> yang menguntungkan bagi keseluruhan kegiatan ekonomi di Indonesia (sebagai importir bersih minyak), namun juga memberikan tekanan yang signifikan terhadap pendapatan fiskal terkait migas. Karenanya, pelaksanaan sistem penyesuaian harga BBM yang baru direformasi tersebut sangatlah penting untuk mengurangi risiko pada neraca publik. Harga sebagian besar komoditas lain juga diperkirakan akan tetap rendah selama jangka menengah, dan akan mendorong risiko penurunan bagi anggaran fiskal, serta laba perusahaan dan pendapatan rumah tangga.

<sup>22</sup> World Bank, East Asia Pacific Economic Update, October 2015: Staying the Course.

...sementara risiko dari volatilitas pasar keuangan dan depresiasi Rupiah telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir

Risiko utama lainnya terhadap prospek Indonesia adalah kemungkinan dampak volatilitas pasar keuangan terhadap sektor riil yang lebih besar dari perkiraan. Perkiraan kebutuhan pendanaan luar negeri untuk tahun 2015 lebih rendah dibanding tahun 2014 karena defisit neraca berjalan telah berkurang secara signifikan dan keperluan perputaran hutang luar negeri dari sektor publik jugatelah mengalami penurunan (Gambar 24). Namun pinjaman luar negeri sektor swasta yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun mencapai 49 miliar dolar AS pada akhir tahun 2014. Walau cadangan devisa, 102 miliar dolar AS pada bulan September 2015, mencukupi perkiraan jumlah kebutuhan pendanaan bruto tahun 2015 sebesar 77 miliar dolar AS, kenaikan yang cepat dalam *leverage* luar negeri sektor swasta, seiring dengan depresiasi Rupiah yang signifikan, kenaikan biaya pendanaan ulang, terbatasnya lindung nilai (*hedging*) dari pinjaman dalam valuta asing, dan penurunan margin keuntungan, merupakan risiko yang signifikan bagi sektor swasta.

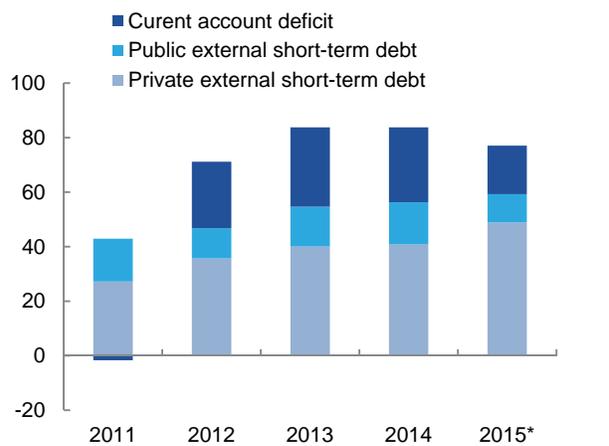
Dengan terbatasnya ruang bagi kebijakan yang ekspansif...

Ruang kebijakan masih tetap terbatas, sebagian besar karena tidak mendukungnya lingkungan global. Kebijakan moneter BI diperkirakan masih akan tetap ketat pada jangka pendek akibat kemungkinan berlanjutnya volatilitas pasar keuangan terkait dengan normalisasi kebijakan moneter AS. Pendapatan yang lemah juga membatasi ruang bagi stimulus fiskal. Namun RAPBN 2016, yang mengusulkan program-program sosial yang lebih besar dengan sasaran yang lebih baik, dan merealokasi belanja dari subsidi energi ke pembangunan infrastruktur, dapat membantu meningkatkan daya beli penduduk yang paling rentan serta mendorong investasi tetap dan pertumbuhan.

...reformasi sisi penawaran dapat mendukung keyakinan pelanggan dan dunia usaha

Dalam lingkungan ekonomi makro yang menantang tersebut, reformasi sisi penawaran dapat memiliki peran yang penting dalam meningkatkan keyakinan pelanggan dan dunia usaha untuk jangka pendek dan mendorong tingkat pertumbuhan jangka panjang. Pemerintah telah memulai langkah-langkah signifikan dalam reformasi peraturan perundangan dengan empat paket kebijakan antara tanggal 9 September dan 15 Oktober 2015, termasuk langkah-langkah untuk menghapus persyaratan yang tidak diperlukan dalam perizinan impor dan ekspor yang terpilih, menyederhanakan perizinan investasi pada sistem perizinan satu atap Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan dalam zona industri, menurunkan harga BBM, gas dan listrik untuk industri, meluncurkan upah minimum yang berbasis rumus, mempercepat proses permohonan izin penggunaan lahan, dan memperluas pendanaan ekspor bagi UKM dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut secara efektif dapat membantu mengembalikan ekonomi ke tingkat pertumbuhan potensial yang lebih tinggi.

Gambar 24: Kebutuhan pendanaan luar negeri bruto untuk sektor swasta telah meningkat (miliar AS\$)



Catatan: Pinjaman jangka pendek dihitung berdasar periode jatuh tempo yang tersisa; \* proyeksi 2015.  
Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

## B. Beberapa perkembangan terkini perekonomian Indonesia



### 1. El Niño diperkirakan akan menaikkan harga beras domestik dan inflasi secara moderat

**Kondisi El Nino yang sejauh ini moderat diperkirakan akan menguat pada Paruh Kedua 2015 dan dapat memberikan tekanan terhadap harga-harga**

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi El Niño yang moderat dan curah hujan yang berada di bawah rata-rata telah tercermati sepanjang tahun ini. Efek El Niño diperkirakan akan menguat pada bulan Agustus hingga Desember 2015.<sup>23</sup> Perkiraan serupa juga telah diperoleh oleh Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional AS serta Biro Meteorologi Australia, keduanya memperkirakan kondisi El Niño akan bertahan hingga awal 2016. Studi global dari kondisi cuaca berskala besar seperti El Niño umumnya menemukan dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi makro, seperti pertumbuhan PDB yang lebih rendah, inflasi domestik yang lebih tinggi, serta peningkatan harga energi dan komoditas non-BBM secara global.<sup>24</sup> Bagian ini memaparkan beberapa perkiraan dampak El Niño terhadap harga beras dan inflasi IHK di Indonesia dalam jangka pendek.

**Secara historis, pengaruh El Niño terhadap produksi dan harga beras sangat bervariasi...**

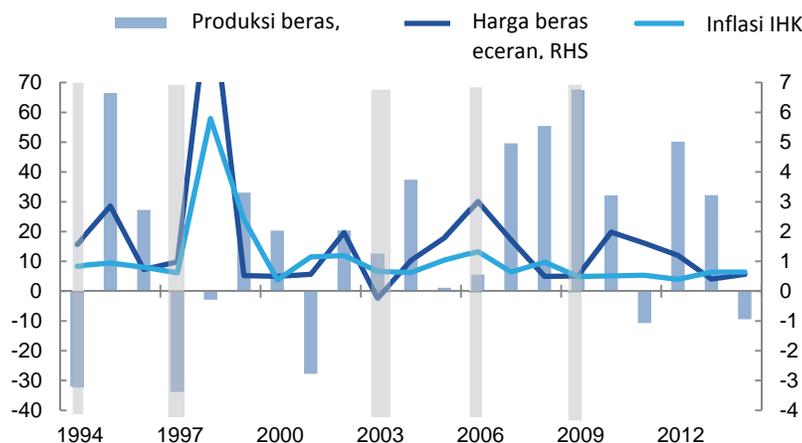
Dampak El Niño terhadap lahan pertanian, produksi dan harga beras tidak segera terasa, karena variabel-variabel ini dipengaruhi oleh beragam faktor lain. Pada tahun 1997, misalnya, ketika El Niño yang kuat melanda, luas lahan panen menurun lebih dari 400.000 hektar (-3,7 persen), namun kenaikan harga beras eceran dan IHK saat itu tercatat moderat (Gambar 25). Pada tahun 2006, El Niño yang lemah tidak mengakibatkan penurunan luas sawah, namun harga beras dan harga barang-barang konsumsi meningkat cukup tinggi. Menurut Bank Indonesia (BI), El Niño yang kuat pada tahun 1997 telah merusak sekitar 161.000 hektar sawah (atau penurunan 1,4 persen dibandingkan dengan tahun 1996), yang mengakibatkan penurunan produksi

<sup>23</sup> Lihat catatan kaki 4.

<sup>24</sup> Lihat, misalnya, Cashin, P., K. Mohaddes dan M. Raissi (2015). Cuaca yang baik atau buruk? Dampak ekonomi makro dari El Niño. Makalah IMF WP/15/89.

beras sebesar 715 ribu ton. Tercatat bahwa kondisi El Niño yang lemah pada tahun 2006 telah mengakibatkan kurang dari separuh kerusakan sawah dan penurunan produksi beras pada tahun 1997.<sup>25</sup>

**Gambar 25: Dampak El Niño terhadap produksi dan harga beras serta indeks harga konsumen terus berubah secara signifikan dari tahun ke tahun (perubahan tahunan, persen)**



Catatan: Daerah abu-abu menunjukkan tahun El Niño.  
Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

... karena itu, dikembangkan dua skenario untuk mengukur perkiraan dampaknya pada tahun 2015

Untuk memperkirakan dampak potensial El Niño tahun ini terhadap produksi beras dan tingkat inflasi, dua skenario dianalisa. Dalam skenario moderat, penurunan luas lahan panen sebesar 200.000 hektar (atau penurunan sebesar 1,5 persen dari tahun 2014) kurang lebih setara dengan apa yang dikaitkan dengan El Niño pada tahun 1997 dalam laporan BI. Dalam skenario buruk, 400.000 hektar sawah diasumsikan rusak. Dengan menggunakan perkiraan produktivitas BPS tahun 2014 sebesar 5,1 ton/hektar, skenario moderat akan mengakibatkan hilangnya produksi beras sebesar 1 juta ton (Tabel 5). Skenario beratakakan mengakibatkan penurunan produksi beras sebesar 2,1 juta ton.

**Tabel 5: Pengaruh El Niño pada tahun 2015 terhadap inflasi secara keseluruhan diperkirakan akan moderat; lebih dirasakan oleh penduduk miskin**

Perkiraan perubahan untuk tahun 2015						
Skenario	Luas lahan panen	Produksi beras		Harga beras eceran dalam negeri	Inflasi IHK (Index Harga Konsumen)	Inflasi keranjang kemiskinan
	(hektar)	(juta ton)	(% perubahan yoy)	(% perubahan yoy)	(p.p.)	(p.p.)
Moderat	-200.000	-1,0	-1,5	5,1	0,3	1,1
Buruk	-400.000	-2,1	-2,9	10,2	0,6	2,2

Sumber: CEIC; Perhitungan staf Bank Dunia

Diperkirakan harga beras tahun 2015 akan naik antara 5 hingga 10 persen...

Dampak potensial dari El Niño terhadap harga beras dalam negeri dan tingkat inflasi dihitung menggunakan perkiraan Bank Dunia menggunakan regresi dengan variabel-variabel instrumental perubahan harga beras terhadap produksi beras serta faktor-faktor penentu lainnya, termasuk konsumsi beras per kapita, volume impor beras, harga beras internasional, serta panjang dan kualitas jalan raya,

<sup>25</sup> Laporan Nusantara Mei 2014, Bank Indonesia

menggunakan data panel mencakup tahun 2005 hingga 2013 dan 29 provinsi di Indonesia. Karena produksi beras juga bergantung pada harga beras (dengan kata lain, hubungan kausalitas dapat terjadi dari produksi ke harga dan sebaliknya), maka produksi beras dilengkapi dengan instrument variable berupa dummy untuk El Niño. Hasil-hasil regresinya menunjukkan bahwa, dalam skenario moderat, harga beras eceran dalam negeri akan meningkat sebesar 5,1 persen, bila variabel lainnya konstan, sedangkan pada skenario yang berat, kenaikan harga akan meningkat menjadi 10,2 persen.

**... dengan dampak yang moderat terhadap inflasi IHK namun berdampak signifikan terhadap inflasi yang dirasakan oleh penduduk miskin**

Serangkaian perkiraan lain oleh Bank Dunia, berdasarkan regresi inflasi IHK pada perubahan harga beras dalam negeri dan sejumlah variabel lain<sup>26</sup>, menunjukkan bahwa kenaikan harga beras yang disebutkan di atas dapat menyebabkan kenaikan moderat pada inflasi tahunan antara 0,3 sampai 0,6 persen. Namun, perkiraan serupa untuk indeks harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk miskin menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan, yaitu sebesar 1,1 hingga 2,2 poin persentase. Dampak yang lebih tinggi terhadap penduduk miskin adalah karena porsi pendapatan penduduk miskin yang dibelanjakan untuk membeli beras lebih besar dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang lebih berada.

**El Niño mungkin memiliki dampak lain terhadap inflasi dan pertumbuhan PDB...**

Perhitungan di atas merupakan batas bawah perkiraan dampak dari El Niño terhadap inflasi, karena ada kemungkinan harga komoditas pertanian selain beras juga turut naik. Selain itu, suhu yang lebih tinggi dan kekeringan dapat mengakibatkan peningkatan permintaan atas komoditas energi karena keluaran listrik yang dihasilkan, baik dari PLTPB maupun PLTA, akan lebih rendah. Menurut studi IMF<sup>27</sup>, inflasi di Indonesia akan meningkat sebesar 0,9 persen dalam dua kuartal tersebut, menyusul terjadinya peristiwa El Niño. Selain itu, peralatan pertambangan di Indonesia sangat bergantung pada tenaga air (PLTA); karenanya, hasil pertambangan pun dapat terpengaruh. Mengingat porsi yang signifikan dari pertanian dan pertambangan dalam PDB Indonesia (25 persen selama tahun 2004-2013), penulis memperkirakan bahwa pertumbuhan PDB dapat turun sebesar 0,9 persen dalam dua kuartal.

**... dan kemungkinan akan secara signifikan mengurangi pendapatan rumah tangga yang bersandar pada sektor pertanian, yang membentuk proporsi yang cukup signifikan dalam keseluruhan penduduk**

Selain menurunkan daya beli, khususnya di kalangan penduduk miskin, dengan peningkatan harga-harga, El Niño kemungkinan akan secara langsung mengurangi pendapatan rumah tangga yang bersandar pada sektor pertanian, dan dengan demikian memperparah dampak negatifnya terhadap perekonomian. Menurut Laporan Hasil Sensus Pertanian BPS tahun 2013, terdapat 26,1 juta rumah tangga pertanian, dengan 14,1 juta di antaranya merupakan petani padi. Sebagian besar petani padi di Indonesia berada di Jawa Timur, daerah penghasil beras terbesar di negara ini serta salah satu provinsi yang kemungkinan akan terkena dampak El Niño terparah pada tahun 2015. Sektor pertanian merupakan sumber pendapatan utama bagi 9,7 juta rumah tangga. Selain itu, menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2013, rumah tangga pertanian menyumbang 53,9 persen dari rumah tangga miskin, dengan tingkat insiden kemiskinan sebesar 19,2 persen terjadi dalam sektor pertanian.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Variabel-variabel tersebut adalah kesenjangan keluaran (*output gap*), suku bunga selama tiga bulan, nilai tukar uang, harga BBM, indeks harga komoditas energi dan non-energi internasional, serta pertumbuhan kredit perbankan.

<sup>27</sup> Lihat catatan kaki 25.

<sup>28</sup> Sebuah studi oleh Kementerian Pertanian menemukan bahwa pendapatan rumah tangga petani padi dapat menurun sekitar 52 persen, petani jagung sebesar 33 persen, dan petani kedelai sebesar 24 persen, hanya karena terdapat penurunan produksi beras, jagung dan kedelai yang terkait El Niño, kualitas panen yang lebih rendah dan biaya produksi yang lebih tinggi sebagai akibat dari kekeringan. Sumaryanto, S., 2015, dampak sosial ekonomi dari kekeringan akibat El Niño terhadap petani tanaman pangan dan solusinya, Kementerian Pertanian - naskah yang tidak dipublikasikan.

**Oleh karena itu, tanggapan kebijakan secara dini sangatlah penting untuk mengurangi dampak, terutama terhadap penduduk miskin**

Analisa di atas menunjukkan bahwa tanggapan kebijakan secara dini (misalnya dengan mengimpor beras dan komoditas pangan lainnya) sangat diperlukan, terutama jika El Niño menguat. Hal ini juga menggarisbawahi pentingnya jaring pengaman sosial bagi rumah tangga yang bergantung pada pendapatan dari sektor pertanian. Pertama, harga beras dapat meningkat tajam jika terdapat penurunan produksi yang cukup signifikan.. Kedua, penurunan pendapatan dalam sektor pertanian serta peningkatan harga dapat berdampak sangat buruk terhadap rumah tangga miskin. Selain itu, kondisi El Niño yang moderat hingga berat juga telah teramati, dan diperkirakan akan terus berlangsung selama beberapa kuartal mendatang di berbagai bagian lain di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik. Hal ini kemungkinan akan meningkatkan harga-harga komoditas di negara-negara yang terpengaruh oleh kekeringan, sehingga meningkatkan biaya impor Indonesia (apalagi jika Rupiah mengalami depresiasi lebih, lihat Bagian A.5).

## 2. Pelaksanaan sistem asuransi kesehatan nasional Indonesia

**Indonesia membentuk suatu program asuransi kesehatan nasional untuk menyediakan akses universal terhadap kesehatan berkualitas tinggi...**

Pada tanggal 1 Januari 2014, pemerintah meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, dengan tujuan untuk membentuk suatu sistem asuransi kesehatan nasional yang dirancang dengan baik, berkelanjutan secara fiskal, berkualitas tinggi, yang mencakup seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2019.<sup>29</sup> JKN menjanjikan akses universal untuk kesehatan, memastikan portabilitas (kemudahan dalam mengakses sistem) cakupan, terlepas di mana lokasi tempat kerja seseorang berada. Program ini juga menyediakan perlindungan terhadap guncangan keuangan bagi rumah tangga, seperti jatuh sakitnya pencari nafkah utama.

**...dan mendukung transformasi sosial dan ekonomi...**

JKN memainkan peranan penting dalam mengurangi kemiskinan dan kerentanan, memberikan kontribusi untuk pertumbuhan pendapatan di antara 40 persen bagian terbawah dari jumlah penduduk, dan tersedianya sisa pendapatan (*freeing up*) sebagai modal mikro untuk investasi. Selanjutnya, JKN mendukung kebijakan makroekonomi jangka menengah dan panjang pemerintah, karena tenaga kerja yang sehat secara signifikan meningkatkan modal manusia dan produktivitas ekonomi. Akhirnya, pelaksanaan JKN berkontribusi untuk pemenuhan komitmen UUD 1945 terhadap persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

**Banyak hal yang dapat dilakukan untuk membantu mencapai tujuan utama JKN yaitu cakupan universal dan tujuan makro serta pembangunan yang lebih luas**

Hampir dua tahun setelah pemberlakuan JKN, lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah peserta dari program JKN, yang merupakan tonggak utama. Namun, untuk memenuhi tujuan ekonomi makro dan tujuan pembangunan yang lebih luas, sasaran jangka menengah dari cakupan universal harus tercapai. Hal ini mensyaratkan perluasan keanggotaan JKN ke sektor swasta dan informal, meningkatkan pemungutan iuran, meningkatkan keberlanjutan keuangan dan fiskal JKN, dan lebih meningkatkan struktur tata kelola secara keseluruhan.

a. **Di mana kita sekarang dengan pelaksanaan program asuransi kesehatan nasional?**

**Cakupan kesehatan didominasi oleh mereka yang diasuransikan melalui anggaran pemerintah pusat atau daerah...**

JKN di Indonesia dikelola oleh BPJS Kesehatan,<sup>30</sup> suatu badan hukum publik nirlaba. Per tanggal 31 Desember, 2014, BPJS Kesehatan memiliki 133.400.000 peserta, membuatnya menjadi administrator kesehatan tunggal terbesar di dunia (Tabel 6). Namun, 82 persen dari seluruh peserta iurannya dibayarkan oleh anggaran pemerintah pusat atau daerah. Para pekerja penerima upah di sektor swasta dan pekerja bukan penerima upah masing-masing hanya menyumbang 7,6 dan 6,8 persen dari jumlah kepesertaan BPJS Kesehatan, menyisakan banyak ruang untuk meningkatkan partisipasi dari kategori pekerja ini.<sup>31</sup>

**... dan sebagian besar iuran berasal**

Akibatnya, sebagian besar iuran didanai dari anggaran pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah (Tabel 7). Premi yang disubsidi oleh pemerintah untuk orang-orang miskin dan kurang mampu, menyumbang 48,9 persen dari total iuran yang

<sup>29</sup> JKN merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional, SJSN. Dasar hukum untuk pelaksanaan JKN adalah Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN dan UU Nomor 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

<sup>30</sup> BPJS Kesehatan, didirikan pada tanggal 1 Januari 2014 melalui transformasi dari PT Askes (Persero), pengelola terdahulu yang merupakan BUMN bersifat pro-laba menjadi suatu badan hukum publik nirlaba.

<sup>31</sup> Pekerja bukan penerima upah mewakili lebih dari 60 persen dari jumlah pekerja di Indonesia (Survei Angkatan Kerja Nasional, SAKERNAS, Februari 2015), meskipun beberapa di antaranya miskin dan iurannya dibayarkan oleh pemerintah.

dari premi  
bersubsidi

terkumpul. Pangsa iuran dari pekerja sektor swasta dan pekerja bukan penerima upah masing-masing hanya 8,7 dan 4,6 persen.

**Tabel 6: Per Desember 2014, sebagian besar peserta JKN diasuransikan oleh pemerintah**

Segmen	Jumlah Peserta (juta)	Andil (persen)
Penerima bantuan iuran (PBI) -. anggaran belanja pem. Pusat	86.4	64.8
Penerima bantuan iuran (PBI) -. anggaran belanja pem. Daerah	8.8	6.6
Pekerja penerima upah – pemerintah	14.2	10.6
Pekerja penerima upah - sektor swasta	10.1	7.6
Pekerja bukan penerima upah	9.1	6.8
Bukan pekerja	4.9	3.6
<b>Total</b>	<b>133.4</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Keuangan BPJS Kesehatan yang sudah di-Audit, per tanggal 31 Desember 2014; Nota Keuangan dan Rancangan APBN Indonesia tahun 2016; Perhitungan staf Bank Dunia

**Tabel 7: Pemerintah juga membayar sebagian besar iuran JKN**

Kategori	Jumlah iuran (Rp triliun)	Andil (persen)
Penerima bantuan iuran (PBI) – diasuransikan oleh pemerintah.	19.9	48.9
Eks peserta PT Askes *	13.0	32.0
Eks TNI/POLRI	1.0	2.4
Badan Usaha	3.5	8.7
Pekerja bukan penerima upah	1.9	4.6
Jamkesda** dan PJKMU Askes (transisi)***	1.4	3.3
<b>Total</b>	<b>40.7</b>	<b>100.0</b>

Catatan: \* Lihat catatan kaki 30; \*\* Program Jaminan Kesehatan Daerah); \*\*\* Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Umum yang dikelola oleh PT Askes (Persero) sebelum beralih menjadi BPJS Kesehatan.

Sumber: Laporan Keuangan BPJS Kesehatan yang sudah di-Audit per tanggal 31 Desember 2014; Nota Keuangan dan Rancangan APBN Indonesia tahun 2016; Perhitungan staf Bank Dunia

Untuk pekerja bukan penerima upah, biaya kesehatannya melebihi iuran peserta dengan faktor enam...

Selanjutnya, rasio klaim (yaitu, rasio biaya pelayanan kesehatan terhadap iuran peserta) secara tunai dari pekerja bukan penerima upah sangat tinggi, sebesar 617,4 persen per tanggal 31 Desember 2014 (Tabel 8). Sebaliknya, rasio klaim untuk kategori lain dari tertanggung adalah sebesar 79,9 persen. Akibatnya, biaya total layanan kesehatan JKN melebihi iuran peserta sebesar Rp 1,9 triliun.

**Tabel 8: Biaya perawatan kesehatan pekerja bukan penerima upah melebihi iuran JKN**

Uraian	Pekerja bukan penerima upah	Yang lainnya	Total
Jumlah peserta	9,052,859	124,370,794	133,423,653
Iuran peserta (miliar rupiah)	1,885.4	38,834.4	40,719.9
Biaya layanan perawatan kesehatan (miliar rupiah)	11,640.3	31,018.4	42,658.7
Rasio klaim (persen)	617.4	79.9	104.8

Sumber: Nota Keuangan dan Rancangan APBN Indonesia tahun 2016

... karena para pekerja ini seringkali membayar iuran

Rasio klaim yang tinggi untuk pekerja bukan penerima upah ini disebabkan karena rendahnya jumlah tertanggung; pekerja kategori ini sering bergabung dengan JKN ketika mereka jatuh sakit dan mungkin berhenti membayar iuran setelah menerima perawatan. Hal ini sebagian karena Peraturan Presiden Nomor 12/2013

**JKN ketika mereka  
jatuh sakit**

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111/2013, yang memungkinkan pekerja bukan penerima upah untuk tetap mendapat cakupan selama enam bulan tanpa membayar iuran. Diperlukan data yang lebih banyak lagi untuk memisahkan rasio klaim keseluruhan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong hasil yang baik atau yang tidak baik untuk berbagai sub-kelompok.

**Informasi yang ada  
tidak mencukupi  
untuk menganalisis  
kesehatan keuangan  
dari program JKN**

Premi yang tidak mencukupi mungkin telah berkontribusi terhadap posisi aktiva bersih negatif Rp 3,3 triliun dari Dana JKN (Tabel 9). Namun, data yang tersedia secara publik tidak mencukupi untuk menentukan apakah Dana JKN tersebut memiliki masalah arus kas (likuiditas), kepailitan dan/atau masalah premi yang tidak mencukupi, dan apakah premi yang tidak mencukupi ini terjadi hanya untuk kelompok tertentu saja, dan apakah ada subsidi silang antar kelompok yang tidak dikehendaki di dalam sistem kesehatan. Dalam hal ini, penyusunan laporan keuangan dengan dasar akrual, termasuk cadangan klaim yang ditetapkan dengan baik serta analisis piutang iuran dapat membantu para pemangku kepentingan untuk memantau kesehatan keuangan Dana JKN. Pengungkapan portofolio investasi aset juga penting karena aset harus diinvestasikan sesuai dengan karakteristik kewajiban JKN untuk mencegah ketidak-cocokan antara aset dan kewajiban.<sup>32</sup>

**Tabel 9: Dana JKN berakhir di tahun 2014 dengan posisi aktiva bersih (aset neto) negatif**  
(juta rupiah)

	31 Desember 2014	1 Januari 2014
<b>Aset</b>		
Kas dan Bank	494,118	367,595
Piutang iuran – bersih	1,603,755	417,288
Piutang hasil investasi	16,865	70,881
Piutang kepada BPJS Kesehatan	15,477	416
Piutang lain-lain – bersih	11,478	-
Uang muka	102,060	36
Investasi	2,077,256	5,228,666
<b>Jumlah Aset</b>	<b>4,321,009</b>	<b>6,084,882</b>
<b>Liabilitas &amp; Aset Neto</b>		
Liabilitas		
Utang jaminan kesehatan	1,543,385	15,386
Pendapatan diterima di muka	570,464	
Cadangan teknis	5,297,239	5,953,643
Liabilitas lainnya	219,066	115,853
Jumlah Liabilitas	7,630,154	6,084,882
Aset Neto	(3,309,145)	-
<b>Jumlah Liabilitas dan Aset Neto</b>	<b>4,321,009</b>	<b>6,084,882</b>

Sumber: Laporan Keuangan BPJS Kesehatan yang sudah di-Audit per tanggal 31 Desember 2014

**Laporan keuangan  
BPJS Kesehatan  
menunjukkan bahwa  
biaya operasional  
wajar...**

Menurut laporan kinerja keuangan BPJS Kesehatan, pada tanggal 31 Desember 2014 anggaran operasionalnya adalah sebesar Rp 2.477 miliar dan beban usahanya Rp 2.468 miliar, sehingga laba usaha bersih sebesar Rp 8,7 miliar (Tabel 10). Anggaran operasional BPJS Kesehatan diatur oleh pemerintah dan berasal dari Dana JKN. Karena BPJS Kesehatan adalah suatu badan hukum publik nirlaba, anggaran operasionalnya diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan hanya pendapatan operasional yang kecil. Meskipun rasio biaya operasionalnya terhadap total iuran yang diterima, sebesar 6,1 persen, adalah wajar sesuai dengan standar internasional,

<sup>32</sup> Akses masyarakat sepenuhnya terhadap laporan keuangan dan laporan program yang sudah diaudit juga dapat memastikan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

diperlukan data yang lebih rinci untuk menentukan apakah anggaran operasionalnya diatur pada tingkat yang tepat dan apakah biaya operasionalnya wajar.

... meskipun modal yang tinggi dapat menarik fokus sumber daya dari pemberian pelayanan ke manajemen investasi

Namun demikian, pendapatan komprehensif BPJS Kesehatan sebesar Rp 1,1 triliun pada tahun 2014 hampir seluruhnya terdiri dari pendapatan investasi pada modal sendiri (Rp 1,3 triliun) (Tabel 10). Hal ini menunjukkan bahwa BPJS Kesehatan memiliki modal yang jauh lebih tinggi daripada yang diperlukan untuk mengelola risiko bisnisnya. Akibatnya, mungkin BPJS Kesehatan lebih fokus pada pengelolaan pengembalian modal dari pada secara efektif mengelola dana JKN, karena yang pertama tadi menghasilkan sebagian besar pendapatannya.

**Tabel 10: BPJS Kesehatan – Laporan Kinerja Keuangan**

(juta rupiah)

Uraian	31 Desember 2014
Pendapatan operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan	2,476,992
Biaya operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan	(2,468,277)
<b>Penghasilan operasional</b>	<b>8,715</b>
<b>Pendapatan (beban) non-operasional</b>	
Pendapatan investasi	1,331,078
Pendapatan lain	103,300
Beban investasi	(151,112)
Beban lain	(225,256)
<b>Jumlah Pendapatan non-operasional</b>	<b>1,058,010</b>
<b>Penghasilan sebelum pajak</b>	<b>1,066,725</b>
Manfaat (beban) pajak penghasilan	4,346
<b>Pendapatan neto</b>	<b>1,071,071</b>
Pendapatan komprehensif lain	41,295
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif</b>	<b>1,112,366</b>

Sumber: Laporan Keuangan BPJS Kesehatan yang sudah di-Audit per tanggal 31 Desember 2014

#### b. Ke depan: Mengupayakan agar sistem bekerja lebih baik

Langkah selanjutnya yang penting meliputi memperluas kepesertaan, dan meningkatkan pemantauan risiko keuangan dan tata kelola sistem secara keseluruhan

Sebagaimana telah disorot di bagian sebelumnya, meningkatkan keberlanjutan jangka panjang dari sistem asuransi kesehatan nasional Indonesia adalah proses yang harus dilakukan secara terus menerus. Langkah selanjutnya yang penting meliputi: (i) mengatasi tingkat partisipasi yang rendah dan tingkat pemungutan iuran dari pekerja penerima upah di sektor swasta dan pekerja bukan penerima upah; (ii) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kesehatan keuangan JKN dan risiko fiskal yang terkait; dan (iii) meningkatkan tata kelola keseluruhan sistem yang pada gilirannya akan membantu memperluas kepesertaan dan meningkatkan keberlanjutan keuangan.

Memperluas cakupan JKN bagi seluruh masyarakat Indonesia adalah perlu, baik dari perspektif pengembangan

Cakupan universal adalah prinsip mendasar dari program asuransi kesehatan nasional. Jika peserta yang memiliki risiko kesehatan rendah keluar dari kepesertaan dan berasuransi secara mandiri, sistem nasional hanya akan diikuti oleh orang-orang dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi dan, akibatnya, tarif premi yang jauh lebih tinggi. Keberlanjutan keuangan JKN tergantung pada perluasan pemungutan iuran di kalangan masyarakat non-miskin, pekerja bukan penerima upah dari sektor formal dan informal. Ini juga membutuhkan pembayaran iuran

<b>maupun kesehatan keuangan</b>	secara terus menerus, yakni, kemampuan untuk terus mengumpulkan iuran dari peserta setiap bulan. Penerapan kebijakan "tidak ada pengelakan" dengan peraturan yang tepat dan penegakan peraturan bisa membantu meningkatkan keberlanjutan JKN. Selain itu, penerapan manajemen data dan TI terpadu antara kantor pusat BPJS Kesehatan dan kantor regional, serta penyedia layanan kesehatan, dapat meningkatkan pemantauan data peserta JKN.
<b>Keberlanjutan sistem juga memerlukan desain program serta pengelolaan risiko keuangan dan fiskal yang aktif ...</b>	Seiring dengan perluasan cakupan, pengelolaan program yang dinamis dan secara aktif menyesuaikan parameter desain dan pembiayaan mereka secara teratur dapat membantu meningkatkan keberlanjutan keuangan program. Berdasarkan peraturan saat ini, desain JKN akan dievaluasi ulang setiap dua tahun. <sup>33</sup> Langkah penting berikutnya adalah membangun kantor unit aktuaris atau manajemen risiko dalam lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengelola risiko fiskal. Selanjutnya, pengujian tekanan ( <i>stress testing</i> ) keuangan dan sistem peringatan dini adalah praktek standar dalam memantau pengeluaran secara berlebihan dan mengantisipasi meningkatnya potensi kerugian dengan efek sistemik yang berdampak pada posisi fiskal pemerintah.
<b>... serta struktur tata kelola secara keseluruhan yang efektif</b>	Koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah adalah kunci untuk membangun ekosistem yang diperlukan untuk mendukung keberlanjutan SJSN dalam jangka pendek dan jangka panjang. Hal ini memerlukan adanya keterpaduan antara kebijakan, prosedur, dan proses yang akan melayani empat tujuan: i) memperbaiki struktur tata kelola secara keseluruhan untuk melindungi sistem terhadap perubahan yang akan merugikan tujuan program dan/atau keberlanjutan fiskal dari program, atau akan menurunkan transparansi sistem; ii) menjaga sistem terhadap kesalahan, penyelewengan dan korupsi; iii) menempatkan suatu sistem pemantauan dan evaluasi yang efektif yang secara hati-hati akan melacak kemajuan pelaksanaan terhadap tolok ukur yang sudah ditetapkan dan indikator kinerja yang digariskan dalam peta jalan ( <i>roadmap</i> ) kesehatan; <sup>34</sup> dan iv) meningkatkan komunikasi secara keseluruhan bagi semua pemangku kepentingan utama dengan mengembangkan dan menerapkan rencana sosialisasi terpadu yang meningkatkan informasi keberadaan sistem dan meningkatkan pemahaman mengenai peranan dan pentingnya sistem jaminan sosial nasional.

<sup>33</sup> Pasal 161 Peraturan Presiden Nomor 12/2013 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 111/2013.

<sup>34</sup> Undang-Undang SJSN memberikan tanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SJSN kepada Dewan Jaminan Sosial Nasional, DJSN. Pemerintah mengeluarkan Peta Jalan (*Roadmap*) bagi Jaminan Sosial Bidang Kesehatan untuk memandu pelaksanaan kegiatan dan prioritas JKN.

## C. Indonesia 2016 dan selanjutnya: tinjauan pilihan



### 1. Meningkatkan capaian sektor perumahan Indonesia

**Indonesia mengalami kekurangan perumahan dalam skala besar dan peningkatan kebutuhan akan perumahan terjangkau, terutama di wilayah perkotaan**

Saat ini terdapat permintaan dalam jumlah besar atas perumahan dengan harga terjangkau di Indonesia. Terdapat kurang lebih 64,1 juta unit perumahan di Indonesia, sekitar 20 persen di antaranya berada dalam kondisi buruk. Walaupun perkiraan mengenai kekurangan pasokan di sektor perumahan bervariasi, namun semua perkiraan mengindikasikan adanya kebutuhan berjumlah besar yang masih belum terpenuhi. Berdasarkan Sensus Nasional 2013, BPS memperkirakan kebutuhan perumahan yang belum terpenuhi mencapai 17,2 juta unit. Tetapi angka perkiraan ini kemungkinan terlalu tinggi, karena hanya didasarkan pada informasi kepemilikan rumah dan tidak menyertakan para penyewa hunian yang, karena gaya hidupnya, memilih untuk tidak memiliki rumah. Bagaimanapun, diperkirakan terdapat kebutuhan 820.000 sampai 920.000 unit rumah baru setiap tahunnya di wilayah perkotaan untuk menanggapi kebutuhan tahunan akibat pertumbuhan penduduk dan terbentuknya rumah tangga baru. Sektor swasta hanya memproduksi sekitar 400.000 unit per tahun. 150.000 sampai 200.000 lainnya dipenuhi melalui program-program sektor publik, termasuk perbaikan rumah secara bertahap, rumah sewaan, dan program perumahan sosial. Masih terdapat kesenjangan sekitar 200.000 sampai 370.000 rumah tangga per tahun yang harus menempuh solusi informal atau berjejal di unit-unit yang telah tersedia.<sup>35</sup>

#### a. Ketersediaan perumahan terjangkau dibatasi oleh tingginya biaya, rendahnya pendapatan, dan hambatan struktural

**Biaya perumahan yang tinggi, pendapatan yang rendah dan informal,**

Keterjangkauan merupakan hambatan utama dalam meningkatkan capaian sektor perumahan secara signifikan. Pada sisi pasokan, mahalnya pembebasan lahan dan prosedur perizinan, biaya konstruksi yang tinggi (diperparah oleh peraturan yang membebani), dan terbatasnya pendanaan perbankan jangka panjang telah

<sup>35</sup> Statistik perumahan berdasarkan SUSENAS terkini dan data administratif Kementerian PUPR.

dan akses ke pendanaan perumahan yang terbatas menghambat keterjangkauan perumahan

menjadikan pengembangan rumah terjangkau sebagai suatu kegiatan yang berisiko dan tidak menarik. Pada sisi permintaan, terbatasnya inklusivitas keuangan, rendahnya penghasilan, dan terbatasnya tabungan rumah tangga membatasi akses ke sektor perumahan formal. Akibatnya, hanya 20 persen rumah tangga terkaya yang mendapatkan perumahan melalui pasar komersial formal. 40 persen rumah tangga menengah tidak mampu menjangkau perumahan formal tanpa bantuan subsidi. 40 persen rumah tangga terbawah di Indonesia bisa dikatakan tidak dapat menabung dan tidak mampu bahkan untuk membeli unit sangat sederhana senilai Rp 15-30 juta tanpa subsidi besar-besaran (Tabel 11).<sup>36</sup>

Tabel 11: Perkiraan keterjangkauan perumahan di Indonesia menurut kondisi pasar

(Rp juta)

	Desil Rumah tangga	Penghasilan bulanan	Kemampuan membayar bulanan*	Perkiraan harga rumah terjangkau dengan pinjaman penuh	Perkiraan harga rumah terjangkau dengan uang muka
 Mampu menjangkau unit komersial	10	13,9	56	463	661
	9	7	2,6	216	309
	8	5,2	1,8	99	110
	7	4,2	1,4	74	82
	6	3,6	1,1	44	49
 Bahkan tidak mampu menjangkau unit sangat sederhana	5	3,1	0,9	38	43
	4	2,6	0,7	18	19
	3	2,1	0,5	13	14
	2	1,8	0,4	6,7	6,7
	1	1,2	0,1	2,3	2,3

Catatan: Perhitungan menggunakan asumsi kasar dengan bauran produk pendanaan perumahan bertingkat: dari pinjaman komersial 15 tahun dengan tingkat suku bunga 12 persen per tahun yang tersedia untuk desil-desil teratas hingga produk-produk keuangan mikro untuk pinjaman perumahan selama dua tahun dengan tingkat suku bunga 25 persen per tahun untuk desil terbawah. Kemampuan menabung juga diasumsikan bertingkat, mulai dari 30 persen pada desil teratas sampai 0 persen pada desil terbawah. \* Rata-rata cicilan bulanan.

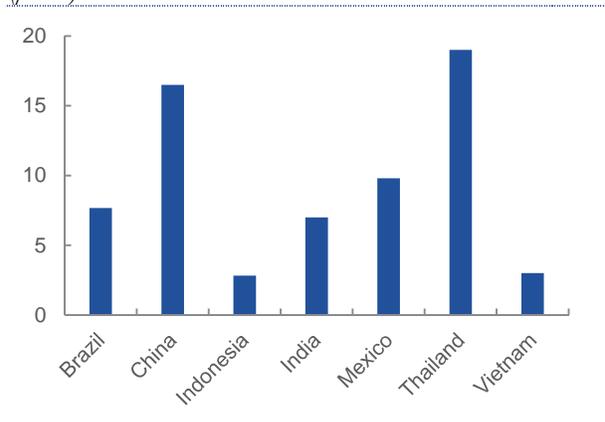
Sumber: Indonesia. Peta Jalan Menuju Reformasi Sektor Perumahan (2015)

Pasar pinjaman beragunan/hipotek masih kecil...

Mengingat kondisi kekayaan dan PDB Indonesia, penetrasi pinjaman dengan agunan masih terbatas. Besar pinjaman dengan agunan hanya 2,8 persen dari PDB pada tahun 2012, dibandingkan dengan angka 7,0 persen di India dan 19,0 persen di Thailand (Gambar 26). Pinjaman dengan agunan terhambat oleh berbagai faktor yang rumit. Pertama, sebagian besar orang Indonesia belum memiliki kemampuan untuk

Gambar 26: Volume pendanaan pinjaman beragunan untuk perumahan sebagai persentase PDB, 2012

(persen)



Sumber: hofinet.org; perhitungan staf Bank Dunia

<sup>36</sup> Walaupun definisi “sangat sederhana” di Indonesia bervariasi dari daerah ke daerah, dalam hal ini kami menggunakannya untuk merujuk pada tempat tinggal minimal yang masih bisa diterima secara sosial. Secara umum, hal ini mencakup suatu kepastian kepemilikan, akses ke air dan sanitasi, konstruksi yang memadai (misalnya: bahan-bahan yang kokoh, serta konstruksi atap, dinding dan lantai yang baik), dan ruang yang mencukupi sehingga tidak perlu berjejalan (berdasarkan peraturan, lebih dari 9 m<sup>2</sup> per penghuni). Konstruksi yang dibangun sendiri bisa mencapai standar tersebut; saat ini, tidak ada unit yang diproduksi secara formal yang tersedia dengan tingkat harga ini.

mengajukan agunan tanpa bantuan subsidi, sementara program-program subsidi pemerintah terkait agunan belum berjalan baik akibat kurangnya pendanaan dan rancangan yang buruk. Kedua, lebih dari 60 persen orang Indonesia belum menjadi bagian dari angkatan kerja formal dan, karenanya, tidak memiliki akses memadai ke sistem keuangan. Bisa jadi kebanyakan rumah tangga ini mampu mengajukan agunan, tetapi mereka tidak memiliki riwayat kredit dan dianggap tidak layak kredit oleh sektor perbankan komersial. Tidak seperti di negara-negara lain seperti India atau Meksiko, sektor keuangan Indonesia masih belum mengembangkan solusi-solusi penjaminan dan pengelolaan risiko kredit inovatif terkait produk perumahan yang menjangkau kelompok berpenghasilan rendah atau yang tidak menerima upah tetap. Ketiga, sektor perbankan kurang memiliki akses ke pendanaan terjangkau dan berjangka panjang dari pasar modal. Tanpa adanya evolusi pasar sekunder ini, bank-bank di Indonesia akan tetap memiliki kemampuan terbatas dalam mendanai pinjaman dengan agunan jangka panjang menggunakan simpanan jangka pendek.

**...dan hambatan-hambatan dari sisi pasokan membatasi ketersediaan perumahan formal murah**

Hambatan-hambatan dari sisi pasokan membatasi sektor swasta untuk berpartisipasi dalam pengembangan perumahan murah. Hambatan ketersediaan lahan, termasuk proses-proses pembebasan lahan, perizinan, dan layanan lain yang rumit, telah membatasi pengembangan perumahan formal. Hal ini mengakibatkan angka produksi tahunan tetap rendah, terutama untuk unit-unit terjangkau dengan margin tipis. Para pengembang hanya memiliki sedikit insentif untuk membangun perumahan bagi pasar berbiaya rendah. Alih-alih, mereka lebih memilih untuk memaksimalkan laba saat terjadi permintaan tinggi dari rumah tangga berpendapatan tinggi atau investor.

**Kurangnya perumahan terjangkau berdampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang negatif, termasuk berkembangnya daerah kumuh**

Pasokan rumah baru dengan harga terjangkau seringkali berada di lokasi yang kurang ideal, sehingga mendorong kaum miskin perkotaan ke pinggiran kota. Keuangan yang tidak memadai dan harga lahan di tengah kota yang tinggi membuat rumah tangga berpenghasilan rendah kerap terpaksa membeli rumah di pinggiran kota. Akibatnya, rumah tangga-rumah tangga ini akhirnya harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk biaya transportasi, yang lantas menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terkait kemacetan dan pola pengembangan ruang kota yang tidak ekonomis ataupun berkelanjutan. Kegagalan dalam penyediaan perumahan terjangkau telah berkontribusi pada berkembangnya daerah kumuh. Diperkirakan 12,2 persen penduduk perkotaan saat ini tinggal di daerah kumuh, yang luasnya mencapai 38.430 hektar. Apabila tidak ada langkah yang diambil, kawasan yang digunakan untuk hunian kumuh di perkotaan akan terus meningkat, seiring dengan bertambahnya rumah tangga. Banyak dari kawasan kumuh dan daerah hunian liar tidak diakui secara hukum dan, karenanya, tidak mendapatkan layanan mendasar, sehingga menjadi kawasan terpinggir, miskin, dan dengan kondisi hidup tidak layak.

**Pemerintah telah mengembangkan program-program dan lembaga-lembaga untuk mendukung penyediaan perumahan ...**

Indonesia telah mengembangkan serangkaian kebijakan dan lembaga untuk mendukung penyediaan perumahan. Namun, semua ini masih belum efektif dalam memperbaiki capaian perumahan dalam skala yang diperlukan. Langkah-langkah pemerintah ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada: (i) serangkaian program pengembangan masyarakat lingkungan setempat (beberapa di antaranya, seperti Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM)) - Perkotaan, didukung oleh Bank Dunia; (ii) program penyewaan perumahan dengan subsidi tinggi atau penuh; (iii) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) – subsidi di muka untuk perbaikan rumah secara bertahap; dan (iv) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), yang bertujuan meningkatkan keterjangkauan kredit perumahan untuk rumah tangga berpenghasilan menengah dengan mensubsidi suku bunga

untuk agunan dengan suku bunga tetap (lihat Kotak 4). Selain itu, beberapa BUMN, termasuk PT Perumnas, Sarana Multigriya Finansial (SMF), Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), diberi mandat untuk berperan aktif dalam peningkatan pasokan dan akses ke perumahan terjangkau melalui pengembangan perumahan secara langsung, pengembangan pasar kredit beragunan sekunder, dan perluasan asuransi kredit beragunan. Kemudian, beberapa pemerintah daerah sudah memulai program-program yang telah menunjukkan hasil di tingkat lokal, seperti skema kredit mikro untuk perumahan di Palembang dan program penyewaan perumahan yang dikelola oleh DKI Jakarta. Namun, inisiatif-inisiatif lokal ini seringkali tidak ditopang oleh pendanaan berkelanjutan dan dukungan yang memadai untuk dapat diperluas.

**...tetapi dampaknya masih terbatas, karena belanja pemerintah di sektor perumahan secara historis masih tetap terlalu rendah**

Terlepas dari inisiatif-inisiatif ini, belanja pemerintah di sektor perumahan secara historis masih tetap terlalu rendah untuk dapat menciptakan dampak yang signifikan. Sebagai contoh, pada tahun 2013, pemerintah hanya mengalokasikan 0,3 persen dari total APBN untuk belanja perumahan. Angka ini hanya 0,05 persen dari PDB, jauh lebih rendah dari anggaran sektor perumahan di negara-negara lain di dunia dan di kawasan, seperti misalnya Thailand (2,15 persen dari PDB) dan Filipina (0,3 persen dari PDB).

#### Kotak 4: Ringkasan program-program perumahan pemerintah

Pemerintah akhir-akhir ini telah memfokuskan kebijakan perumahan pada tiga inisiatif utama – FLPP, BSPS, dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa); serangkaian insentif untuk sektor swasta; dan dukungan bagi pemerintah daerah. FLPP yang diperkenalkan pada tahun 2001 memberikan pinjaman lunak bagi para penyedia pinjaman utama, yang menyediakan pinjaman dengan suku bunga tetap 7,25 persen per tahun untuk jangka waktu 20 tahun. Sejak tahun 2011, FLPP telah dinikmati oleh rata-rata 68.000 rumah tangga per tahunnya. FLPP 2.0 diluncurkan pada awal tahun 2015, dengan penyesuaian fitur-fitur produk utama guna lebih meningkatkan keterjangkauan serta memperluas partisipasi konsumen dan bank.

Sejak tahun 2006, pemerintah telah menyediakan sebuah subsidi (BSPS) untuk mendukung perbaikan rumah yang dibangun sendiri dengan menyasar kawasan perdesaan dan pinggiran perkotaan. Rumah tangga berpendapatan di bawah 1,5 juta rupiah per bulan dengan sertifikat kepemilikan yang sah berhak mendapatkan subsidi senilai 10 juta rupiah untuk perbaikan rumah atau 30 juta rupiah untuk pembangunan baru. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2013, 544.000 penerima manfaat telah dijangkau melalui program ini, dengan rata-rata total biaya per proyek sekitar 20 juta rupiah.

Program Rusunawa mendukung perumahan sewa multi-keluarga publik bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam program ini, pemerintah pusat mengalokasikan subsidi modal untuk pembangunan, sementara pemerintah daerah bertanggung jawab mengidentifikasi dan memenuhi lahan untuk proyek serta mengelola unit setelah pembangunan tuntas. Penyewa harus berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan pagu pendapatan ditetapkan secara nasional 2,5 juta rupiah per bulan. Biaya sewa ditetapkan sebesar 30 persen dari UMP. Pada tahun 2014, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengalokasikan 2,4 triliun rupiah untuk program Rusunawa ini.

Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk mengembangkan kapasitas dan dukungan perencanaan bagi pemerintah daerah serta menyediakan insentif bagi sektor swasta melalui program Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami), yang meliputi pengurangan pajak penjualan dari 5 menjadi 1 persen bagi pengembang yang menjual unit seharga kurang dari Rp 144 juta. Sementara, pembeli yang berpenghasilan kurang dari Rp 7 juta per bulan dibebaskan dari kewajiban pembayaran PPN (biasanya 10 persen).

#### b. Belanja pemerintah yang lebih baik dapat membantu menjawab kebutuhan perumahan terjangkau

**Saat ini terdapat momentum politik**

Baru-baru ini pemerintah telah menjadikan pengatasan kekurangan perumahan dan penyediaan perumahan terjangkau sebagai agenda prioritas kebijakan eksplisit dan

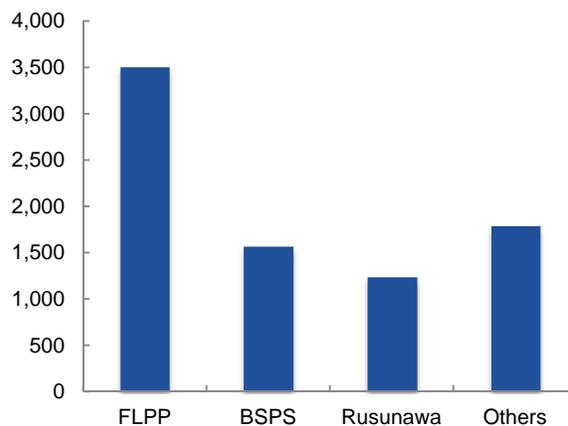
yang kuat untuk menangani kekurangan perumahan terjangkau ...

telah mengusulkan peningkatan belanja sektor perumahan secara signifikan. Rencana yang ada meliputi skema tabungan wajib perumahan (mirip dengan dana pensiun atau kebijakan jaminan sosial seperti BPJS), serta inisiatif ambisius yang disebut sebagai program Satu Juta Rumah. Program Satu Juta Rumah bertujuan untuk membangun rata-rata satu juta unit perumahan per tahun selama lima tahun ke depan. Walaupun ambisius, sasaran yang ditetapkan pemerintah cukup layak, mengingat kebutuhan akan perumahan terjangkau akibat terbentuknya rumah tangga baru setiap tahunnya serta kekurangan jumlah perumahan yang ada pada saat ini.

... tetapi peningkatan belanja perumahan lebih adil dan efektif

Peningkatan belanja pemerintah dalam sektor perumahan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi perumahan. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, kebijakan perumahan seyogianya diarahkan kembali ke rumah tangga berpendapatan rendah, karena selama ini belanja publik untuk sektor perumahan tidak selalu adil. Pertama, alokasi anggaran keseluruhan untuk perumahan selalu lebih berpihak pada program-program yang disasarkan ke kelas menengah atau

**Gambar 27: Rata-rata alokasi anggaran tahunan untuk program perumahan, 2011 - 2014**  
(milyar rupiah)



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

menengah atas. Antara tahun 2011-2014, 43,3 persen anggaran Kementerian Perumahan Rakyat dialokasikan ke program FLPP yang menasar peminjam dengan pendapatan sampai 4 juta rupiah per bulan (dan kemungkinan berpendapatan lebih tinggi, karena batas pendapatan merujuk ke gaji pokok dan tidak memperhitungkan tunjangan-tunjangan, dan batas ini berlaku untuk peminjam perorangan dan bukan keseluruhan rumah tangga) (Gambar 27). Sisa anggaran dibagi untuk berbagai program lain, termasuk BPS (Rp 6,3 triliun, 19,3 persen dari total anggaran), Rusunawa (Rp 4,9 triliun, 15,3 persen dari total anggaran), dan program perbaikan lingkungan dan sertifikasi, kesemuanya menasar rumah tangga berpendapatan rendah. Kedua, secara keseluruhan, nilai absolut subsidi rumah tangga pada program-program yang menasar rumah tangga berpendapatan relatif lebih tinggi jumlahnya jauh lebih tinggi. Rumah tangga berpendapatan lebih tinggi yang mengakses FLPP mendapatkan manfaat efektif dari subsidi pemerintah sebesar 126 juta rupiah, atau 43 persen dari total kredit maksimum, yaitu 300 juta rupiah, yang didukung program ini. Sebaliknya, subsidi perbaikan bertahap rumah BPS hanya sebesar 10-30 juta rupiah. Selain itu, dalam masing-masing program, subsidi tidak disesuaikan secara progresif dengan pendapatan, sehingga memungkinkan rumah tangga yang memenuhi kriteria dan mampu menjangkau perumahan dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan subsidi yang sama atau bahkan lebih besar.

Tidak ada satu pendekatan tunggal yang mampu menjawab

Tidak ada satu pendekatan tunggal manapun yang dapat menyediakan perumahan terjangkau dalam jumlah memadai di Indonesia. Kebutuhan dan permintaan perumahan berbeda antar daerah di Indonesia dan memerlukan tanggapan kebijakan yang berbeda pula. Sebagai contoh, sejumlah besar unit perumahan yang belum

**kebutuhan Indonesia untuk perumahan yang terjangkau ...**

layak bisa mengambil manfaat dari program perbaikan atau perluasan rumah bersubsidi. Diperkirakan 3,9 juta rumah tangga yang tinggal di daerah kumuh yang memerlukan perbaikan, pembangunan kembali di lokasi sama, atau relokasi. Sejumlah besar rumah tangga miskin dengan hambatan keterjangkauan ekstrem memerlukan perumahan bersubsidi tinggi. Kelas menengah Indonesia yang jumlahnya besar dan terus bertumbuh (termasuk banyak pekerja dengan upah tidak tetap) akan memerlukan kebijakan subsidi yang dirancang secara efisien dan progresif guna melengkapi tabungan dan pinjaman beragunan, agar mereka bisa membeli rumah secara formal.

**...tetapi terdapat beberapa langkah yang dapat diambil pemerintah dalam jangka pendek dan menengah untuk memperbaiki capaian kebijakan**

Terlepas dari kebutuhan yang rumit dan beragam, pemerintah dapat mengambil beberapa langkah dalam jangka pendek dan menengah untuk meningkatkan akses ke perumahan terjangkau serta menciptakan keadilan dan efisiensi yang lebih baik dalam sistem perumahan. Langkah-langkah ini, berdasarkan tingkat kerumitannya: (i) meningkatkan jumlah dan proporsi belanja pemerintah terhadap program pemerintah yang secara langsung dan efektif menysar penduduk 40 persen terbawah; (ii) meningkatkan akses ke kredit perumahan bagi rumah tangga berpendapatan rendah dan sektor informal; serta (iii) memobilisasi lahan perkotaan untuk perumahan terjangkau.

**Penguatan rancangan dan peningkatan subsidi perbaikan rumah yang ada merupakan langkah pertama yang baik...**

Dalam jangka pendek, ada baiknya pemerintah menggali potensi perluasan subsidi perbaikan rumah, BSPS, terutama untuk kawasan perkotaan yang memiliki kebutuhan perumahan paling mendesak. Mengingat 70 persen dari total rumah di Indonesia merupakan rumah yang dibangun sendiri, metode perbaikan rumah secara bertahap telah terbukti merupakan suatu solusi yang efektif. Analisa awal Bank Dunia menunjukkan bahwa subsidi ini mampu secara efektif menjangkau kelompok-kelompok sasaran, dan bahwa program ini memastikan penggunaan dana secara tepat dan meningkatkan keterjangkauan melalui pengurangan biaya kredit, teknik, dan tenaga kerja. Program BSPS terutama menysar kawasan perdesaan tetapi sedang diperluas ke kawasan pinggiran kota.

**...dan menggali solusi perumahan lain yang efektif dari segi biaya dan berkeadilan, seperti unit rumah inti yang dapat dikembangkan, untuk rumah tangga berpendapatan sangat rendah**

Selain itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sedang mengembangkan “rumah inti yang dapat dikembangkan” sebagai solusi dari sisi pasokan bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Unit-unit rumah ini memungkinkan pemerintah menjangkau penerima manfaat dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan dengan inisiatif perumahan lain dan untuk menyesuaikan produk dengan beragam konteks sosial budaya dan politik ekonomi. Rumah inti yang diusulkan ini sudah siap huni, sehingga bisa dengan cepat menyelesaikan persoalan perumahan rumah tangga miskin tanpa membebani mereka dengan investasi dalam bentuk tunai, non-tunai, ataupun tenaga sebelum menghuni. Hal ini terutama penting untuk perekonomian perkotaan yang berbasis uang tunai, dimana rumah tangga tidak dapat dengan mudah membangun sendiri (berbeda dengan kawasan perdesaan dengan musim-musim pertaniannya).

**Peningkatan akses ke kredit perumahan terutama untuk rumah tangga dengan upah tidak tetap merupakan**

Dalam jangka menengah, dorongan terhadap bank untuk menawarkan kredit perumahan bagi pekerja informal, yang membentuk 60 persen dari angkatan kerja,<sup>37</sup> akan membantu memperbaiki keterjangkauan perumahan. Strategi tiga jalur dapat digunakan untuk tujuan ini. Pertama, membangun kapasitas untuk melakukan penilaian risiko kredit yang terkait dengan pendapatan tidak tercatat. Kedua, mempromosikan produk tabungan perumahan yang memungkinkan verifikasi

<sup>37</sup> 70 persen apabila pekerja tidak tetap dari sektor informal disertakan, menurut International Labor Office (ILO) 2013 *Women and Men in the Informal Economy: a Statistical Picture*

**suatu opsi kebijakan jangka menengah yang baik**

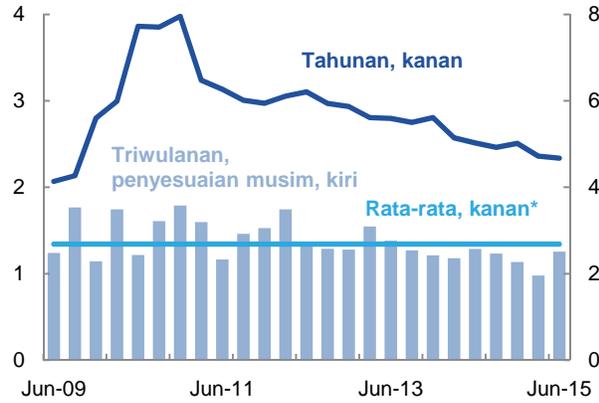
kemampuan menabung dari calon peminjam. Terakhir, melakukan penilaian kelayakan produk jaminan spesifik untuk kategori peminjam ini, seperti misalnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk usaha kecil dalam rangka mengambil pembelajaran praktik terbaik.

**Reformasi administrasi dan pembebasan lahan dapat membantu memperluas keterjangkauan perumahan**

Selain itu, pertumbuhan pesat kawasan perkotaan telah meningkatkan tekanan terhadap harga tanah di zona-zona perkotaan dan pinggiran kota. Pengembang dan investor swasta telah membeli tanah dalam jumlah besar untuk tujuan spekulatif, yang seiring dengan kegagalan pasokan sektor formal dalam mengimbangi permintaan, telah secara signifikan meningkatkan harga tanah di lokasi-lokasi bagus selama tiga tahun terakhir. Akibatnya, tanah tidak lagi terjangkau oleh penduduk miskin dan bahkan oleh banyak penduduk kelas menengah di seluruh Indonesia. Kurangnya lahan yang terjangkau dan sesuai, pada akhirnya, akan membatasi upaya peningkatan keterjangkauan perumahan. Walaupun persoalan ini rumit, terdapat beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah dalam jangka pendek dan menengah guna memobilisasi lahan untuk perumahan dan permukiman. Dalam jangka pendek, pemerintah pusat dapat membangun strategi terperinci guna mendukung pemerintah daerah dalam memberikan pengakuan dan/atau mengatur kepemilikan lahan di berbagai permukiman informal, termasuk kawasan-kawasan liar. Kedua, pemerintah dapat mempertimbangkan pembuatan kerangka kerja yang mengidentifikasi aset tanah milik pemerintah yang belum dimanfaatkan, atau kurang digunakan secara optimal, serta tanah wakaf untuk proyek-proyek perumahan baru bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dalam jangka menengah, mobilisasi aset tanah untuk perumahan secara memadai bergantung pada penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam meningkatkan sistem pengelolaan pertanahan (termasuk penetapan zona penggunaan lahan dan tata ruang, perizinan, penaksiran nilai dan perpajakan, kadaster, pendaftaran, dan penegakan peraturan) dan memberlakukan serangkaian metode untuk pengembangan lahan sektor swasta, seperti pemanfaatan lahan secara bersama, penyesuaian kembali lahan, dan konsolidasi.

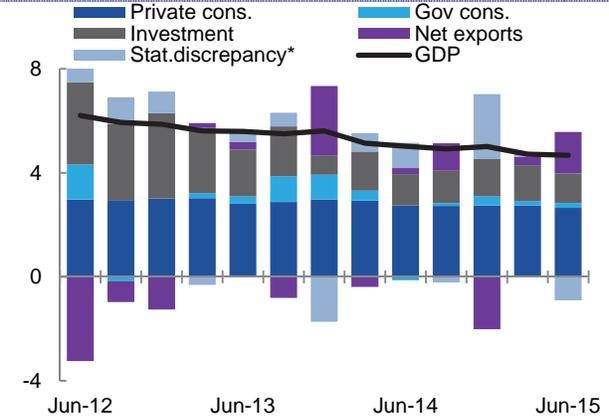
**LAMPIRAN: INDIKATOR GAMBARAN EKONOMI INDONESIA**

**Lampiran Gambar 1: Pertumbuhan PDB**  
(pertumbuhan PDB riil, persen)



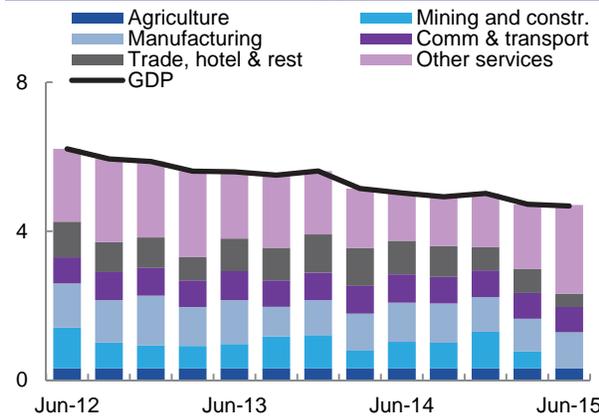
Catatan: \* Rata-rata pertumbuhan Tw-k-Tw Q2 2009 – Q22015  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 2: Kontribusi terhadap PDB pengeluaran**  
(kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen)



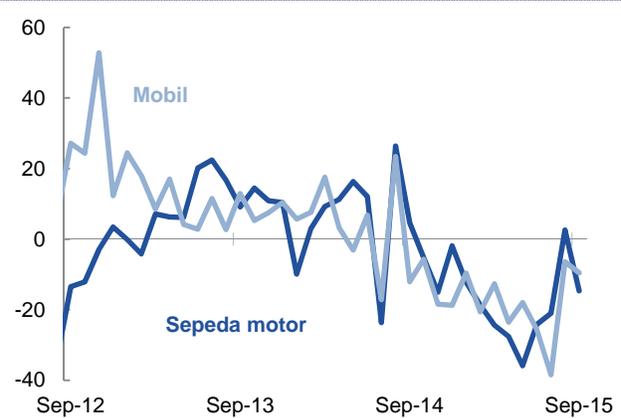
Catatan: \* termasuk perubahan inventori  
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 3: Kontribusi terhadap PDB produksi**  
(kontribusi pertumbuhan PDB riil yoy, persen)



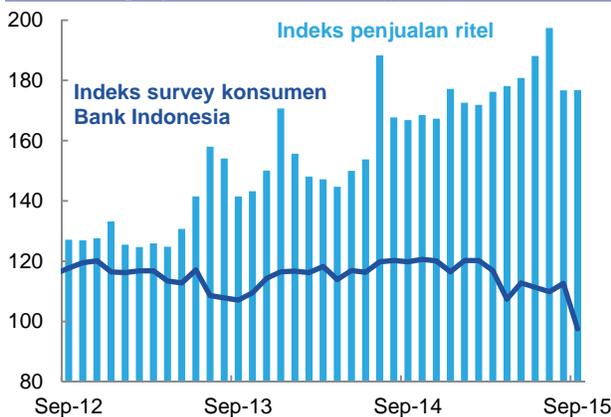
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 4: Penjualan mobil dan sepeda motor**  
(pertumbuhan penjualan dengan penyesuaian musim, percent)



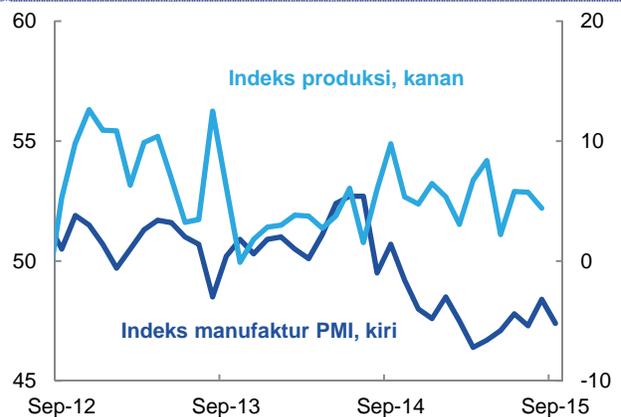
Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

**Lampiran Gambar 5: Indikator konsumen**  
(tahun dasar penjualan eceran 2010=100)



Sumber: BI

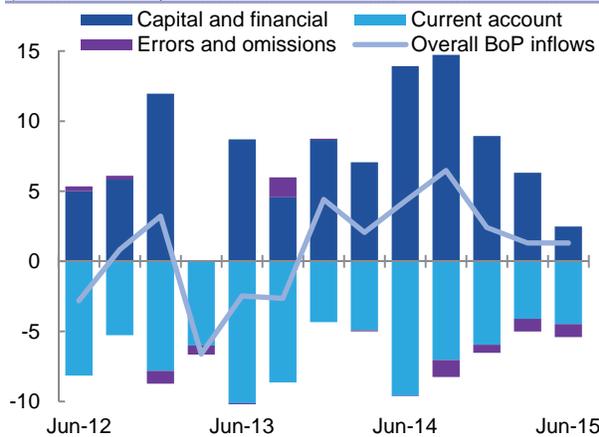
**Lampiran Gambar 6: Indikator produksi industri**  
(indeks PMI dan pertumbuhan yoy, persen)



Sumber: BPS; Nikkei Markit Purchasing Manager's Index

Lampiran Gambar 7: Neraca pembayaran

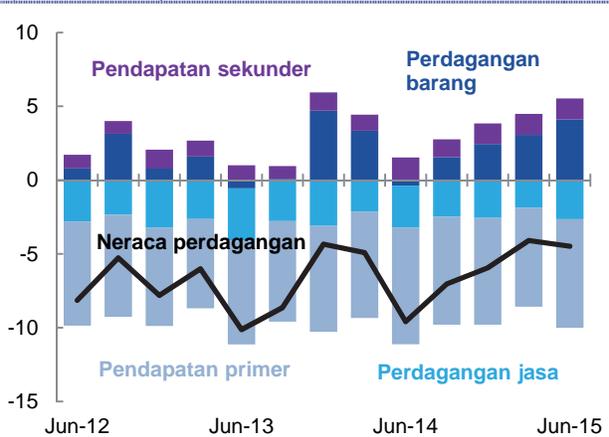
(miliar dolar AS)



Sumber: BI

Lampiran Gambar 8: Komponen neraca berjalan

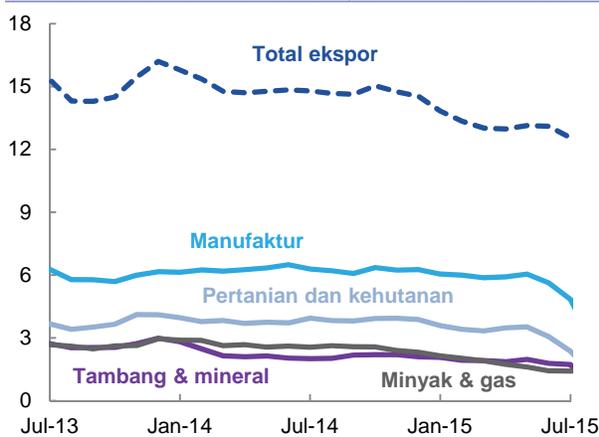
(miliar dolar AS)



Sumber: BI; Perhitungan staff Bank Dunia

Lampiran Gambar 9: Ekspor barang

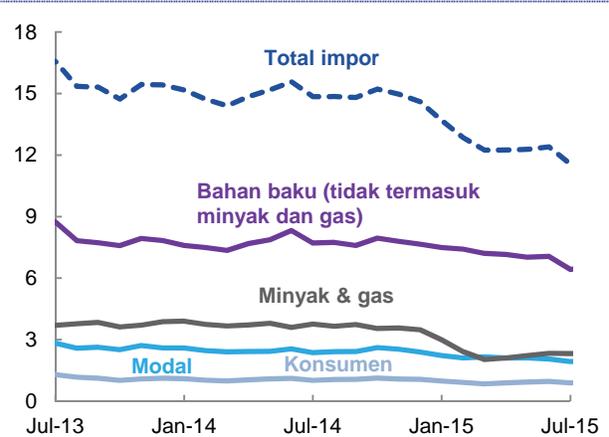
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



Sumber: BPS

Lampiran Gambar 10: Impor barang

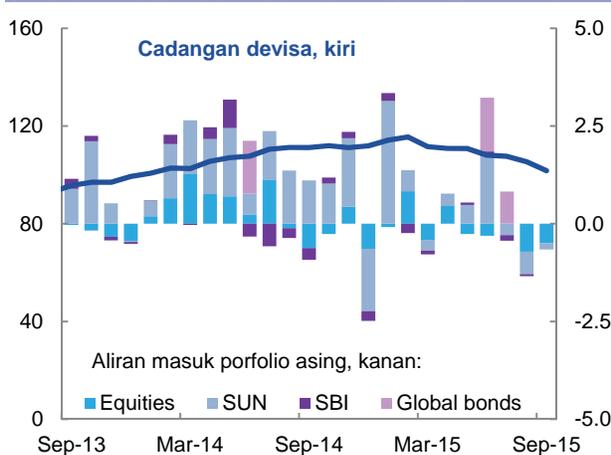
(rata-rata 3 bulanan, miliar dolar AS)



Sumber: BPS

Lampiran Gambar 11: Cadangan devisa dan arus modal

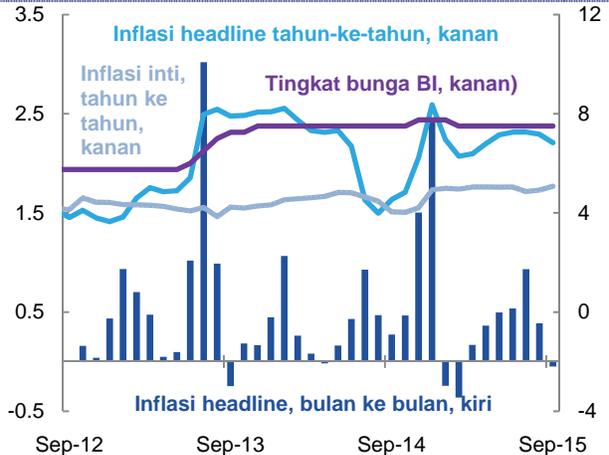
(miliar dolar AS)



Sumber: BI; MoF; Perhitungan staff Bank Dunia

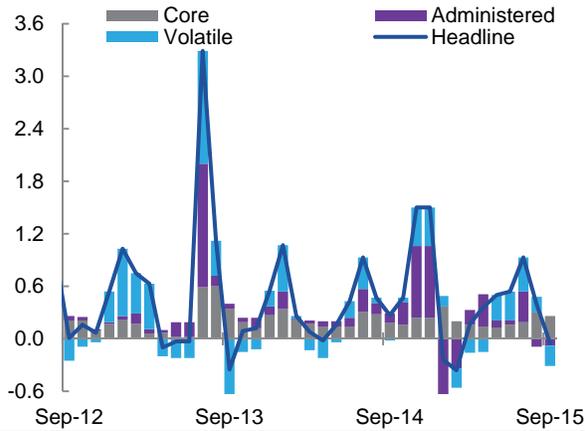
Lampiran Gambar 12: Inflasi dan kebijakan moneter

(pertumbuhan bulan-ke-bulan dan tahun-ke-tahun, persen)



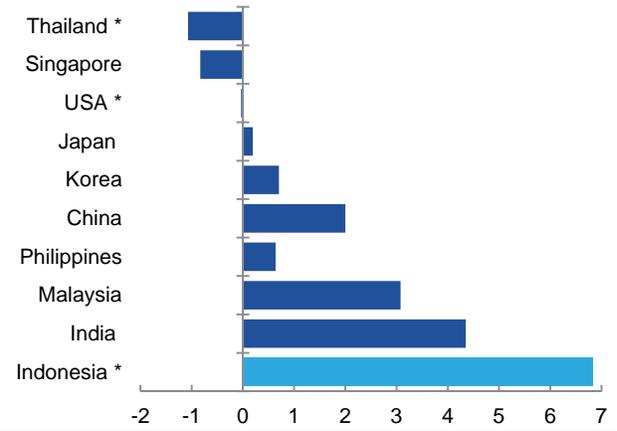
Sumber: BPS; Perhitungan staff Bank Dunia

Lampiran Gambar 13: Rincian bulanan IHK  
(persen kontribusi terhadap pertumbuhan bulanan)



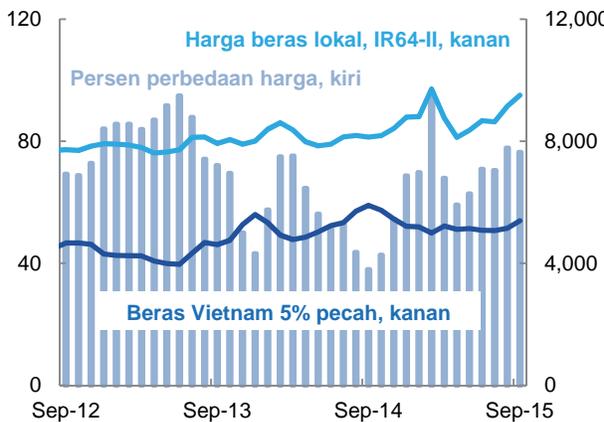
Sumber: BPS; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 14: Perbandingan inflasi beberapa negara  
(tahun-ke-tahun, September 2015)



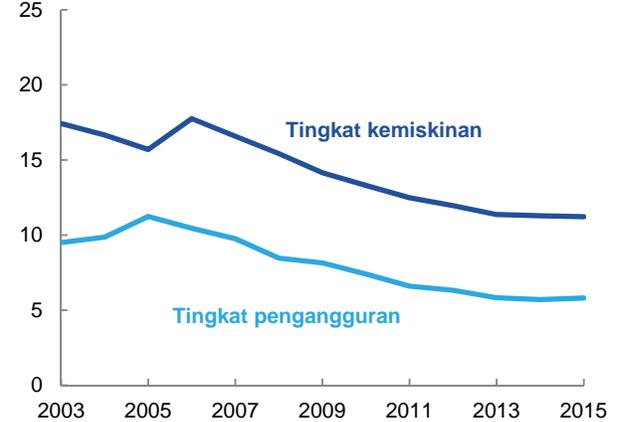
\*Data bulan September, lainnya data bulan Agustus  
Sumber: Biro statistik nasional via CEIC; BPS

Lampiran Gambar 15: Harga beras domestik dan internasional  
(perbedaan harga persen kiri, harga kulakan Rp per kg, kanan)



Sumber: Pasar Induk Beras Cipinang; FAO; Bank Dunia

Lampiran Gambar 16: Tingkat kemiskinan dan pengangguran  
(persen)



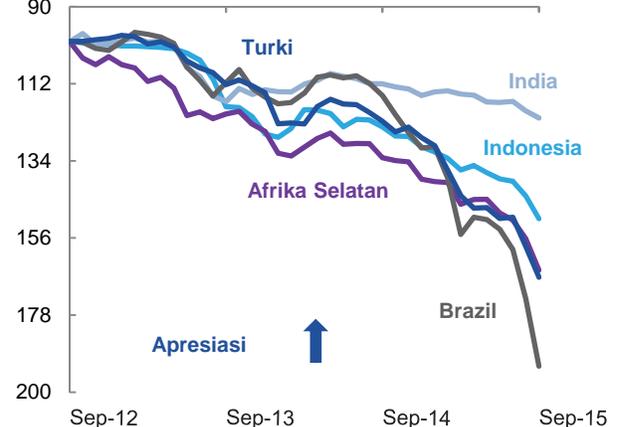
Sumber: BPS

Lampiran Gambar 17: Indeks saham regional  
(indeks harian, mata uang local, 1 Oktober 2012=100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

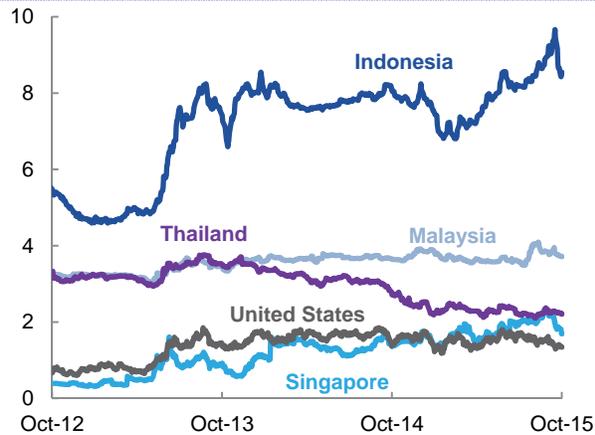
Lampiran Gambar 18: Nilai tukar dollar AS  
(indeks bulanan, September 2012=100)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 19: Imbal hasil obligasi pemerintah 5-tahunan dalam mata uang lokal

(persen)



Sumber: CEIC

Lampiran Gambar 20: Spread obligasi dolar AS pemerintah EMBI

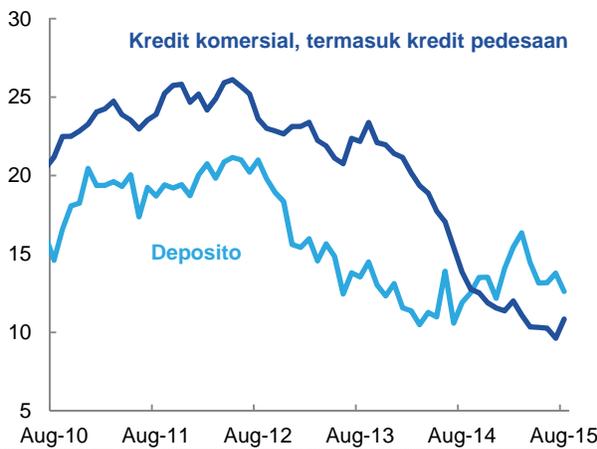
(basis poin)



Sumber: JP Morgan; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 21: Pertumbuhan kredit komersial, pedesaan dan deposito

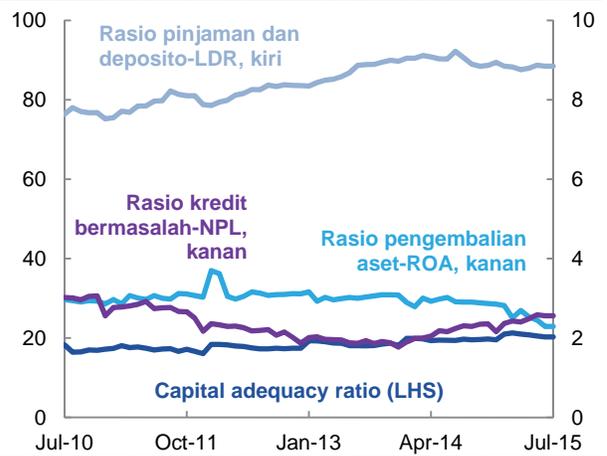
(tahun-ke-tahun, persen)



Sumber: CEIC; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 22: Indikator sektor perbankan

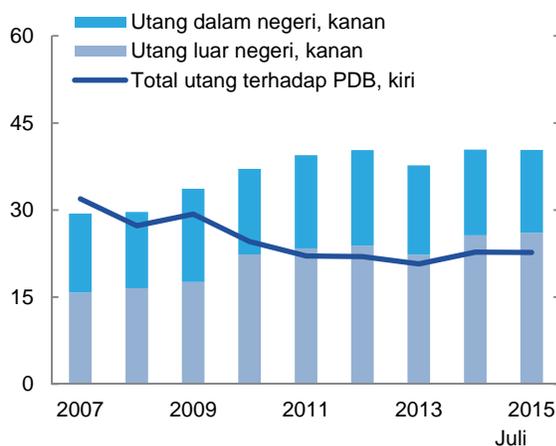
(persen)



Sumber: BI

Lampiran Gambar 23: Utang pemerintah

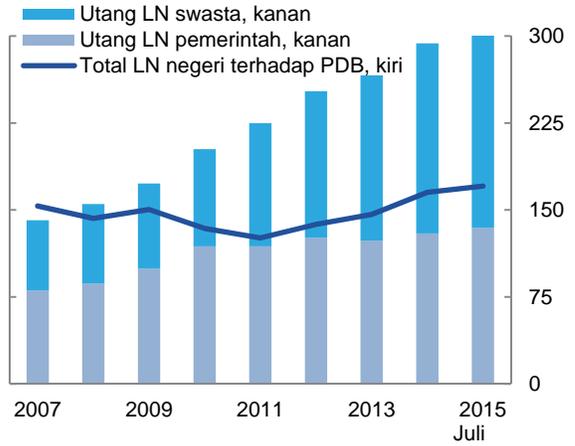
(persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: MoF; BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Gambar 24: Utang luar negeri

(persentase terhadap PDB; miliar dolar AS)



Sumber: BI; perhitungan staf Bank Dunia

Lampiran Tabel 1: Realisasi dan anggaran belanja Pemerintah  
(Triliun Rupiah)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2015
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi	APBN-P	Outlook Kemenkeu
<b>A. Penerimaan dan hibah</b>	<b>995</b>	<b>1,211</b>	<b>1,338</b>	<b>1,439</b>	<b>1,550</b>	<b>1,762</b>	<b>1,650</b>
1. Penerimaan pajak	723	874	981	1,077	1,147	1,489	1,367
2. Penerimaan non-pajak	269	331	352	355	399	269	279
<b>B. Pengeluaran</b>	<b>1,042</b>	<b>1,295</b>	<b>1,491</b>	<b>1,651</b>	<b>1,777</b>	<b>1,984</b>	<b>1,910</b>
1. Pemerintah pusat	697	884	1,011	1,137	1,204	1,320	1,246
2. Transfer ke pemerintah daerah	345	411	481	513	574	665	664
<b>C. Neraca utama</b>	<b>42</b>	<b>9</b>	<b>-53</b>	<b>-99</b>	<b>-93</b>	<b>-67</b>	<b>-103</b>
<b>D. Surplus/defisit</b>	<b>-47</b>	<b>-84</b>	<b>-153</b>	<b>-212</b>	<b>-227</b>	<b>-223</b>	<b>-260</b>
(persen dari PDB)	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.2	-1.9	-2.2

Catatan: Persentase Surplus/defisit terhadap PDB berdasarkan APBN-P dan PDB dengan metoda SNA 2008.

Sumber: Kementerian keuangan

Lampiran Tabel 2: Neraca pembayaran  
(Miliar dolar AS)

	2012	2013	2014	2013	2014				2015	
				Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
<b>Neraca Pembayaran</b>	<b>0.2</b>	<b>-7.3</b>	<b>15.2</b>	<b>4.4</b>	<b>2.1</b>	<b>4.3</b>	<b>6.5</b>	<b>2.4</b>	<b>1.3</b>	<b>-2.9</b>
<i>Persen dari PDB</i>	0.0	-0.8	1.7	2.1	1.0	1.9	2.8	1.1	0.6	-1.3
<b>Neraca berjalan</b>	<b>-24.4</b>	<b>-29.1</b>	<b>-27.5</b>	<b>-4.3</b>	<b>-4.9</b>	<b>-9.6</b>	<b>-7.0</b>	<b>-6.0</b>	<b>-4.1</b>	<b>-4.1</b>
<i>Persen dari PDB</i>	-2.7	-3.2	-3.1	-2.1	-2.3	-4.3	-3.0	-2.7	-1.9	-1.9
Neraca perdagangan	-1.9	-6.2	-3.0	1.6	1.2	-3.2	-0.9	-0.1	1.2	1.5
Pendapatan bersih & transfer berjalan	-22.5	-22.9	13.6	-5.9	-6.1	-6.4	-6.1	-5.8	-5.3	-5.9
<b>Neraca modal &amp; keuangan</b>	<b>24.9</b>	<b>22.0</b>	<b>44.4</b>	<b>8.7</b>	<b>7.1</b>	<b>13.7</b>	<b>14.7</b>	<b>8.9</b>	<b>6.3</b>	<b>2.5</b>
<i>Persen dari PDB</i>	2.7	2.4	5.0	4.1	3.3	6.1	6.3	4.1	3.0	1.1
Investasi langsung	13.7	12.2	16.0	0.2	3.2	3.7	6.0	4.0	2.3	3.6
Investasi porfolio	9.2	10.9	26.1	1.7	8.7	8.0	7.4	1.9	8.8	5.8
Investasi lain	1.9	-1.1	2.6	6.7	-4.9	2.2	1.3	4.0	-4.8	-6.9
<b>Kesalahan &amp; pembulatan</b>	<b>-0.3</b>	<b>-0.2</b>	<b>-1.9</b>	<b>0.1</b>	<b>-0.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-1.2</b>	<b>-0.6</b>	<b>-0.9</b>	<b>-0.9</b>
<b>Cadangan devisa*</b>	<b>112.8</b>	<b>99.4</b>	<b>112.0</b>	<b>99.4</b>	<b>102.6</b>	<b>107.7</b>	<b>111.2</b>	<b>111.9</b>	<b>111.6</b>	<b>108.0</b>

Catatan: \* Cadangan devisa pada akhir periode

Sumber: BI; BPS

Lampiran Tabel 3: Indikator utama makro-ekonomi

	1995	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014
<b><u>Neraca Nasional (% perubahan)<sup>1</sup></u></b>								
PDB riil	8.4	4.9	5.7	6.2	6.2	6.0	5.6	5.0
Investasi riil	22.6	11.4	10.9	8.5	8.9	9.1	5.3	4.1
Konsumsi riil	21.7	4.6	64.0	4.1	5.1	5.4	5.6	4.8
Swasta	22.7	3.7	0.9	4.8	5.1	5.5	5.4	5.3
Pemerintah	14.7	14.2	6.6	0.3	5.5	4.5	6.9	2.0
Ekspor riil, barang dan jasa	18.0	30.6	16.6	15.3	14.8	1.6	4.2	1.0
Impor riil, barang dan jasa	29.6	26.6	17.8	17.3	15.0	8.0	1.9	2.2
Investasi (% PDB)	28	20	24	31	31	33	32	33
Nominal PDB (milyar dolar AS)	202	165	286	755	893	918	910	889
PDB per kapita (dolar AS)	1102	857	1,396	3,178	3,690	3,740	3,659	3,524
<b><u>Anggaran Pemerintah Pusat (% GDP)<sup>2</sup></u></b>								
Penerimaan dan hibah	15.2	20.8	16.8	14.5	15.5	15.5	15.1	14.7
Penerimaan bukan pajak	4.8	9.0	5.0	3.9	4.2	4.1	3.7	3.8
Penerimaan pajak	10.3	11.7	11.7	10.5	11.2	11.4	11.3	10.9
Pengeluaran	13.9	22.4	17.3	15.2	16.5	17.3	17.3	16.9
Konsumsi	3.9	4.0	2.8	3.6	3.8	3.9	4.1	4.0
Modal	4.6	2.6	1.1	1.2	1.5	1.7	1.9	1.4
Bunga pinjaman	1.4	5.1	2.2	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3
Subsidi	..	6.3	4.1	2.8	3.8	4.0	3.7	3.7
Surplus/defisit	1.3	-1.6	-0.6	-0.7	-1.1	-1.8	-2.2	-2.2
Utang Pemerintah	32.3	97.9	44.3	24.3	22.8	22.6	24.1	23.8
Utang luar negeri pemerintah	32.3	51.4	23.4	11.1	10.2	9.9	11.2	10.2
Total utang luar negeri (termasuk utang swasta)	61.5	87.1	47.1	26.8	25.2	27.5	29.2	33.1
<b><u>Neraca Pembayaran (% PDB)<sup>3</sup></u></b>								
Neraca pembayaran keseluruhan	..	..	0.2	4.0	1.3	0.0	-0.8	1.7
Neraca transaksi berjalan	3.2	4.8	0.1	0.7	0.2	-2.7	-3.2	-3.1
Ekspor, barang dan jasa	26.2	42.8	35.0	22.0	23.8	23.0	22.4	22.4
Impor, barang dan jasa	26.9	33.9	32.0	19.2	21.2	23.2	23.1	22.7
Transaksi berjalan	-0.8	8.9	2.9	2.8	2.7	-0.2	-0.7	-0.3
Neraca transaksi keuangan	..	..	0.0	3.5	1.5	2.7	2.4	5.0
Penanaman modal langsung, neto	2.2	-2.8	1.8	1.5	1.3	1.5	1.3	1.8
Cadangan devisa bruto (USD billion)	14.9	29.4	34.7	96.2	110.1	112.8	99.4	112.0
<b><u>Moneter (% change)<sup>3</sup></u></b>								
Deflator PDB <sup>1</sup>	9.9	20.4	14.3	8.3	7.5	3.8	4.7	5.4
Suku bunga Bank Indonesia (%)	..	..	9.1	6.5	6.6	5.8	6.5	7.5
Kredit domestik	..	..	28.7	17.5	24.4	24.2	22.1	15.9
Nilai tukar Rupiah/Dolar AS (rata-rata) <sup>4</sup>	2,249	8,422	9,705	9,090	8,770	9,387	10,461	11,865
<b><u>Harga-harga (% perubahan)<sup>1</sup></u></b>								
Indeks harga konsumen (akhir periode)	9.0	9.4	17.1	7.0	3.8	3.7	8.1	8.4
Indeks harga konsumen (rata-rata)	9.4	3.7	10.5	5.1	5.3	4.0	6.4	6.4
Harga minyak mentah Indonesia (Dolar AS per barel) <sup>5</sup>	17	28	53	79	112	113	107	60

Sumber: <sup>1</sup> BPS dan kalkulasi staf Bank Dunia, angka PDB sudah menyesuaikan dengan SNA 2008; <sup>2</sup> Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia (tahun 1995 is FY 1995/1996, dan 2000 covers 9 months); <sup>3</sup> Bank Indonesia; <sup>4</sup> IMF; <sup>5</sup> CEIC

Lampiran Tabel 4: Sekilas indikator pembangunan Indonesia

	2000	2005	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Kependudukan<sup>1</sup></b>								
Penduduk (juta)	213	227	242	245	248	251	254	..
Tingkat pertumbuhan penduduk (%)	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	..
Penduduk perkotaan (% terhadap total)	42	46	50	51	51	52	53	..
Rasio ketergantungan (% penduduk usia kerja)	55	54	51	51	50	50	49	..
<b>Angkatan Kerja<sup>2</sup></b>								
Angkatan kerja, total (juta)	98	106	117	117	120	120	122	128
Laki-laki	60	68	72	73	75	75	76	78
Perempuan	38	38	45	44	46	45	46	50
Kontribusi tenaga kerja sektor pertanian (%)	45	44	38	36	35	35	34	33
Kontribusi tenaga kerja sektor industri (%)	17	19	19	21	22	20	21	21
Kontribusi tenaga kerja sektor jasa (%)	37	37	42	43	43	45	45	45
Tingkat pengangguran, total (% angkatan kerja)	8.1	11.2	7.1	7.4	6.1	6.2	5.9	5.8
<b>Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan<sup>3</sup></b>								
Konsumsi rumah tangga, median (Rp 000 per bulan)	104	211	374	421	446	487	548	..
Garis kemiskinan nasional (Rp 000 per bulan)	73	129	212	234	249	272	303	331
Jumlah penduduk miskin (juta)	38	35	31	30	29	28	28	29
Penduduk miskin (% penduduk dibawah garis kemiskinan)	19.1	16.0	13.3	12.5	12.0	11.4	11.3	11.2
Di perkotaan	14.6	11.7	9.9	9.2	8.8	8.4	8.3	8.3
Di perdesaan	22.4	20.0	16.6	15.7	15.1	14.3	14.2	14.2
Laki-laki sebagai kepala rumah tangga	15.5	13.3	11.0	10.2	9.5	9.2	11.2	..
Perempuan sebagai kepala rumah tangga	12.6	12.8	9.5	9.7	8.8	8.6	11.9	..
GINI indeks	0.30	0.35	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	..
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok termiskin (%)	9.6	8.7	7.9	7.4	7.5	7.4	7.5	..
Kontribusi konsumsi pada 20% kelompok terkaya (%)	38.6	41.4	40.6	46.5	46.7	47.3	46.8	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat (% PDB) <sup>4</sup>	..	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	..
<b>Kesehatan dan Gizi<sup>1</sup></b>								
Tenaga kesehatan (per 1,000 people)	0.16	0.13	0.29	..	0.20	..	..	..
Tingkat kematian balita (per 1000 anak usia dibawah 5 tahun)	52	42	33	32	30	29	28	27
Tingkat kematian bayi lahir (per 1000 kelahiran hidup)	22	19	16	16	15	15	14	14
Tingkat kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)	41	34	27	26	25	24	24	23
Rasio kematian persalinan (perkiraan, per 100,000 kelahiran hidup)	340	270	210	..	..	190	..	..
Imunisasi campak (% anak usia dibawah 2 tahun)	74	77	78	80	85	84	77	..
Total pengeluaran untuk kesehatan (% GDP)	2.0	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	..	..
Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan (% GDP)	0.7	0.8	1.1	1.1	1.2	1.2	..	..
<b>Pendidikan<sup>3</sup></b>								
Angka partisipasi murni (APM) SD, (%)	..	92	92	92	93	92	93	..
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	48	48	49	49	50	48	..
Angka partisipasi murni pendidikan tingkat menengah, (%)	..	52	61	60	60	61	65	..
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	50	50	50	49	50	50	..
Angka partisipasi murni universitas/pendidikan tinggi, (%)	..	9	16	14	15	16	18	..
APM perempuan (% dari total partisipasi)	..	55	53	50	54	54	55	..
Angka melek huruf Dewasa (%)	..	91	91	91	92	93	93	..
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap PDB) <sup>5</sup>	..	2.7	3.5	3.6	3.8	3.8	3.6	..
Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan (% terhadap APBN) <sup>5</sup>	..	14.5	20.0	20.2	20.1	20.0	19.9	..
<b>Air Bersih dan Kesehatan lingkungan<sup>1</sup></b>								
Penduduk dengan akses air bersih disempurnakan (% tot penduduk)	78	81	85	85	86	86	87	87
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	91	92	93	93	94	94	94	94
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	68	71	76	77	77	78	79	80
Penduduk dengan akses kesehatan lingkungan (% tot penduduk)	44	53	57	58	59	60	61	61
Di perkotaan (% penduduk perkotaan)	64	70	70	71	71	72	72	72
Di perdesaan (% penduduk perdesaan)	30	38	44	45	46	47	48	48
<b>Lainnya<sup>1</sup></b>								
Pengurangan resiko bencana (skala 1-5; 5=terbaik)	..	..	..	3.3	..	..	..	..
Proporsi perempuan yang duduk di parlemen (%) <sup>6</sup>	8	11	18	18	19	19	17	..

Sumber: <sup>1</sup> World Development Indicators; <sup>2</sup> BPS (Sakernas); <sup>3</sup> BPS (Susenas) dan Bank Dunia; <sup>4</sup> Kementerian Keuangan dan kalkulasi oleh staf Bank Dunia dan hanya termasuk pengeluaran aktual untuk Raskin, Jamkesmas, BLT, BSM, dan PKH; <sup>5</sup> MoF; <sup>6</sup> Inter-Parliamentary Union



Supported by funding from the Australian Government (Department of Foreign Affairs and Trade, DFAT), under the Support for Enhanced Macroeconomic and Fiscal Policy Analysis (SEMEFPA) program.